

634.92

mas

p



**PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN RANDUBLATUNG TERHADAP
HUTAN DAN PENGELOLAANNYA DALAM MENINGKATKAN
KESESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITARNYA**

TESIS

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

Masqudori

NIM.B4A.099111

Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi

Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, Sh, MS

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN RANDUBLATUNG TERHADAP HUTAN DAN PENGELOLAANNYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITARNYA

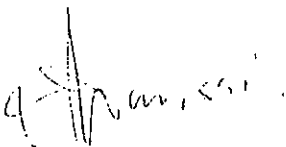
Oleh

MASQUDORI
NIM.B4A.099111
PROGRAM KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI

*Tesis ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Depan Dewan
Penguji Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*

Mengetahui

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, SH, MS

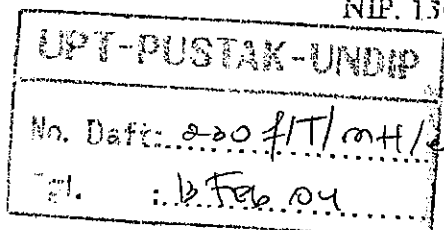
NIP. 130 529 430



Ketua Program Magister
Ilmu Hukum Undip Semarang

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130 350 519



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Ketika era reformasi pertama bergulir sekitar pertengahan Mei 1998 dan terjadi kekacauan sosial di mana-mana, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi laboratorium penelitian raksasa. Tertarik atas sentilan itu, fenomena hutan dan masyarakat yang melingkupinya patut dijadikan obyek studi. Penjarahan hutan jati secara besar-besaran yang terjadi di Jawa Tengah, khususnya wilayah Blora dan juga yang terjadi di KPH Randublatung, menjadikan studi ini semakin menarik. Munculnya ketidakadilan dalam pengelolaan dan pembagian hasil hutan telah dirasakan masyarakat sekitar hutan bertahun-tahun bahkan berabad-abad, ini dapat dilihat bukan hanya era penjarahan hutan setelah reformasi. Tetapi protes-protes sosial masyarakat hutan muncul dengan berbagai varian, mulai dari *saminisme*, *hidden transcribe* (perlawanan terselubung seperti menggunakan olok-olok atau pembangkangan) hingga *banditisme* hutan. Para pemrotes ada yang melakukan gerakan diam tidak mau bekerja, pergi ke hutan tetapi di hutan duduk-duduk, *ngrasani* dengan cara membuat joke-joke, mematikan bibit-bibit pohon yang baru saja di tanam oleh Perhutani hingga melakukan penebangan gelap untuk kepentingan *subsistensi* atau kelangsungan hidup.

Trend global dalam pengelolaan hutan muncul dengan melahirkan paradigma baru berupa *Community Base Forest Management* (CBFM) yang membalik paradigma lama di mana manajemen kehutanan dikelola secara terpusat melalui korporatisme negara, sedang pada CBFM berbasis pada komunitas lokal. Harapannya adalah, dengan

pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat lokal terjadi pembagian hasil yang memadai antara berbagai *stakeholders* di bidang kehutanan karena yang lebih dipentingkan adalah komunitas yang hidup di dalam atau di sekitar hutan.

Dalam implementasinya paradigma yang diusung CBFM belum menjajikan harapan baru bagi masyarakat sekitar hutan, karena lebih disebabkan karena kebijaksanaan yang diambil belum mempertimbangkan persepsi yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga yang terjadi masih ada ketimpangan antara persepsi masyarakat dengan Negara (Perhutani) dalam memandang hutan dan sistem pengelolaannya. Disinilah untuk kemudian persepsi masyarakat menjadi semakin penting .

Ada daftar nama yang sangat panjang yang harus saya beri terima kasih atas jerih payahnya sehingga penulisan ini bisa terselesaikan. Saya berutang budi pada banyak orang selama penyelesaian penulisan ini. Saya berterimakasih kepada Prof.Dr. Hj.Esmi Warassih Pujirahayu, SH,MS, atas segala bimbingannya dan diskusi yang berlangsung serta masukan-masukan yang diberikan, keikhlasannya semoga dibalas sebagai ibadah. Demikian juga kepada tim penguji, Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH, Sudardi, SH, Paulus Hadi Suprpto, SH,MS , yang telah banyak membuka wacana-wacana baru yang membuat pencerahan pikiran baru bagi penulis. Terimakasih juga disampaikan kepada ADM Perhutani Randublatung, Ir.Sudarsono beserta stafnya terutamanya para Mandor, dan Mantri, serta aparat desa dan masyarakat yang telah banyak memberi bahan-bahan renungan ketika penelitian dilakukan. Kepada Kasat Brimobda Jateng disampaikan terimakasih atas segala dorongan dan dukungan yang begitu luar biasa.

Kepada istri, Yuli, tulisan ini dipersembahkan sebagai kado atas kesetiaannya dan dorongan semangat yang diberikan di saat-saat penulis mengalami drop dan kelelahan yang luar biasa. Buat anak-anak Ivan dan Achda, bahwa ternyata keberhasilan dan kesuksesan tidak datang secara tiba-tiba, tetapi harus dilalui melalui kerja keras dan kemauan. Tulisan ini juga dihaturkan kepada kedua orang tua yang sangat bijak memberi semangat baru yang tak ternilai harganya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini memerlukan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Terimakasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Juni 2003

Penulis

Masqudori

ABSTRACT

Understanding of perception, value, and social attitude who live in the surrounding teak estate to the existence of forest and system of management in developing their welfare is becoming very urgent. It is not only caused by the study of cultural law, but also by management system of natural resources, especially forest phenomena of social not that is still happening. Conflict between government and local society or between business men and local society, or even the conflict between group of society with the others is getting more dangerous in claiming the legal right of managing forest.

Management of natural resources in claiming the legal right of managing forest is not in the emptiness so it can be done singly without giving any attention to what is developing and rooted in local society. Messy forest management historically was the result of government interference which is dominative, hegemonic, and autoritarian, so people who live in the surrounding of forest are in the condition of marginalizing by the system, and they live in the injustice such condition appears the unsatisfactory in society, especially those who live in the surrounding of forest of local society which live in the forest. Rural society of the forest which have been living in the forest or in the surrounding of forest before the government of Indonesia has no meaningful access in management and dividing the result of forest. Their social living becomes marginal and the phenomena appears in society whose life is in poverty and in fact they must have the prosperity of forest result.

In this case there are so many questions which are focussed on ; (1) what is the real social perception in the surrounding of forest to the forest itself (2) what is the real social perception to the management system of forest carried out that is related with to their living prosperity.

This study was carried out in the region of KPH Randublatung, by which the destruction of forest is now very severe due to greater loss of wood. The finding study showed that (1) the change of policy of management system by Perhutani in relation with the issue of Undang-undang No. 41-1999 about forestry and regulations which follow it actually have accommodated the problems which are faced by those people who live in the forest surrounding that is related with developing perception in the society but (2) in its implementation it gives big benefit fully for society in developing welfare, because law regulations are read texts by texts, and the government in this case Perhutani and Pemda and government institutions still do not run the policy and give impression that run the policy by their own will. Perception develops in society is never made into consideration, and the result of policy does not give good result and the society is still in their previous poverty position and tortured by the system.

ABSTRAK

Pemahaman tentang persepsi, nilai, dan perilaku masyarakat sekitar hutan jati terhadap keberadaan hutan dan sistem pengelolaannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya semakin menjadi urgen. Hal itu bukan hanya karena studi itu menyangkut pula studi tentang budaya hukum, tetapi lebih disebabkan karena dalam sistem pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan, fenomena kekacauan sosial sedang terjadi. Konflik antara negara dengan masyarakat lokal, atau pengusaha dengan masyarakat lokal, bahkan sangat mungkin kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain sedang meruncing dalam perebutan klaim hak pengelolaan hutan.

Pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mencapai keadilan antar berbagai pihak yang berkepentingan tidak dapat berjalan secara sendirian. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan hutan tidak berada di ruang hampa sehingga dapat direkayasa secara tunggal tanpa memperhatikan apa yang berkembang dan mengakar dalam masyarakat lokal. Kondisi carut marutnya pengelolaan hutan secara historis sebagai akibat dari ulah negara yang dominatif, hegemonik, dan otoriter, sehingga masyarakat sekitar hutan seperti dalam kondisi termarginalkan oleh sistem, yang akibatnya mereka hidup dalam ketidakadilan. Kondisi seperti ini mendatangkan ketidakpuasan di masyarakat terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan atau masyarakat lokal yang berada di dalam hutan. Masyarakat desa hutan yang tinggal sudah berabad-abad di dalam atau di sekitar hutan sebelum negara Indonesia tidak dapat memiliki akses yang berarti dalam pengelolaan dan pembagian hasil hutan. Kehidupan sosial mereka menjadi marginal dan fenomena yang muncul adalah masyarakat hidup dalam kemiskinan padahal seharusnya mereka bisa mendapatkan kelimpahruahan hasil hutan.

Disinilah permasalahan dimunculkan dengan sebuah pertanyaan difokuskan tentang (1) Bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat di sekitar hutan memandang hutan itu sendiri dan (2) Bagaimana persepsi masyarakat memandang terhadap sistem pengelolaan hutan itu dilakukan yang dihubungkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Studi ini dilakukan di wilayah KPH Randublatung, dimana saat ini kasus kerusakan hutan jati di wilayah itu sangat memprihatinkan sebagai akibat pencurian secara besar-besaran. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) perubahan kebijaksanaan sistem pengelolaan hutan oleh Perhutani dengan keluarnya Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan-peraturan yang mengikutinya sebenarnya telah mengakomodasi permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar hutan yang dihubungkan dengan persepsi yang berkembang dalam masyarakat namun (2) dalam implementasinya belum sepenuhnya memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahterannya, karena peraturan hukum hanya dibaca secara kaku teks per teks, dan pemerintah dalam hal ini Perhutani dan Pemda serta instansi lain masih setengah hati dalam menjalankan kebijaksanaan itu dan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Persepsi yang berkembang di dalam masyarakat tidak dijadikan pertimbangan, akibatnya kebijaksanaan yang diambil menjadi mandul dan masyarakat tetap dalam posisi semula miskin dan teraniaya oleh sistem.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR/TABEL.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Kerangka Teoritik.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	39
E. Kontribusi Penelitian.....	40
F. Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penelitian.....	49
 BAB II PENGELOLAAN HUTAN JATI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUTAN HUBUNGANNYA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUP	
A. Pengelolaan hutan.....	52
1. Hutan dan Kehutanan.....	52
2. Konsep Kelestarian hutan.....	54
3. Konsep hutan normal.....	56
4. Teori pengaturan hasil hutan.....	58
5. Pengelolaan hutan jati.....	61
B. Masyarakat sekitar hutan dan kesejahteraan hidup.....	82
1. Persepsi masyarakat tentang hutan.....	83
2. Konsep hidup sejahtera.....	94
 BAB III DESKRIPSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN JATI RANDUBLATUNG.....	 103
A. Kondisi Lingkungan fisik.....	103
1. Keadaan Geografi.....	103
2. Lokasi dan luas hutan jati Randublatung.....	108

B.	Lingkungan Sosial Ekonomi Hutan Jati.....	110
1.	Perkembangan Penduduk dan Kehidupan Ekonomi.....	110
2.	Produktifitas hutan jati.....	116
3.	Pendapatan Masyarakat.....	121
C.	Dampak pertambahan penduduk terhadap hutan jati.....	122
1.	Bidang Tanaman.....	124
2.	Masalah Pencurian Kayu.....	126
D.	Perlindungan hutan jati.....	130
1.	Pencurian.....	132
2.	Kebakaran hutan	133
3.	Penggembalaan.....	134
4.	Hama dan Penyakit.....	136

BAB IV IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN JATI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN..... 137

A.	Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	137
1.	Jumlah Penduduk dan Kesempatan Kerja.....	137
2.	Kebutuhan Dasar Masyarakat.....	141
B.	Perubahan Strategi Pengelolaan Hutan.....	142
1.	Pengelolaan Hutan Konvensional.....	142
2.	Kehutanan Sosial.....	142
C.	Implikasi Kebijakan Baru.....	147
1.	Faktor Penghambat.....	147
2.	Faktor Pendukung.....	154
3.	Konsekuensi Perubahan.....	161

BAB V P E N U T U P

A.	Simpulan.....	176
B.	Saran.....	181

DAFTAR PUSTAKA.....	183
---------------------	-----

DAFTAR GAMBAR/TABEL

1.	GAMBAR 1 :	Perkembangan jumlah penduduk dan Konsekuensinya terhadap hutan.....	7
2.	GAMBAR 2 :	Hubungan Persepsi dengan perilaku.....	39

TABEL

1.	TABEL 1 :	Luas hutan Jati Jawa Tengah Tahun 1999.....	64
2.	TABEL 2 :	Macam-macam Tanah KPH Randublatung...	105
3.	TABEL 3 :	Luas Wilayah, Jumlah penduduk dan kepadatan.....	112
4.	TABEL 4 :	Keadaan ternak di Wilayah KPH Randu- Blatung.....	115
5.	TABEL 5 :	Volume dan Nilai Kerugian Pencurian.....	119
6.	TABEL 6 :	Realisasi Penghasilan dan pengeluaran Perum Perhutani Jateng.....	120
7.	TABEL 7 :	Jumlah Penduduk.....	174
8.	TABEL 8 :	Data Mata Pencarian.....	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan bentuk penutupan lahan asli yang banyak dijumpai di muka bumi ini. Sejak jaman purba manusia mempunyai hubungan yang erat dengan hutan. Pada mulanya hutan berfungsi sebagai sumber bahan makanan dan sekaligus tempat untuk berlindung maupun berteduh. Tetapi sejak manusia mulai membudidayakan binatang dan tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh jaminan sumber makanan, hubungannya dengan hutan secara berangsur-angsur menjadi semakin berkurang. Hubungan manusia dengan hutan menjadi bersifat tidak langsung. Sejak itu lahirlah berbagai macam fungsi hutan bagi masyarakat modern, seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, dan fungsi keindahan.¹

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara. Di dalam agenda 21 Konferensi Tingkat

¹ Hasanu Simon, *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2000, hal-7-8.

Tinggi di Rio de Jenerio pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia.²

Akibat pemanfaatan hutan untuk memenuhi berbagai macam kepentingan manusia, banyak hutan alam (*virgin forest*) yang dikonversi menjadi hutan tanaman (*plantation atau man made forest*). Dipandang dari segi manfaat ekonomi, hutan tanaman memang lebih menguntungkan dibanding dengan hutan alam.

Di Indonesia, karena pertimbangan nilai dan sarana yang tersedia, sampai dengan awal dasawarsa tujuh puluhan hutan tanaman hanya dikenal di pulau Jawa. Jenis hutan tanaman yang pertama kali dibuat adalah jati (*Tectona grandis*).

Di masa lalu peranan hutan umumnya hanya dilihat dari aspek produksi dan perlindungan saja, karena lahan hutan masih tersedia melimpah. Namun sekarang telah menjadi jelas bahwa kehutanan dapat mendiversifikasi kegiatan ekonomi di daerah pedesaan, yang mempunyai arti sangat penting dalam menciptakan landasan pembangunan pedesaan. Hampir semua negara sedang berkembang, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya dapat dicapai melalui mobilisasi energi masyarakat dan sumber daya yang terdapat di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan tidak hanya harus dipertimbangkan dari sudut pandang produksi pangan dan pertanian saja, tetapi juga harus diarahkan untuk menimbulkan kemampuan masyarakat pedesaan agar mampu keluar dari kemiskinan yang dihadapi pada saat sekarang. Dalam konteks ini, kehutanan,

² Pamulardi, Bambang, *Hutan Tropik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Majalah Kehutanan

khususnya pengelolaan hutan jati dapat menyajikan alternatif pembangunan yang cukup banyak, yang apabila dikelola secara memadai akan memberikan banyak jalan pemecahan.

Untuk memahami peranan kehutanan dalam pembangunan pedesaan, adalah perlu untuk melihat masalah umum tentang pengelolaan hutan. Dalam beberapa hal, sistem pengelolaan hutan alam produksi berbeda dengan pengelolaan hutan tanaman. Di Indonesia, pengelolaan hutan produksi yang berasal dari hutan alam masih dititikberatkan pada pemungutan kayu dengan menggunakan alat-alat modern yang memerlukan modal besar. Di lain pihak, pengalaman pengelolaan hutan tanaman telah meliputi semua kegiatan teknik kehutanan, mulai dari penanaman, pemeliharaan tegakan, penebangan, penjagaan keamanan, pengelolaan hasil dan pemasaran.

Hutan jati di Jawa merupakan hutan di Indonesia yang pertama kali dikelola berdasarkan asas kelestarian, yaitu suatu prinsip yang menjadi landasan pengelolaan hutan di seluruh dunia sampai sekarang. Hal itu disebabkan karena hutan jati menghasilkan kayu yang bernilai tinggi. Selama pemerintahan Belanda di Indonesia, hutan jati memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi nasional. Setelah kemerdekaan, peranan tersebut masih tetap ada, khususnya

dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa sekitar hutan (Blandong)³, serta produksi kayu bakar dan kayu perkukangan.

Sejak dekade 1960-an hutan jati di Jawa mengalami proses kemerosotan kualitas tegakan yang sangat mencemaskan. Proses tersebut berakar dari jumlah penduduk di Jawa yang terus meningkat hingga kepadatan penduduk dikhawatirkan melampaui daya dukung wilayah. Pada dekade 1960-an itu kepadatan penduduk di Jawa mulai melintasi titik keseimbangan antara persediaan dan kebutuhan minimum lahan pertanian yang dibutuhkan oleh keluarga petani. Hal ini berarti apa yang oleh Clifford Geertz dinamakan involusi pertanian (*agrocultural involution*) sudah berakhir karena kemampuan lahan sawah untuk menampung tambahan tenaga kerja baru ada batasnya.⁴ Batas tersebut dicapai setelah luas lahan pertanian yang tersedia sudah lebih kecil dibandingkan dengan luas kebutuhan minimum setelah teknologi tidak lagi dapat meningkatkan produktifitas lahan.

Konsekuensi logis yang timbul akibat pertambahan penduduk di Jawa dilukiskan pada gambar 1.⁵ Dari gambar tersebut nampak bahwa ditinjau dari

³ Blandong adalah masyarakat sekitar hutan jati yang bekerja pada Perhutani mulai dari tenaga tanam, tenaga pemeliharaan, tenaga tebang maupun tenaga angkut. Istilah Blandong sudah dikenal cukup lama jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda ke Jawa. Blandong mulai diintensifkan setelah VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) menguasai sebagian daerah pesisir utara pulau Jawa. Sedangkan Warto, membatasi bahwa Blandong diartikan sebagai bagian dari kerja wajib (kerja paksa) negara (*herendiensten*) di masa kolonial, yang dilakukan oleh penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan (lihat Warto, *Blandong, Kerja Wajib Eksploitasi Hutan Di Rembang Abad Ke-19*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2001, hal-1-14).

⁴ Lihat Geertz, Clifford, 1963, *Agricultural Involution*, University of California Press, Los Angeles, XVIII-170.

⁵ Simon, Hasanu, 1993, *Hutan jati dan Kemakmuran*, Aditya Media, Yogyakarta, IX-244.

aspek pengelolaan hutan, meningkatnya jumlah penduduk di Jawa menyebabkan perubahan dalam hal ; (a) konsumsi pangan meningkat; (b) rata-rata luas pemilikan lahan pertanian per keluarga petani menurun; (c) jumlah angkatan kerja meningkat; (d) jumlah kebutuhan kayu bakar meningkat; dan (e) jumlah kebutuhan kayu pertukangan meningkat.

Adanya penurunan rata-rata pemilikan lahan pertanian di satu pihak dan peningkatan jumlah angkatan kerja di lain pihak, yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja di luar sektor pertanian (*off-farm employment*), terbukti telah menyebabkan timbulnya kemiskinan di pedesaan. Untuk kehutanan, kelima hal di atas menyebabkan terjadinya;⁶

1. Penurunan kualitas hasil pembuatan tanaman. Kalau penurunan kualitas tersebut sedemikian besarnya , maka pembuatan tanaman dinyatakan gagal.
2. Penggembalaan ternak yang tak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan hutan. Tingkat kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh penggembalaan juga sangat bervariasi, mulai dari memburuknya struktur dan aerasi tanah sehingga menurunkan kesuburannya, kerusakan kualitas individu pohon, sampai kehancuran tegakannya itu sendiri.

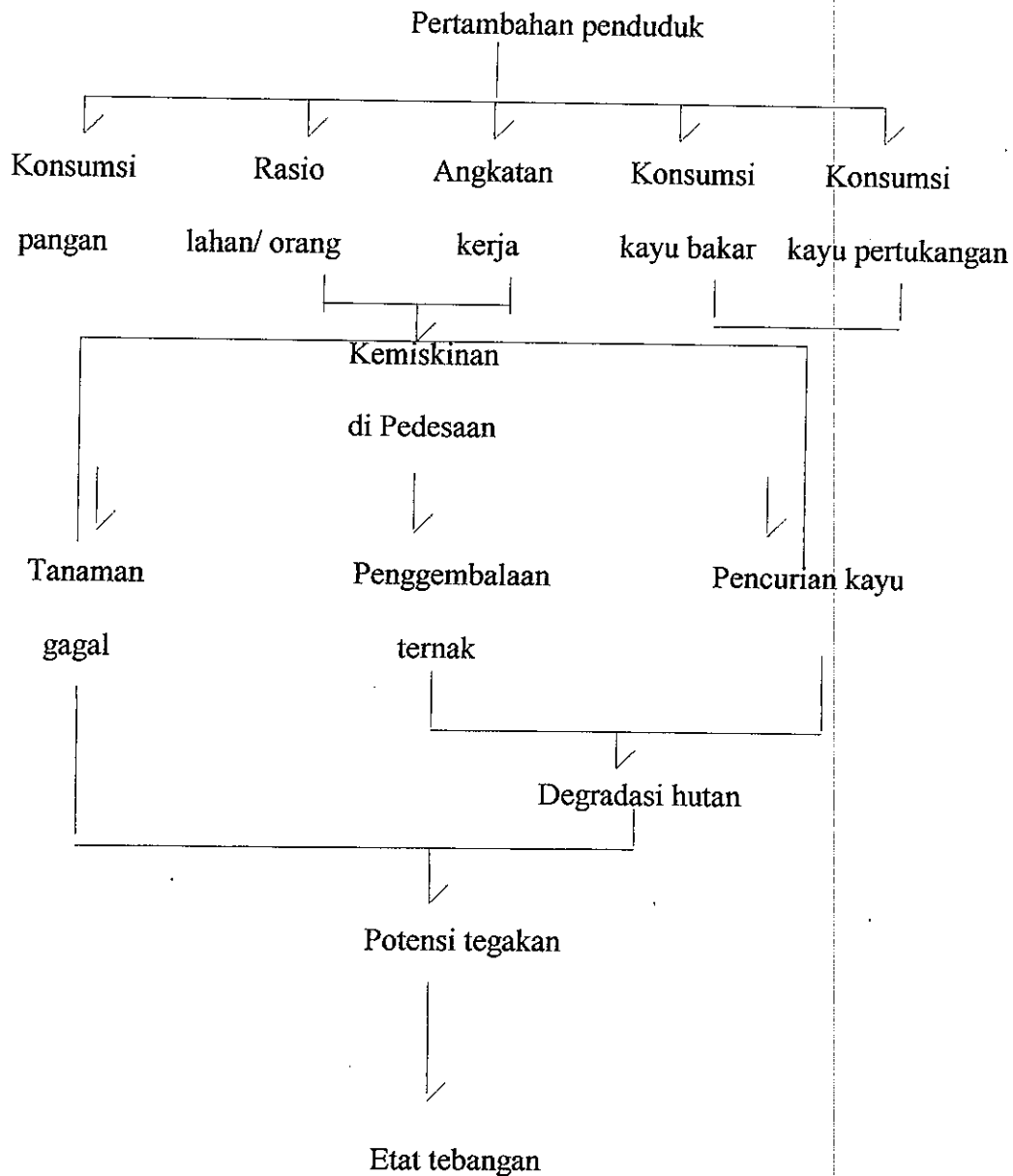
⁶ Lihat Simon, Hasan, *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management)*, Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa, Cetakan II, 2001, Bigrif Publishing, Yogyakarta, hal.1-18.

3. Intensitas pencurian kayu melampaui batas yang dapat ditolerir, yaitu lebih besar dibanding dengan intensitas penjarangan, sehingga jumlah batang tegakan tinggal di bawah normal.⁷

⁷ Pada tahun 1998, ketika masyarakat hidup dalam kebebasan di awal era reformasi pencurian kayu jati bukan saja sudah melampaui batas toleransi, tetapi sudah membahayakan ekosistem dan kerusakan hutan jati. Pencurian bukan sekedar untuk kayu bakar, atau memperbaiki rumah tetapi sudah merupakan jaringan yang melibatkan mereka yang bermodal (laporan bulanan KPH Randublatung bulan Januari-Juli 1999). Pencurian kayu jati sebenarnya berakar dari "hak ulayat" masyarakat sekitar hutan jati untuk mengambil manfaat ekonomi dari hutan jati. Delanjutnya pencurian berkembang menjadi upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan petani pada saat-saat tertentu karena lapangan pekerjaan tidak cukup. Pada saat itu pencurian kayu masih terjadi secara musiman, yaitu pada masa paceklik dan menjelang hari raya atau kenaikan kelas (dekade 1950-an), dekade 1970-an pencurian tidak lagi secara musiman namun sepanjang tahun kaena pengangguran sedangkan tahun 1980-an intensitasnya semakin tinggi (Simon, 1982).

Gambar 1

Perkembangan jumlah penduduk dan konsekuensinya terhadap hutan



Sumber : Simon (1993:9)

Selama ini Perhutani selalu menggunakan petani yang bertempat disekitar hutan sebagai tenaga kerja upahan (waged-labour) yang merupakan pelaksana

langsung kegiatan teknik kehutanan jati. Oleh karena itu hubungan itu jelas sangat dekat. Akan tetapi antara pejabat Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan jati sendiri telah terjadi perbedaan cara pandang dalam melihat hubungan tersebut. Masyarakat di sekitar hutan menganggap dirinya sebagai subyek dalam pembangunan pertanian maupun kehutanan, sedangkan pejabat kehutanan memandang mereka sebagai pihak yang harus selalu mengikuti peraturan dan melaksanakan segala perintahnya. Dengan kata lain, dalam pembangunan masyarakat, rakyat ditempatkan sebagai obyek. Pandangan ini sekarang mulai berubah, meski masih terbatas di tingkat pengambil keputusan, dan belum mengakar sampai ke bawah sehingga belum dilaksanakan oleh pimpinan tingkat lapangan.

Adanya perbedaan dalam memandang hubungan antara masyarakat di sekitar hutan dengan kehutanan itu menimbulkan berbagai masalah (*disharmony*). Karena intensitas pembangunan meningkat, termasuk intensifikasi di bidang pertanian, problem sosial bertambah dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat meningkat sehingga masalah yang timbul akibat *disharmony* itu juga semakin pelik.

Pada hakekatnya setiap manusia mempunyai keinginan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan hidup ini dapat tercapai apabila kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani mereka dapat terpenuhi. Dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup, manusia memanfaatkan potensi-potensi atau

sumber daya yang ada di sekitarnya dan mengembangkan sistem pengetahuan untuk menghadapi lingkungannya. Pengembangan dan peningkatan kualitas manusia dalam lingkup kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan cara-cara meningkatkan kemampuan, melindungi dari kekurang-mampuan orang-perorangan maupun kelompok masyarakat, memelihara masyarakat dari gangguan dan masalah-masalah yang dapat merusak ataupun mengurangi kemampuan yang telah dimiliki, dan mengoptimalkan berbagai kemampuan dan keikutsertaan dalam sistem kesejahteraan manusia.⁸ Persepsi masyarakat sekitar hutan tentang hutan jati dan sistem pengelolaannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya terwujud dalam suatu perilaku untuk mencapainya dengan menggunakan suatu tatanan nilai sebagai aturan dalam mendukung usaha-usaha tersebut.

Pemahaman tentang sistem ide suatu masyarakat dalam melihat lingkungan di mana suatu masyarakat tersebut tinggal dan dalam menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada melalui cara pandang mereka, sangat diperlukan dalam usaha memajukan masyarakat tersebut dan juga bagi perencanaan pembangunan kehutanan. Pada dasarnya pembangunan menuntut adanya perubahan sikap dan tindakan suatu masyarakat dalam menanggapi lingkungan. Mengingat sikap dan tindakan tersebut merupakan perwujudan dari sistem pengetahuan suatu masyarakat, maka perubahan sikap dan tindakan tersebut perlu didahului dengan perubahan sistem pengetahuan. Dengan bekal sistem pengetahuan masyarakat ini, maka para

⁸ Nurdin, M. Fadhil, 1990, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Angkasa, Bandung hal.10

perencana pembangunan kehutanan (baca: Perhutani) dapat menentukan suatu pendekatan pembangunan yang tepat dan sesuai dengan pandangan masyarakat khususnya masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar hutan jati. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan tercipta sampai pada partisipasi di tingkat ide.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kehutanan dapat dilihat dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan dicanangkannya pengelolaan hutan bersama masyarakat. Ditinjau dari aspek pemanfaatan fungsi ekonomi, perkembangan hubungan antara sub-sistem kehutanan dengan sub-sistem masyarakat dapat dibedakan antara hubungan tradisionil dan hubungan komersial. Dalam masyarakat tradisionil, hubungan manusia dengan hutan masih menyatu menjadi satu. Di sini pemanfaatan fungsi hutan terjadi melalui evolusi yang kemudian membentuk aturan tertentu yang dinamakan tradisi.⁹ Oleh ilmuwan dan masyarakat modern umumnya aturan dalam tradisi itu dinamakan hukum adat. Usaha menumbuhkan partisipasi tersebut berkaitan dengan aspek manusia dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian tentang persepsi dan perilaku masyarakat sekitar hutan jati dengan ruang lingkup studi pada aspek-aspek sosial budaya dapat menunjang usaha-usaha pembangunan kehutanan jati yang dilakukan dan dapat memahami secara lebih mendalam tentang hakekat masyarakat dan budayanya.

B. Permasalahan

Pembangunan kehutanan khususnya hutan jati mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan jati, sehingga dengan demikian pembangunan kehutanan menuntut peran serta dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan sebagai pelaku utama pembangunan kehutanan tersebut. Pemahaman tentang sistem pengetahuan masyarakat sekitar hutan jati dalam memandang hutan dan pengelolaannya demi kesejahteraan hidupnya menurut kerangka kebudayaan dapat digunakan sebagai dasar pembangunan kehutanan jati. Namun pada kenyataannya, informasi tentang sistem pengetahuan suatu masyarakat dalam memandang suatu gejala yang ada di lingkungannya masih relatif sedikit. Dengan demikian seringkali terjadi perbedaan konsepsi tentang hutan dan sistem pengelolaannya antara “orang dalam” (emic) dan “orang luar” (epic) dalam usaha mengembangkan kesejahteraan hidup suatu masyarakat utamanya masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar hutan.

Benturan-benturan pemikiran, keinginan, kehendak, dan cita-cita dalam melihat hutan, sistem pengelolaannya dan kesejahteraan hidup antara masyarakat khususnya mereka yang bertempat tinggal di sekitar hutan dan pemerintah khususnya PT. Perhutani akan selalu terjadi apabila informasi yang dapat

⁹ Simon, Hasanu, *Pengelolaan Hutan bersama rakyat (Cooperative Forest Management)*,

mengungkap sistem pengetahuan mereka masih relatif minim. Maka dua permasalahan di bawah ini masih relevan untuk diajukan ;

1. Bagaimana persepsi masyarakat di sekitar hutan jati terhadap hutan jati?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di sekitar hutan jati terhadap pengelolaan hutan jati oleh PT. Perhutani dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya?

C. Kerangka Teoritik

Konsep hukum yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum, paling tidak ada tiga ¹⁰; (1) hukum sebagai ide-ide, nilai moral dan keadilan; (2) hukum sebagai norma, kaedah, peraturan-peraturan, undang-undang yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta sebagai produk dari kekuasaan negara tertentu yang berdaulat dan (3) hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola tingkah laku yang melembaga.

Cara pandang mengenai hukum berimplikasi pada metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Apabila hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, maka metode hukum yang digunakan bersifat idealis. Metode ini selalu berusaha menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-

Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa, 1999, Bigraf Publishing, Yogyakarta hal. 58

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, 1989, CV Agung Semarang, hal-1

nilai tertentu. Apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatian akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yang bisa dibicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Cara pandang yang demikian itu mengarah pada metode normatif analitis. Apabila hukum dipahami sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang digunakan adalah sosiologis. Metode ini akan mengkaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit masyarakat.¹¹ Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, maka hukum harus dilihat dari sisi normatif (*law in book*) dan sisi sosiologis (*law in action*).

Max Weber, melihat pentingnya hukum sebagai mekanisme untuk menghantarkan perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat modern, di samping memperlihatkan hubungan timbal balik antara perkembangan masyarakat dan keadaan hukumnya.¹² Banyak aspek di luar hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Aspek non hukum tidak selalu berisi kepentingan-kepentingan yang selaras dengan hukum. Antara berbagai kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang mengarah pada konflik sosial. Pada aspek ekonomi, misalnya penuh dengan motivasi-motivasi ekonomi untuk mencapai tujuan memperoleh

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1996, Citra Aditya, Bandung, hal-5-6.

¹² Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, 1991, CV. Agung, Semarang hal-24-26.

keuntungan dari tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan. Bilamana setiap individu dan kelompok masyarakat hanya mengejar pencapaian kepentingannya masing-masing pasti akan memicu terjadinya ketegangan dan konflik sosial. Di sini peran hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban (keteraturan), keseimbangan dan faktor pengintegrasian kepentingan yang berbeda. Peran hukum demikian disebut fungsi integratif hukum, yaitu mengatur, memelihara dan mengontrol hubungan-hubungan sosial.¹³

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 128 tahun, yaitu sejak diundangkannya *Reglemen Hutan* 1865.¹⁴ Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris kuno yang disebut *Forrest law* (hukum kehutanan) adalah; “*The system or body of old law relating to the royal forrest*”.¹⁵

Dari definisi di atas tampak bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun dalam perkembangannya aturan tersebut disempurnakan melalui *Act 1971*.

¹³ Adam Podgorecki dan Cristoper J Welan (ed) , *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, 1987, Bina Aksara, Jakarta, hal-122.

¹⁴ Lebih jelas lihat Salim, *Dasar-dasar hukum kehutanan*, 1997, Sinar grafika offset, Jakarta, hal-5-10

¹⁵ Campbell Black, Henry, 1979, *Black Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co. hal 584

Dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).

Dalam kaitan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut hukum kehutanan adalah: "Serangkaian kaidah-kaidah/ norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan".¹⁶ Sedangkan Salim memberi pengertian bahwa hukum kehutanan : "kumpulan kaedah/ ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan".¹⁷

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu; (1) adanya kaedah hukum kehutanan, baik tertulis maupun tidak tertulis; (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan; dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-

¹⁶ Idris Sarong Al Mar, 1993, Pengukuhan Hutan dan Aspek-aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I, Bahan Penataran Teknis-Yuridis Kawasan Hutan, 1992/1993.

¹⁷ Salim, 1997, Op Cit, hal-6

ketentuan pokok kehutanan, yang telah diperbaharui dengan lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Dalam hukum tertulis ini hal-hal yang diatur adalah tentang pengurusan hutan, pengelolaan hutan, perlindungan, pengawasan dan pengembangan hutan. Dalam pasal 49 (3) undang-undang nomor 41 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang ; (a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; (b) merambah kawasan hutan; © melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan; (d) membakar hutan; (e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin; (h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (I) menggembala ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; (j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; (k) membawa alat-alat lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa

izin pejabat yang berwenang; (l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan (m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah; (1) hak membuka tanah di hutan; (2) hak untuk menebang kayu; (3) hak memungut hasil hutan; dan (4) hak untuk mengembangkan ternak dan sebagainya.

Di berbagai daerah hak-hak tersebut diatur oleh desa, dan dahulu hak-hak itu dikuasai oleh raja, serta kini dikuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak adat itu diatur sedemikian rupa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan.

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas. Sedangkan hubungan

antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karena individu (perseorangan) tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutan. Namun demikian, individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara, seperti membayar biaya pengujian, dan Iuran Hasil Hutan (IHH).

Berkaitan dengan itu Von Savigny,¹⁸ mengemukakan bahwa (a) hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum merupakan proses yang tidak disadari dan organis, oleh karena itu perundang-undangan kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan; (b) hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern, kesadaran hukum akan disajikan oleh para ahli hukum dalam bentuk rumusan-rumusan prinsip hukum secara statis; © undang-undang tidak berlaku stsu tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi yang khas.

Berkaitan dengan keberadaan hukum di tengah masyarakat, Hoebel¹⁹ mengungkapkan postulat hukum yang berkaitan dengan terciptanya (terbentuknya) hukum itu. Postulat hukum tersebut diartikan sebagai hal-hal yang oleh para

¹⁸ W. Friedmann, 1953, *Legal Theory*, Stevens & Sons Ltd, London, hal.211

¹⁹ Hoebel, E. Adamson, 1967, *The Law of Primitive Man*, Cambridge Mass, Harvard University Press, hal 36-38

warganya dianggap baik dan karena itu harus dikejar, dan hal yang dianggap buruk harus dielakkan. Postulat hukum berupa nilai-nilai inilah yang mendasari tingkah laku dan penerimaan nilai baru, norma hukum, dan lembaga hukum dalam masyarakat.

Teori hukum idealis mengemukakan bahwa apabila ingin diketahui ada dan berkembangnya hukum di tengah masyarakat, maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat bangsa tersebut, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai, norma dan hukum. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum akan terdapat di tengah masyarakat yang berbudaya, oleh karena itu berkaitan dengan pembentukan hukum. Kohler²⁰ menunjukkan bahwa, "*law is considered (a) as to the past as a product of civilization; (b) as to the present as a means of maintaining civilization; (c) as to the future as a means of furthering civilization*".

Donald Black mengatakan hukum tidak bisa dimaknai hanya sekedar sebagai barisan kalimat dalam perundang-undangan. Black menegaskan hukum bukan sekedar perangkat aturan-aturan baik tertulis maupun tak tertulis, namun harus dipahami sebagai perilaku. Paralel dengan pernyataan Black, ahli hukum lain, Lawrence Meir Friedman mengatakan ada tiga unsur yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. yakni *Substance* (aturan hukum), *structure*

²⁰ Rescoe Pound, 1978, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New haven, Yale University Press, hal-143

(pranata penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).²¹ Budaya hukum terkait erat dengan perilaku masyarakat setempat dalam hidupnya keseharian yang mencerminkan ketaatan pada hukum. Bukan hanya hukum formal tertulis, melainkan juga norma agama, etika, dan norma sosial. Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai *the legal culture provides fuel for the motor of justice*, yang dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak-senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Dengan demikian menurut pendapatnya apa yang disebut budaya hukum itu adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam rangka budaya milik masyarakat umum.

Daniel S Lev, mencoba menggunakan konsep budaya hukum yang dikemukakan Friedman untuk menganalisa perubahan sistem hukum di Indonesia semenjak jaman revolusi. Lev membagi budaya hukum dalam nilai-nilai hukum *prosedural* dan nilai-nilai hukum *substentif*.²² Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang bagaimana cara mengatur tertib masyarakat dan manajemen dari konflik. Dengan demikian ia akan membantu menentukan

²¹ Friedman, Lawrence, M, 1969, dalam *Law Society Review*, Vol 4 No.1.

(pranata penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).²¹ Budaya hukum terkait erat dengan perilaku masyarakat setempat dalam hidupnya keseharian yang mencerminkan ketaatan pada hukum. Bukan hanya hukum formal tertulis, melainkan juga norma agama, etika, dan norma sosial. Budaya hukum oleh Friedman disebut sebagai *the legal culture provides fuel for the motor of justice*, yang dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak-senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Dengan demikian menurut pendapatnya apa yang disebut budaya hukum itu adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam rangka budaya milik masyarakat umum.

Daniel S Lev, mencoba menggunakan konsep budaya hukum yang dikemukakan Friedman untuk menganalisa perubahan sistem hukum di Indonesia semenjak jaman revolusi. Lev membagi budaya hukum dalam nilai-nilai hukum *prosedural* dan nilai-nilai hukum *substansif*.²² Nilai-nilai hukum prosedural mempersoalkan tentang bagaimana cara mengatur tertib masyarakat dan manajemen dari konflik. Dengan demikian ia akan membantu menentukan

²¹ Friedman, Lawrence, M, 1969, dalam *Law Society Review*, Vol 4 No.1.

bagaimana tempat yang diberikan kepada lembaga-lembaga hukum, politik, agama dan lain sebagainya sepanjang waktu dalam sejarah bangsa dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan nilai-nilai substantif adalah terdiri dari anggapan dasar mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat tentang apa yang dianggap adil atau tidak oleh masyarakat yang bersangkutan.

Satjipto Rahardjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.²³ Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga menjalankan hukum positif itu, pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu.

Franz Magnis Suseno²⁴ melihat tentang etika kesadaran sosial masyarakat Jawa khususnya dalam mengatur interaksi-interaksinya melalui dua prinsip yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Dua prinsip itu mengalahkan prinsip-prinsip regulatif sosial lain. Keunggulan prinsip-prinsip keselarasan pertama-tama merupakan suatu kenyataan sosiologis. Suatu prinsip regulatif sosial lain adalah misalnya hukum positif. Dalam pandangan Jawa prinsip-prinsip keselarasan

²² Lev, Daniel, S, 1972, *Judicial Institution and Legal Culture in Indonesia*, dalam Peters A.A.G & Koesriani Siswosoebroto, (ed), 1988, *Hukum dan perkembangan sosial, Buku teks sosiologi hukum, Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

²³ Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung

memang harus didahulukan terhadap hukum positif. Masyarakat Jawa menuntut agar usahanya untuk menjamin kepentingan-kepentingan dan hak-haknya sendiri jangan sampai mengganggu keselarasan sosial.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya di luar hukum kehutanan sebagai hukum umum (*lex specialis drogaat lex generale*). Sedangkan tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari. Hukum kehutanan mempunyai asas-asas seperti hukum lainnya. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret. Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.²⁵ Untuk menemukan asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaedah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, 1999, Gramedia, Jakarta, hal. 69-81

konkret itu. Dari analisa itu, maka hukum kehutanan memiliki asas hukum yang paling menonjol antara lain; (a) asas manfaat; (b) asas kelestarian; (c) asas perusahaan; dan (d) asas perlindungan.²⁶

Konsep Kesejahteraan

Daya cipta suatu bangsa bukan saja suatu kemampuan serta kejadian individual, melainkan juga suatu proses sosial, yang ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial pula.²⁷ Hubungan manusia dengan lingkungannya ini benar-benar dihayati sebagai suatu potensi ataupun sumber kehidupan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk itu dalam memberdayakan lingkungan , manusia berusaha agar dapat menciptakan suatu keselarasan hubungan dengan lingkungan mereka.

Sebagai makhluk alamiah, manusia mempunyai kebutuhan tertentu.²⁸ Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari dua aspek, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani lebih ditekankan seperti makan, sandang, perumahan, air, udara, pendidikan, kesehatan dan istirahat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah rasa aman, ketentraman dan perlindungan, baik dalam interaksinya dengan lingkungan maupun penciptanya. Manusia merasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan terjadi pengulangan

²⁵ Lihat Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal.32-36.

²⁶ Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*, Bagian II, pasal 2

²⁷ Soedjatmoko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, 1983, LP3ES, Jakarta, hal.23

²⁸ Lihat Poespowardojo, Soerjanto dan Bertens, 1985, Sekitar Manusia: Bunga Rampai Tentang Filsafat Manusia, Gramedia, Jakarta, hal.5

berdasarkan pengalaman-pengalaman yang membawa kepuasan sehingga timbul kebiasaan-kebiasaan dalam cara memenuhi kebutuhan tersebut. Namun usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungan, budaya, kenyataan sejarah maupun gejala-gejala sosial yang muncul.²⁹ Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berkait erat dengan usaha pencapaian kesejahteraan mereka. Secara harafiah, arti kesejahteraan mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut.

Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa dan makmur, atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran).³⁰ Menurut undang-undan nomor 6 tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk berusaha mencari pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bari dirinya, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Dari pengertian tersebut maka secara sederhana, kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu kondisi

²⁹ Nurdin, M. Fadhil, 1990, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, Angkasa, Bandung, hal.23-27

kehidupan dimana keseimbangan lahir dan batin manusia dapat tercapai dalam kaitannya dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka.

Dari sudut ekonomi suatu masyarakat dikatakan makmur apabila anggotanya dapat mencukupi kebutuhannya akan benda-benda ekonomi. Tentu saja kebutuhan pada seseorang dan seorang yang lain adalah berbeda secara kuantitatif dan kualitatif, dan berbeda juga pada satu kelompok orang dan kelompok lain dalam suatu masyarakat, atau dalam satu masyarakat dan masyarakat lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan.³¹

Masyarakat sekitar hutan jati dalam menuju kehidupan yang sejahtera tidak terlepas dari sub sistem yang melingkupinya, seperti nampak dalam gambar 2.³² Sub sistem masyarakat (pertambahan penduduk, kesempatan kerja, dan pendapatan), sub sistem bidang pertanian (sistem persawahan, kepemilikan lahan

³⁰ Agro Twikromo, Didit Krisnadewara, dan Maryatmo, 1995, *Persepsi dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timor*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 19-21

³¹ Tom Gunadi, 1981, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung, hal. 9-12. Lihat pula Selo Soemardjan, dalam penelitian di desa daerah Jawa Barat, tentang apa yang dimaksud dengan kemakmuran dalam gagasan masyarakat, maka hampir semua orang menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah makmur apabila ia memiliki rumah yang layak untuk melindungi diri terhadap terik matahari dan hujan, dapat makan nasi dua kali setiap hari dan mempunyai pakaian cukup untuk dipakai selama bekerja dan buat hadir dalam *selamatan* atau pesta di desa (Selo Soemardjan, 1969, *Segi-segi Politik dari Program Pembangunan Indonesia*, Terate, Bandung). Sedangkan Franz Magnis Suseno, membagi lapisan-lapisan sosial-ekonomis orang Jawa menjadi tiga, *pertama wong cilik* (orang kecil) mereka adalah petani yang berpenghasilan rendah, *kedua, kaum priyayi*, mereka adalah kaum pegawai dan intelektual, *ketiga, ndara*, mereka yang berstatus sosial-ekonomi tinggi (Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan hidup Jawa*, Gramedia, Jakarta, hal.9-20)

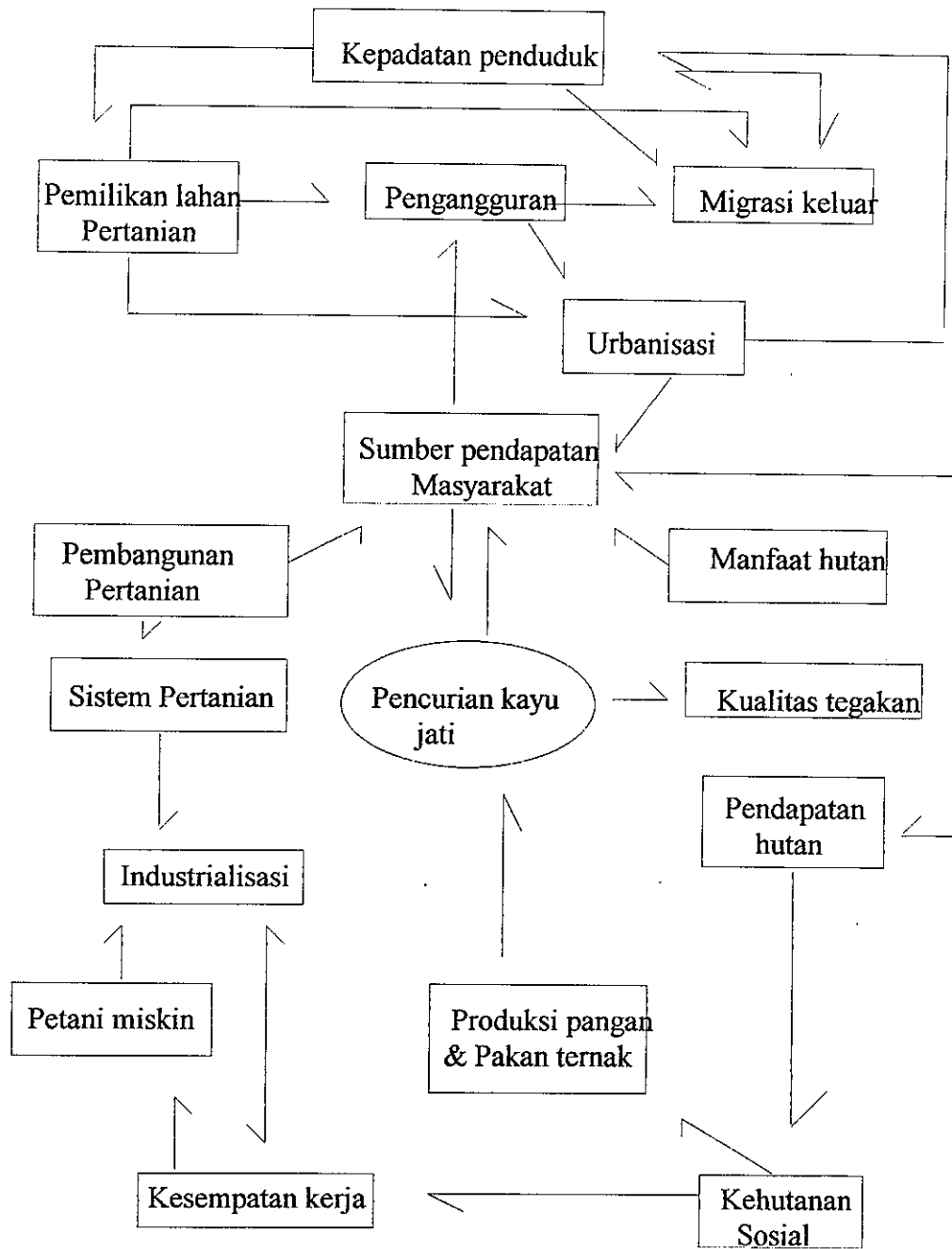
pertanian, dan pembangunan pertanian), dan sub sistem kehutanan (pengelolaan hutan, pendapatan perusahaan, pengembangan hutan).

Dalam laju pembangunan pertanian dan produksi pangan yang begitu cepat, ada kepentingan yang sangat mendesak untuk menjaga keseimbangan antara kerusakan tanah dan pemulihannya kembali, antara produksi biologis dengan konsumsi masyarakat, antara tanaman semusim dengan tanaman tahunan, antara produksi pangan dengan produksi kayu, dan antara lahan yang dieksploitasi dengan lahan yang dibiarkan liar³³. Hutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tersebut

³² Simon, Hasanu, 2000, Hutan jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya, Adipura, Yogyakarta, hal.76

³³ FAO, 1981, "*Forestry and Rural Development*", FAO Forestry paper 26, Rome, iii-35.

Gambar 2



Masyarakat dan alam merupakan lingkup kehidupan bagi orang Jawa. Melalui masyarakat ia berhubungan dengan alam. Irama-irama alamiah seperti siang dan malam, musim hujan dan musim kering menentukan kehidupannya sehari-hari. Dari lingkungan sosial ia belajar bahwa alam bisa mengancam, tetapi juga memberikan berkat dan ketenangan, bahwa seluruh eksistensinya tergantung dari alam. Kesatuan masyarakat dan alam adikodrati dilaksanakan orang Jawa dalam sikap hormat terhadap nenek moyang. Orang mengunjungi makam mereka untuk mohon berkah, untuk minta kejelasan sebelum suatu keputusan yang sulit. Kebanyakan setiap desa di Jawa memiliki *punden* (pohon besar) di mana pendiri desa (*cikal bakal*) dihormati.³⁴

Konsepsi hutan dan masyarakat desa sekitar hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat

³⁴ Franz Magnis Suseno, 1999, Op.Cit, hal. 82-89

bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya³⁵ , namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.³⁶

Menurut Degler bahwa hutan adalah: " *Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan, pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya rapat (horizontal dan vertikal)* " ³⁷

Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang dimaksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dalam pengertian tersebut di atas, hutan mempunyai 4 unsur yaitu:

1. Unsur kesatuan ekosistem (manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan)
2. Unsur pohon (kayu, bambu, dan palem)
3. Unsur hamparan lahan
4. Unsur lingkungan

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, jenis-jenis hutan terdiri dari : (1) hutan menurut statusnya dan (2) hutan menurut fungsinya. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, hutan negara ini dapat berupa hutan adat; (b) hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak

³⁵ Campbell Black, Henry, 1979, Op.Cit hal.584

³⁶ Salim, 1997, Op.Cit, hal.34

dibebani hak atas tanah. Sedangkan menurut fungsinya sesuai pasal 6 dan 7 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan dibagi atas (a) hutan konversi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; (b) hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; (c) hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yaitu benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Hutan konversi menurut pasal 7 undang-undang nomor 41 tahun 1999 masih dibagi menjadi (a) kawasan hutan suaka alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan; (b) kawasan hutan pelestarian alam, yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; (c) taman baru, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

³⁷ Degler, dalam Ngandung, IB, 1976, *Ketentuan Umum Pengantur ke Hutan dan*

Di masa lalu peranan hutan umumnya hanya dilihat dari aspek produksi dan perlindungan saja, karena lahan hutan masih tersedia melimpah. Namun sekarang telah menjadi jelas bahwa kehutanan dapat mendiversifikasi kegiatan ekonomi di daerah pedesaan, yang mempunyai arti sangat penting dalam menciptakan landasan pembangunan pedesaan. Untuk hampir semua negara sedang berkembang, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan hanya dapat dicapai melalui mobilisasi energi masyarakat dan sumber daya yang terdapat di daerah pedesaan. Pembangunan pedesaan tidak hanya harus dipertimbangkan dari sudut pandang produksi pangan dan pertanian saja, tetapi juga harus diarahkan untuk menimbulkan kemampuan masyarakat pedesaan agar mampu keluar dari kemiskinan yang dihadapi pada saat sekarang. Dalam konteks ini, kehutanan, khususnya pengelolaan hutan tanaman, dapat menyajikan alternatif pembangunan yang cukup banyak, yang apabila dikelola secara memadai akan memberikan banyak jalan pemecahan.³⁸

Hutan jati termasuk jenis hutan produksi, dan di Indonesia hutan jati merupakan jenis hutan tanaman yang pertama kali dibuat di Jawa. Hutan jati di Jawa merupakan hutan di Indonesia yang pertama kali dikelola berdasarkan asas kelestarian, yaitu suatu prinsip yang menjadi landasan pengelolaan hutan di seluruh dunia sampai sekarang. Hal itu disebabkan karena hutan jati menghasilkan kayu

Kehutanan di Indonesia, Pusat Latihan Kehutanan, Ujungpandang.

³⁸ Hasan Simon, 2000, Op.Cit hal.4-5

yang bernilai tinggi. Selama pemerintahan Belanda di Indonesia, hutan jati memainkan peranan yang sangat penting dalam ekonomi nasional.³⁹

Pada waktu sistem pengelolaan hutan jati baru mulai dirumuskan, kepadatan penduduk di Jawa masih rendah. Pada tahun 1950 diperkirakan jumlah penduduk Jawa dan Madura baru sekitar 15 juta, yang berarti kepadatan penduduk pada waktu itu adalah 115 orang/ km². Pada tahun 1895 jumlah penduduk meningkat menjadi sekitar 25 juta sehingga kepadatan menjadi 190/ km².⁴⁰ Dengan kepadatan penduduk seperti itu, masyarakat masih dapat memperoleh lahan garapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sistem bercocok tanam pada waktu itu juga belum intensif; penanaman padi di sawah pada umumnya hanya dikerjakan sekali dalam satu tahun, dan dilaksanakan terbatas pada daerah banjir subur.

Ketika berbicara tentang konsep hutan tidak bisa meninggalkan tentang konsep desa dan kebudayaannya, karena hutan sebagian besar ada di desa. Pengertian desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan pertanian. Egon E. Bergel⁴¹ mendefinisikan desa sebagai “setiap pemukiman para petani (peasants)”. Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang selalu harus terletak pada setiap desa. Ciri utama yang terletak pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal

³⁹ Warto, 2001, *Blandong, Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang abad ke-19*, Pustaka Caraka, Surakarta, hal. 15-21

⁴⁰ Manderson, Lenore, 1974, *Overpopulatin in java: Problems and Reactions*, Australian National University, Canberra

(menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil. Sedangkan Rahardjo memandang bahwa desa juga dilihat dari karakteristik yang dimilikinya adalah suatu komunitas.⁴²

Suatu definisi yang dikemukakan oleh Paul H Landis⁴³ bahwa desa dapat dibagi tiga sesuai tujuan analisa. *Pertama*, tujuan analisa *statistik*, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. *Kedua*, tujuan analisa *sosial-psikologik*, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesama warganya. *Ketiga*, tujuan analisa *ekonomik*, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Roucek & Warren⁴⁴ mencatat dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki sebagai berikut;

1. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku).

⁴¹ Bergel, Egon Ernest, 1955, *"Urban Sociology"*, McGraw-Hill Book Company, Inc, New York dalam Rahardjo, 1999, *Pengantar Sosiologi pedesaan dan pertanian*, Gajah Mada University, Yogyakarta hal. 29-31

⁴² Rahardjo, 1999, Op.Cit hal 28. Lihat juga Koentjaraningrat, 1997, *Masyarakat desa masa kini*, FE.UI, Jakarta, hal. 162 yang memandang desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Dalam definisi ini tidak ada penegasan bahwa komunitas desa berkaitan secara khusus pada pertanian.

⁴³ Landis, Paul H, 1948, *Rural life in Process*, McGraw-Hill Book Company, New York, hal 12-13.

⁴⁴ Apa yang dikemukakan Warrent tidak berarti bahwa ciri-ciri tersebut ada atau berlaku di setiap desa. Akan tetapi bisa saja salah satu atau beberapa ciri yang sudah tidak kelihatan, sebagai akibat dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Lihat Roucek J.S & Warren, 1962, *Sociology and Introduction*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, hal. 78 dalam Jefta Leibo, 1995, *Sosiologi Pedesaan Mencari suatu strategi pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 7-19

2. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dan juga sangat ditentukan oleh kelompok primer. Yakni dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peranan dalam pengambilan keputusan final.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya).
4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga ini lebih besar/ banyak.

Dalam pada itu Rogers ⁴⁵ mengemukakan hal serupa yaitu:

1. *Mutual Ditrust Interpersonal Releations*

Adalag adanya rasa ketidakpercayaan timbal balik antara petani satu dengan yang lain. Ini bisa terjadi karena sesama anggota komunitas dalam memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang sangat terbatas. Tanah senagai sumber produksi usaha tani yang terbatas, sementara pertumbuhan penduduk yang kian meningkat dan disertai pula dengan pekerjaan di bidang pertanian tidak mendatangkan keuntungan yang memadai.

2. *Perceived Limited Good*

⁴⁵ Rogers M, Everett, 1969, *Modernization Among Peasent*, Halt Rinnehard and Winston, New York, Chicago

Ini artinya, terdapat pandangan yang sempit di kalangan petani, sehingga hal-hal yang baik dan kesempatan untuk maju selalu terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan yang timbul dari berbagai etnik dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Salah satunya adalah ungkapan orang Jawa; *"lakukne wong urip, gumantung nasibe dewe-dewe"* (orang hidup itu, tergantung nasibnya sendiri-sendiri). Dengan ungkapan ini sebenarnya telah membentuk persepsi masyarakat yang "belum beruntung" dan banyak jumlahnya.⁴⁶

3. *Dependence On Hostility Towards Government Outhority*

Yang dimaksud adalah, adanya ketergantungan dan sekaligus curiga terhadap pemerintah atau pada unsur-unsur pemerintah. Pada masyarakat (petani), memiliki perbedaan status sehingga masing-masing bercirikan tugas tertentu yang mesti dilakukan, maupun hal untuk menerima penghormatan. Ini merupakan pembeda yang meligitimasi bahwa ada sekelompok individu yang mampu, lebih berkuasa dalam proses pengambil keputusan dan ada kelompok lain yang tidak.

4. *Familism*

Disini tercermin rasa kehidupan kekeluargaan, adanya keakraban diantara orang-orang yang memiliki pertalian kekerabatan. Karakteristik ini, tidak sulit dijumpai pada masyarakat desa. Akan tetapi longgarnya rasa kehidupan kekeluargaan bisa terjadi karena masyarakat semakin maju.

5. *Lack of Innouvatiness*

⁴⁶ Uraian lebih luas dan mendalam tentang hal ini lihat Franz Magnis Suseno, 1999, Op.Cit

Ini artinya ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Kondisi ini ada dalam masyarakat desa yang relatif belum berkembang atau belum maju. Belum berkembang dapat terjadi karena dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia dan mampu menghidupi mereka. Biasanya mereka baru akan menerima ide-ide baru, kalau daya dukung alam sudah mulai terasa kurang memenuhi kebutuhan mereka. Atau adanya perubahan sosial yang begitu cepat, terutama dalam bidang ekonomi, sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk belum bisa dikendalikan secara serius.

6. *Fatalism*

Menggambarkan betapa rendah wawasan pikiran masyarakat desa untuk menanggapi atau merencanakan masa depan mereka. Sikap semacam ini tercermin dari adanya pandangan seseorang bahwa keberhasilan yang dicapai bukanlah dari kerja keras dalam diri setiap orang, akan tetapi justru berada dari luar dirinya (kekuatan supernatural). Ini sangat erat kaitannya dengan tradisi sehingga bisa dilihat hubungan antara nilai budaya tradisional dengan derajat fasilitas dalam masyarakat.

7. *Limited Aspiration*

Adalah adanya aspirasi atau keinginan yang sangat rendah atau terbatas untuk menggapai masa depan. Aspirasi sosial, sesungguhnya semacam gagasan, keinginan ataupun cita-cita yang dimiliki oleh seseorang mengenai masa yang akan datang di dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Disamping itu

karakteristik masyarakat desa ialah *Lack of Deferred Gratification* , *Limited View of this World* dan *Low Emphaty* ialah rendahnya ketrampilan menangkap peranan orang lain karena pengetahuan yang terbatas.

Konsepsi Persepsi

Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan, kehendak, dan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam kehidupannya, manusia dengan menggunakan akal dan budaya mereka secara terus menerus selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungannya setelah melalui proses seleksi, organisasi dan interpretasi memberikan suatu penerimaan, tanggapan, pemahaman dan pandangan kepada manusia, sehingga manusia mendapatkan suatu gambaran ataupun pemikiran tentang suatu kehidupan yang baik, tentang hal-hal yang baik dilakukan ataupun tidak, gambaran tentang tujuan hidup, dan tata kelakuan manusia dalam masyarakat.⁴⁷

Sedangkan pengertian persepsi menurut Bimo Walgito,⁴⁸ adalah merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu. Dalam hal ini persepsi didahului oleh penginderaan yaitu suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Proses ini tidak berhenti hanya sampai

⁴⁷ Argo Twikromo, dkk, 1995, Op.Cit.

⁴⁸ Bimo Walgito, 1978, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi ,Yogyakarta,, hal53-55

disitu, tetapi stimulus diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

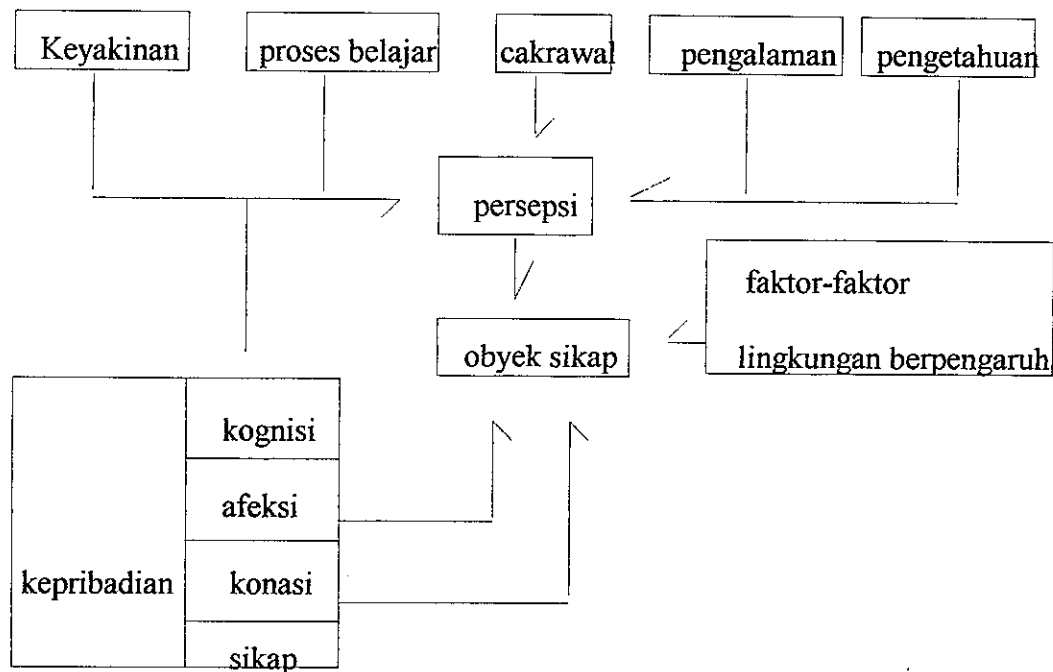
Dengan persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan.⁴⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dirinya sendiri sebagai obyek persepsi. Dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, kerangka acuan tidak sama, ada kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan yang lain tidak sama. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual. Lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila obyek persepsi adalah manusia. Obyek dan lingkungan yang melatar belakangi obyek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda.⁵⁰

⁴⁹ Lihat Davidoff, 1981, *Introduction to Psychology*, Cetakan II, McGraw Hill International Book Company, Tokio

⁵⁰ Bimo Walgito, 2000, *Op.Cit*, hal 55.

Menurut Mar'at⁵¹ dari persepsi itu kemudian dapat mempengaruhi individu untuk bersikap. Sedangkan sikap ini tidak dibawa sejak dilahirkan, tetapi dibentuk sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan. Hubungan antara obyek sikap, sikap dan persepsi dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2



D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat sekitar hutan jati di wilayah KPH Randublatung (Blora) sebagai lokasi penelitian tentang hutan dan pemahaman mereka mengenai pengelolaan hutan jati yang dilakukan PT.

⁵¹ Mar'at, 1981, Pemimpin dan Kepemimpinan, Fakultas Psikologi Unpad, Bandung. Hal. 23

Perhutani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penelitian mengenai persepsi tentang hutan dan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah penting, karena persepsi mengandung pemikiran, keinginan, kehendak dan cita-cita manusia dalam mencapai suatu keadaan yang dianggap sempurna.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana gambaran tentang konsepsi masyarakat setempat (masyarakat sekitar hutan jati di wilayah KPH Randublatung) dalam memandang hutan jati dan sistem pengelolaannya dalam upaya ikut meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sistem pengetahuan ini diproyeksikan atau diwujudkan dalam perilaku sehari-hari mereka dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup yang mereka inginkan. Dengan adanya gambaran tentang sistem pengetahuan setempat itu diharapkan dapat digunakan untuk membantu terciptanya titik temu konsepsi pengembangan dan pembangunan kehutanan khususnya pengelolaan hutan jati yang lestari dengan kehendak undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

E. Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khasanah perpustakaan. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para perencana pembangunan kehutanan khususnya Perhutani yang diberi tanggung

Perhutani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penelitian mengenai persepsi tentang hutan dan pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah penting, karena persepsi mengandung pemikiran, keinginan, kehendak dan cita-cita manusia dalam mencapai suatu keadaan yang dianggap sempurna.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana gambaran tentang konsepsi masyarakat setempat (masyarakat sekitar hutan jati di wilayah KPH Randublatung) dalam memandang hutan jati dan sistem pengelolaannya dalam upaya ikut meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sistem pengetahuan ini diproyeksikan atau diwujudkan dalam perilaku sehari-hari mereka dalam usaha mencapai kesejahteraan hidup yang mereka inginkan. Dengan adanya gambaran tentang sistem pengetahuan setempat itu diharapkan dapat digunakan untuk membantu terciptanya titik temu konsepsi pengembangan dan pembangunan kehutanan khususnya pengelolaan hutan jati yang lestari dengan kehendak undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

E. Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah khasanah perpustakaan. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para perencana pembangunan kehutanan khususnya Perhutani yang diberi tanggung jawab

mengelola hutan jati, sehingga titik temu antara masyarakat sekitar hutan jati dengan Perhutani dalam mengelola hutan dapat tercipta.

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Kualitas kebenaran yang diperoleh dalam ilmu pengetahuan terkait langsung dengan kualitas prosedur kerjanya. Sedangkan prosedur kerja mencari kebenaran biasa disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian mempunyai arti suatu studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang akan mengarahkan penelitian, dengan demikian maka metoda dimaksudkan sebagai suatu prinsip dasar dari berhasilnya penelitian. Dalam penelitian ini metoda yang dipilih adalah metoda penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Dalam setiap penelitian berpegang pada paradigma tertentu. Paradigma menurut George Ritzer,⁵² ialah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar. Paradigma ini akan mengarahkan penelitian. Dalam penelitian ini paradigma yang dipilih adalah paradigma definisi sosial.⁵³ Persoalan pokok paradigma definisi sosial ialah perilaku atau tingkahlaku. Paradigma definisi sosial memusatkan perhatian kepada tingkahlaku individu yang berlangsung dalam lingkup yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tingkahlaku berikutnya. Konsep seperti pemikiran, struktur sosial, dan pranata sosial

⁵² Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu pengetahuan berparadigma ganda*, Saduran; Alimandan, Rajawali Pers, hal.8

⁵³ lihat Ritzer, George, 1992, Op.Cit.hal44-74

Gabus. Dipilihnya KPH Randublatung sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan:

- a. KPH Randublatung merupakan hutan jati dengan wilayahnya yang luas yaitu 32.464,1 Ha dan antara hutan dengan tempat tinggal penduduk merupakan suatu kesatuan yang masih utuh.
- b. Ketika terjadi penjarahan hutan, KPH Randublatung merupakan wilayah hutan jati yang sangat parah kerusakannya, di sisi lain kehidupan masyarakat sekitar hutan jati Randublatung sangat rendah tingkat keadaan sosial ekonominya. Masyarakat sekitar hutan jati Randublatung sangat sedikit sentra industri yang bergerak dalam bidang kerajinan kayu sebagai hasil hutan jati. Ini sangat ironis bila dibandingkan dengan luas hutannya.
- c. Di wilayah KPH Randublatung telah dilakukan proyek pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sejauh mana proyek pemberdayaan masyarakat sekitar hutan untuk mengangkat kesejahteraan hidupnya belum berjalan sesuai harapan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini berbentuk pengetahuan, pandangan, sikap atau persepsi dan tindakan atau perilaku masyarakat sekitar hutan Jati terhadap hutan Jati dan sistem

pengelolaannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pilihan terhadap informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yang disesuaikan dengan derajat kepentingan dan kebutuhan akan informasi.⁵⁶

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang meliputi dokumen, buku, laporan penelitian dan lain-lain. Dalam hal ini diperoleh dari PT. Perhutani (Adm Randublatung), Kantor Kecamatan Randublatung, Jati, Kradenan dan Kantor Kepala desa sekitar KPH Randublatung, Biro Pusat Statistik Kabupaten Blora, Polres Blora, Polsek Randublatung, dan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan pelaksana lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data melalui observasi ini dilakukan dengan melakukan kegiatan pengamatan di kalangan penduduk sekitar hutan jati Randublatung dengan mempelajari mengenai kegiatan hidup sehari-hari, melihat apa yang terjadi, dan mendengar yang dikatakan masyarakat. Sehingga kegiatan ini adalah mencatat apa yang mereka katakan, pikirkan dan rasakan.

Dalam melakukan observasi ini tidak hanya mencatat suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sekitar hutan jati Randublatung, tetapi

⁵⁶ *Purposive Sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh informan. *Sampling* yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Lihat Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian*

juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang ada kaitannya dengan persepsi masyarakat sekitar hutan jati Randublatung tentang hutan dan pengelolaan hutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dasar observasi ialah pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian yaitu tentang persepsi masyarakat sekitar hutan jati Randublatung mengenai hutan dan sistem pengelolaannya . Maka untuk itu dibuat pertanyaan yang masih umum, menuju pada fokus penelitian dan akhirnya pengamatan yang dilakukan berikutnya akan lebih selektif. Setiap informasi dicatat dan selalu di cek kebenarannya agar hasil penelitian dapat dipercaya, dengan memperoleh informasi dari beberapa pihak (*proses triangulasi*).⁵⁷ Obyek pengamatan meliputi situasi tempat, pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas) masyarakat sekitar hutan jati Randublatung. Ketiga dimensi tersebut dapat diperluas yaitu, pengamatan tentang lokasi atau aspek fisik (meliputi lingkungan fisik daerah sekitar hutan, keadaan sosial, ekonomi dan budaya). Pengamatan terhadap aktor atau pelaku meliputi masyarakat sekitar hutan jati Randublatung, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan desa, pegawai Perhutani, dan Polisi penjaga hutan). Sedangkan aktivitas atau kegiatan masyarakat yang

Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta Hal. 98-99, dan lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , hal-36

⁵⁷ *Proses Triangulasi* dapat dicapai melalui (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang berada, dan orang pemerintahan; dan (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Lihat Michel Quinn Patton, 1987, *Qualitative Evaluation Methods*, Sage Publications, Beverly Hills, dalam Lexy J Moeleong, hal.178

diamati meliputi kegiatan sehari-hari dan proses sosial yang berlangsung seperti ketaatan pada hukum, penghargaan terhadap nilai-nilai dalam masyarakat, ketaatan beragama, hubungan masyarakat dengan lingkungan hutan, aktivitas ekonomi sehari-hari, mata pencaharian, dan kegotong-royongan.

Sebagai instrumen, peneliti melakukan wawancara sebagai bentuk komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan. Observasi yang dilakukan dilengkapi dengan wawancara. Sebab observasi saja tidak memadai dalam melakukan penelitian. Mengamati kegiatan dan perilaku masyarakat saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diamati atau dirasakan orang lain. Itu sebabnya observasi harus dilengkapi dengan wawancara.⁵⁸ Dengan melakukan wawancara dapat diperoleh tentang gambaran dunia pikiran, perasaan, dan pandangan informan. Wawancara dilakukan dengan cara tak-berstruktur, artinya bahwa informan mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya. Akan tetapi kemudian setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, maka wawancara akan dilakukan secara berstruktur sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh.

Disamping melalui observasi dan wawancara, pengumpulan data juga melalui dokumen, baik berupa catatan pribadi, maupun dokumen resmi. Catatan

⁵⁸ Beberapa petunjuk wawancara yang dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah; (a) menentukan tujuan wawancara; (b) menggunakan bahasa dan istilah yang dipahami oleh informan; (c) memahami budaya dan adat-istiadat setempat; (d) menguasai teknik bertanya yang efektif; (e) memahami latar belakang sosial-ekonomi informan; (f) merumuskan isi dan urutan pertanyaan; (g) merekam hasil wawancara; dan (h) mencatat hasil wawancara. Lihat Nasution, 1988, Op.Cit, hal.72.

pribadi berupa catatan peneliti yang diperoleh dari diskusi, seminar, catatan harian ketika bertugas pengamanan hutan jati di KPH Randublatung, dan catatan lain yang ada hubungannya dengan hutan jati dan sistem pengelolaannya. Sedangkan dokumen resmi diperoleh dari laporan berkala PT. Perhutani, data demografi desa sekitar hutan, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan jati, dan dokumen-dokumen lain baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah maupun dari Kepolisian dan Biro statistik.

5. Teknik Analisa Data dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumen segera dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Dari laporan lapangan tersebut kemudian segera dilakukan analisis. Analisis data dilakukan sejak awal, dan terus dilakukan sepanjang penelitian dilakukan. Langkah-langkah analisis dilakukan mulai dari (a) reduksi data; (b) "*display*" data, dan (c) mengambil kesimpulan dan verifikasi.⁵⁹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dalam bentuk laporan lapangan segera dilakukan analisis dengan terlebih dahulu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau

⁵⁹ Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti, bukan kebenaran. Hasil interpretasi juga bukan generalisasi dalam arti kuantitatif, karena gejala sosial terlampau banyak variabelnya dan

polanya. Laporan lapangan yang masih “mentah” itu disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengetahui persepsi masyarakat sekitar hutan Jati

Randublatung tentang hutan dan sistem pengelolaannya demi upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Data yang direduksi memberi gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan. Reduksi data dapat membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.

b. Display data

Membuat display data berarti membuat matrik dari data yang sudah terkumpul, sehingga dengan matrik itu, dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Matrik dibuat dengan mempertimbangkan unsur-unsur mengenai diskripsi situasi masyarakat sekitar hutan jati, dan kondisi hutan jati itu sendiri, mengenai penjelasan (mengapa) suatu peristiwa dalam masyarakat terjadi; urutan kejadian dan sebagainya.

c. Membuat Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah terdisplay dalam bentuk matrik tersebut kemudian dianalisis untuk mencari kesimpulan. Awalnya data dalam matrik dilihat

terlampau terikat oleh konteks di mana penelitian dilakukan sehingga sukar digeneralisasikan. Lebih

secara keseluruhan dengan memperhatikan hal-hal yang menonjol. Kemudian diselidiki lebih cermat untuk menguji kebenaran atau ditolak bila tidak didukung oleh data lain. Tiap kolom dalam matrik dilihat dalam hubungan secara keseluruhan. Demikian agar dicapai sejumlah kesimpulan yang perlu dicatat setelah dirumuskan dengan jelas. Setiap kesimpulan terus dicek kebenarannya berdasarkan data lain agar dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya (*proses triangulasi*). Kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian ini berlangsung.

G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan

Tulisan ini diawali dengan memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi awal gambaran keadaan dan sekaligus ketertarikan penulis serta penegasan pentingnya dilakukan studi, kemudian diangkat sebagai bahan penulisan tesis. Pengelolaan hutan jati dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal disekitar hutan jati sangat kompleks khususnya kalau dihubungkan dengan persepsi masyarakat sekitar hutan tentang hutan dan sistem pengelolaannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya. Permasalahan studi ini terfokus pada dua permasalahan sebagaimana diuraikan item permasalahan. Kerangka teoritik digunakan sebagai landasan teoritis dan menjelaskan kelemahan paradigma pembangunan dan pengelolaan hutan jati yang selama ini dilakukan, terutama terabaikannya persepsi masyarakat sekitar hutan,

jelas lihat, Nasution, 1988, Op.Cit, hal .126-129

dan ketidak-berdayaan daerah dalam pengelolaan hutan karena sifatnya yang masih sentralistik. Kerangka teoritik juga digunakan sebagai penghantar dalam merumuskan tujuan, kontribusi, pilihan lokasi, metode dan mengkaji temuan-temuan penelitian. Bab pendahuluan ini bersifat penghantar yang didasari oleh alasan metodologis dan sistematika sebuah karya tulis.

Bab II berisi tentang konsep pengelolaan hutan jati dari konsep kelestarian hutan, teori pengaturan hasil hutan, sejarah pengelolaan hutan sampai dengan problem pengakuan hak-hak formal masyarakat atas penguasaan dan pengelolaan hutan. Kemudian selanjutnya penting pula disajikan tentang persepsi masyarakat sekitar hutan jati tentang hutan, konsepsi tentang hidup sejahtera, dan penegakan hukum kehutanan. Hal ini perlu karena pembangunan kehutanan tanpa memperhatikan persepsi masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal disekitar hutan akan menemukan hambatan-hambatan dan tujuan pembangunan hutan itu sendiri akan gagal.

Deskripsi tentang masyarakat sekitar hutan jati Randublatung sebagai lokasi penelitian penting untuk disajikan sebagai bahan pengetahuan mengenai keadaan kondisi fisik daerah sekitar hutan, dan lingkungan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan jati. Hal ini dilakukan karena sebagai paradigma studi kualitatif, studi ini tidak dapat dilepaskan dari realitas yang ada dan hidup di lokasi dimana penelitian dilakukan (Bab III).

Implikasi kebijakan pemerintah dan persepsi masyarakat tentang pengelolaan hutan jati dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan tersaji dalam Bab IV sekaligus sebagai temuan studi yang dilakukan. Proses analisis dari temuan lapangan menghasilkan penjelasan bagaimana kebijaksanaan pemerintah diimplementasikan dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang telah dilaksanakan seperti perubahan strategi pengelolaan hutan jati dan pemberdayaan hutan jati bagi kesejahteraan masyarakat khususnya mereka yang bertempat tinggal disekitar hutan jati. Demikian juga temuan mengenai perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan jati, persepsi masyarakat sekitar hutan dan hubungannya dengan perilaku serta keterpautan antara nilai-nilai dalam masyarakat sekitar hutan jati dapat dilihat pada sub bab berikutnya. Dari sinilah kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Dari kesimpulan yang ada kemudian direkomendasikan dalam bentuk-bentuk rumusan saran-saran. Itu semua dapat dilihat dari Bab V yang merupakan Bab penutup dari sistematika penulisan tesis ini.

BAB II

PENGELOLAAN HUTAN JATI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HUTAN HUBUNGANNYA DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUP

A. Pengelolaan hutan

1. Hutan dan Kehutanan

Istilah hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar atau tidak diusahakan, apapun bentuk penutup lahannya.⁶⁰ Definisi yang sederhana seperti itu hanya dianggap gayut untuk mereka yang kurang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang hutan. Untuk ahli kehutanan dan para ilmuwan di bidang lingkungan, istilah hutan mempunyai pengertian yang jauh dan lebih kompleks. Secara umum, hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim dan kondisi ekologi yang spesifik.⁶¹

Hutan dapat diklasifikasikan menurut berbagai macam kriteria. Cara yang paling mudah dan dikenal luas oleh masyarakat adalah membedakan antara hutan alam dan hutan tanaman. Pembedaan ini juga mempunyai implikasi perbedaan bentuk pengelolaan kedua macam hutan tersebut. Hutan merupakan

⁶⁰ Baker, Frederick, S, 1950; *Principles of Silviculture*, McGraw-Hill, Book Company, New York, xii-414

sumberdaya alam. Hutan menyajikan berbagai macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti: kayu bakar, kayu pertukangan, pangan, pakan ternak, air, dan untuk masyarakat modern, juga satwa liar dan kesempatan rekreasi. Kayu pertukangan saja diperlukan untuk beberapa kepentingan seperti: bangunan rumah, mebel, kertas dan plastik.

Kehutanan atau pengelolaan hutan adalah aplikasi teknik pengusahaan dan prinsip-prinsip teknik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan.⁶² Kehutanan dapat didefinisikan secara lebih luas sebagai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia untuk kepentingan manusia, yang terdapat di dalam dan berasosiasi dengan kawasan hutan dan kawasan lain yang dikelola secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan serupa.⁶³

Kegiatan pemungutan kayu sebenarnya telah dilakukan oleh manusia di seluruh dunia sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum pengelolaan hutan sebagai suatu cabang ilmu mulai dikenal sekitar abad 17 di Eropa Tengah. Reformasi Hutan (Forest Reform) yang dikeluarkan oleh Raja LOUIS XIV di Perancis pada tahun 1676 umumnya dianggap sebagai cikal bakal lahirnya ilmu pengelolaan hutan modern.⁶⁴ Sepanjang abad-abad berikutnya, pengelolaan hutan lebih berkembang lagi di Jerman, Swis dan Austria. Dari negara-negara Eropa Tengah inilah kemudian ilmu pengelolaan hutan menyebar ke seluruh

⁶¹ Simon, Hasan, Op.Cit, hal 11

⁶² Davis, Kenneth P, 1966, Forest Management Regulation and Valuation, New York, xi:-519

⁶³ Maaren, A, van, 1985, Forest Policy and advanced course on MsC-level, Wageningen :5

dunia. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari hutan.⁶⁵ Namun demikian tujuan utama pengelolaan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum di wilayah hutan yang bersangkutan. Karena pengelolaan hutan merupakan perkembangan lebih lanjut dari pemungutan kayu dari hutan alam, maka kehutanan berarti mengelola hutan alam tersebut, yaitu memanen pohon yang sudah dianggap masak, diikuti dengan permudaan secara alam, dan kemudian melindungi serta memanen hasil yang baru.⁶⁶ Karena hutan merupakan sumberdaya alam, yaitu berkenaan dengan hutan alam yang mempunyai nilai untuk umat manusia, maka pengelolaan hutan harus diselaraskan dengan karakteristik hutannya itu sendiri.

2. Konsep Kelestarian hutan

Salah satu elemen yang paling penting dalam pengelolaan hutan adalah konsep kelestarian hasil hutan (*sustained yield forestry*). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh CARLWITZ pada tahun 1713,⁶⁷ tetapi baru dikembangkan secara sistematis sejak pertengahan kedua abad 18 di Eropa Tengah. Sejak pertama kali lahir sampai sekarang, definisi kelestarian hasil hutan telah mengalami perkembangan dan bervariasi dari negara yang satu ke negara lain.

⁶⁴ Robner, 1984, *Sustained Yield Forestry in Europe and its Crisis During the era of Nazi Dictatorship*, dalam siposium; 170-175

⁶⁵ Davis, Op.Cit, hal -3

Pada mulanya suatu hutan dianggap dimanfaatkan secara lestari bila tebangan tahunan atau periodik tidak mengurangi kapasitas hasil dan bila setelah penebangan dilakukan di seluruh kawasan hutan, potensi tegakan di lapangan tidak berkurang dibanding dengan sebelum dilakukan penebangan.

Sepanjang awal abad 19, di Jerman digunakan istilah “pendekatan hasil kayu yang lestari”. Ini berarti bahwa titik berat kelestarian hasil hutan adalah untuk memperoleh hasil kayu yang hampir sama dari tahun ke tahun. Namun demikian Hartig menulis suatu instruksi untuk pengaturan hutan pada tahun 1795 yang menerangkan bahwa untuk hutan negara, kayu yang boleh ditebang dari hutan tidak boleh melebihi ketentuan pengelolaan yang baik dengan hasil permanen. Hampir pada waktu yang sama, COTTA mendefinisikan kelestarian hasil hutan dengan ciri-ciri tercapainya hasil yang tertinggi, dengan biaya yang terendah, dan mencukupi kebutuhan masyarakat.⁶⁸

Selama separoh kedua abad 19, Pressler mengenalkan rumus keuangan yang meninggalkan konsep klasik kelestarian hutan tentang hasil tahunan yang setara. Akhirnya, berdasarkan evolusi kelestarian hasil yang berjalan secara

⁶⁶ Clawson, dan Sedjo, 1984, dalam simposium *History of sustained Yield Forestry*, 3-15

⁶⁷ Wiebecke dan Peters, 1984, dalam simposium *History of sustained Yield Forestry*, 176-182

⁶⁸ Schuler, 1984, lihat juga Speidel, dalam Wiebecke dan Peters, 1984. Dalam hal ini Speidel membedakan konsep kelestarian hasil hutan menjadi dua kelompok yaitu kelestarian statik dan kelestarian dinamik. Kelestarian statik adalah penerapan konsep kelestarian hasil mulai dari permulaan sampai pertengahan abad 20, sedang kelestarian dinamik adalah konsep kelestarian hasil yang dipakai setelah itu. Dalam kelestarian statik, konsep kelestarian hasil dihubungkan dengan pemanfaatan dan keuntungan dalam jenis, nilai, pertumbuhan, dan semua dampak pengusahaan hutan. Dalam kelestarian dinamik, konsep kelestarian lebih banyak dikaitkan dengan produksi kayu, penggunaan kayu, menjaga dan meningkatkan produktifitas tempat tumbuh, unit pengelolaan hutan, dan semua dampak pengusahaan hutan.

berangsur-angsur, Wiebecke dan Peters merumuskan definisi kelestarian hasil sebagai:

The endeavour to facilitate the continuous and optimal provision of all tangible and intangible effects of the forest for the benefit of human being of present and future generations.

Karena alasan-alasan tersebut, konsep kelestarian hasil hutan sekarang pada umumnya dianggap mempunyai hubungan dengan lingkup yang lebih luas, menurut aspek ekologi maupun sosial ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu pengertian tentang volume hasil tahunan yang stabil dan bersifat kaku sudah tidak lagi dipakai. Akan tetapi untuk negara-negara yang baru belajar menerapkan prinsip kelestarian hutan justru masalah yang sudah usang tersebut yang dipegang teguh untuk dijadikan tolak ukur utama.

3. Konsep hutan normal

Sisi lain tentang konsep kelestarian hasil dalam pengelolaan hutan adalah konsep hutan normal. Konsep ini berhubungan erat dengan teknik silvikultur dan sistem pengaturan hasil yang dipakai. Sepanjang abad 19, tebang habis dengan permudaan buatan merupakan teknik silvikultur yang paling populer untuk memperoleh tegakan yang paling baik dan menghasilkan keuntungan yang maksimal pada perusahaan hutan.⁶⁹ Hutan normal dapat dedefinisikan sebagai hutan yang dapat mencapai dan menjaga “derajat kesempurnaan” hutan untuk

memenuhi ketentuan sesuai dengan tujuan pengelolaan.⁷⁰ Secara ideal hutan normal merupakan tegakan dengan persebaran kelas umur yang merata dan riap yang maksimal. Tebangan tahunan atau periodik pada hakekatnya harus sama dengan riap untuk jangka waktu yang bersangkutan. Dengan demikian hasil kayu yang mnaksimal dapat diperoleh sepanjang waktu tanpa membahayakan hasil di masa yang akan datang, dan oleh karena itu kelestarian hasil hutan dapat dipertahankan.

Untuk mencapai hutan normal, diperlukan pemilihan yang tepat tentang sistem pengaturan hasil dan teknik silvikultur yang akan dipakai. Perlakuan silvikultur untuk memelihara tegakan harus direncanakan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang memadai, sehingga setiap tempat tumbuh atau kelompok hutan akan dalam keadaan penuh oleh jenis yang cocok dengan kondisi tempat tumbuh tersebut. Tegakan akan dijarangi secara periodik untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi tegakan tinggal, dan untuk mencapai riap yang maksimal sesuai dengan dimensi kayu atau umur yang diperlukan oleh tujuan pengelolaan tertentu. Dalam kenyataan, hutan normal yang ideal seperti itu sebenarnya tidak pernah dapat dicapai, walaupun dengan biaya yang mahal dan usaha yang maksimal sekalipun. Oleh karena itu, hutan normal sebagai alat untuk mencapai keuntungan yang optimal tidak lagi dipegang teguh secara kaku. Untuk menghindari ketidak-luwesan konsep hutan normal tersebut. Davis

⁶⁹ Simon Hasanu, Op.Cit hal.14

memperkenalkan istilah yang lebih fleksibel, yaitu hutan yang dalam keadaan tandon penuh (*full-stocked forest*).⁷¹ Suatu tabel hasil dapat dibuat untuk melukiskan perkembangan “volume standar” suatu tegakan yang dalam keadaan penuh, bukan “volume maksimal” sebagaimana endapat umum selama ini. Untuk sistem pengelolaan hutan yang lebih intensif, istilah yang dipakai adalah hutan yang tertata penuh (*full-regulated forest*). Dalam hal ini, hutan dengan tandon penuh diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu, khususnya pada akhir daur. Selama jangka waktu satu daur tersebut, hutan dapat dikelola dengan teratur untuk memperoleh manfaat hutan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keadaan setempat.

4. Teori pengaturan hasil hutan

Pengaturan hasil hutan diperlukan untuk menghitung volume kayu yang boleh ditebang setiap tahun, agar kelstarian hutan dan pengelolaannya dapat terjamin. Walaupun banyak sekali metoda pengaturan hasil yang bersifat spesifik, namun semuanya dapat digolongkan menjadi dua kelompok saja, yaitu: (a) metoda berdasarkan luas dan (b) metoda berdasarkan volume.⁷²

⁷⁰ Osmaton, 1968, *Management kehutanan*, London, hal-91

⁷¹ Davis, 1966, op cit. 519

⁷² Lihat Davis, 1966, Op. Cit hal-124. Dalam buku-buku kehutanan yang lebih tua, metoda pengaturan hasil pada umumnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: (a) berdasarkan luas, (b) berdasarkan volume, (c) berdasarkan volume dan riap, dan (d) berdasarkan jumlah pohon, Osmaton, Op.Cit, 1968, hal-54-55.

Pengaturan hasil berdasarkan luas dapat dibagi menjadi tiga, yaitu menurut sistem silvikultur, menurut rotasi dan persebaran kelas umur, dan menurut perlakuan pembinaannya. Dalam metoda berdasarkan luas menurut sistem silvikultur, pada dasarnya menentukan jumlah tebangan sangat sederhana. Metoda ini biasanya diterapkan untuk pengelolaan hutan yang sangat ekstensif atau hutan yang baru dikelola pada tahap awal. Dengan anggapan bahwa permudaan dapat terjadi dengan sendirinya, metoda ini dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas tegakan dan menimbulkan pemanfaatan hutan secara komersial. Secara umum metoda pengaturan hasil berdasarkan luas ini dapat diwakili oleh metoda *annual coupe* atau *vak-werk methode*.

Dalam metoda berdasarkan volume, besarnya tebangan tahunan didekati dengan menghitung volume aktual dan persebaran riap tegakan. Dalam hal ini volume tebangan tahunan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk rumus-rumus matematika. Telah banyak rumus yang diciptakan untuk maksud ini, dan pada umumnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: (a) berdasarkan volume saja, (b) berdasarkan riap saja, dan (c) berdasarkan volume dan riap. Disamping itu juga ada metoda pengaturan hasil yang tidak berkaitan langsung dengan luas maupun volume tegakan, yaitu pengaturan hasil berdasarkan jumlah pohon. Dalam rumus berdasarkan volume dikenal dengan rumus Von Mantel, volume tegakan diasumsikan bertambah secara merata dan mengikuti garis lurus sesuai dengan bertambahnya umur. Volume tegakan nyata di seluruh kawasan hutan dinyatakan

dalam bentuk segitiga siku-siku, dengan alas merupakan panjang daur dan tinggi merupakan volume tegakan pada akhir daur. Volume tebangannya tahunan sama dengan besarnya riap tahunan dari seluruh tegakan tersebut.

Karena kelstarian hasil dapat berarti tebangannya tahunan sama dengan riap tahunan, maka besarnya tebangannya tahunan dapat dihitung sama dengan riap tahunan pada saat sekarang (*current increment*). Pandangan ini merupakan landasan metoda pengaturan hasil berdasarkan riap saja. Masalahnya adalah, bagaimana riap pada saat sekarang tersebut ditaksir atau diukur.

Perhitungan riap sekarang atau riap tahunan yang cermat biasanya sulit dicapai dan memerlukan biaya mahal. Dalam kenyataan riap tahunan selalu berubah-ubah menurut waktu karena faktor iklim, serangga, penyakit, dan pengaruh manusia, yang semuanya tidak mudah diperkirakan. Itulah sebabnya mengapa riap saja jarang dipakai sebagai landasan yang praktis untuk menentukan tebangannya. Riap lebih merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan keadaan tegakan dan kurang dapat berfungsi secara praktis sebagai kriteria yang dipakai untuk teknik perhitungan.⁷³

Secara bersama-sama, tandon nyata (*actual growing stock*) dan riapnya sudah cukup untuk menentukan tebangannya berdasarkan volume. Inilah prinsip perhitungan tebangannya yang dilakukan dengan sistem pengaturan hasil hutan berdasarkan volume dan riap. Dalam metode ini, taksiran volume tebangannya

⁷³ Davis, 1966, Op Cit, hal-135

tahunan bergantung pada data volume dan riap yang dipergunakan, yang biasanya diperoleh dari inventore. Metode ini mudah diterapkan untuk berbagai kondisi hutan, termasuk dalam keadaan di mana tebangan tahunan tidak dapat memenuhi tujuan pengelolaan. Akan tetapi metoda pengaturan hasil hutan ini tidak berkaitan dengan luas areal hutan sehingga mengandung kelemahan dalam menyajikan suatu kriteria untuk menggambarkan perkembangan persebaran kelas umur yang mungkin diperlukan.

Pengaturan hasil hutan berdasarkan jumlah pohon biasanya dipakai untuk pengelolaan hutan yang masih bersifat ekstensif. Di sini biasanya yang dihadapi adalah hutan alam dengan berbagai jenis, umur dan nilai kayu. Seringkali hanya sebagian kecil saja dari jenis yang ada merupakan jenis perdagangan. Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon komersial yang telah mencapai diameter tertentu, misalnya 50 cm. Pohon-pohon yang lebih kecil tidak ditebang dan diharapkan akan menjadi penyusun tegakan untuk ditebang pada rotasi berikutnya. Oleh karena itu pohon-pohon yang lebih kecil tersebut harus diusahakan agar tidak mengalami kerusakan selama pelaksanaan penebangan.

5. Pengelolaan hutan jati

a. Persebaran dan sifat-sifat jati

Pertumbuhan hutan jati secara alam dapat dijumpai di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu India, Burma, Thailand, Laos, Cambodia dan

tahunan bergantung pada data volume dan riap yang dipergunakan, yang biasanya diperoleh dari inventore. Metode ini mudah diterapkan untuk berbagai kondisi hutan, termasuk dalam keadaan di mana tebangan tahunan tidak dapat memenuhi tujuan pengelolaan. Akan tetapi metoda pengaturan hasil hutan ini tidak berkaitan dengan luas areal hutan sehingga mengandung kelemahan dalam menyajikan suatu kriteria untuk menggambarkan perkembangan persebaran kelas umur yang mungkin diperlukan.

Pengaturan hasil hutan berdasarkan jumlah pohon biasanya dipakai untuk pengelolaan hutan yang masih bersifat ekstensif. Di sini biasanya yang dihadapi adalah hutan alam dengan berbagai jenis, umur dan nilai kayu. Seringkali hanya sebagian kecil saja dari jenis yang ada merupakan jenis perdagangan. Penebangan hanya dilakukan terhadap pohon komersial yang telah mencapai diameter tertentu, misalnya 50 cm. Pohon-pohon yang lebih kecil tidak ditebang dan diharapkan akan menjadi penyusun tegakan untuk ditebang pada rotasi berikutnya. Oleh karena itu pohon-pohon yang lebih kecil tersebut harus diusahakan agar tidak mengalami kerusakan selama pelaksanaan penebangan.

5. Pengelolaan hutan jati

a. Persebaran dan sifat-sifat jati

Pertumbuhan hutan jati secara alam dapat dijumpai di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu India, Burma, Thailand, Laos, Cambodia dan

Indonesia.⁷⁴ Pada abad 19 jati juga mulai ditanam di Amerika tropik seperti Trinidad dan Nicaragua. Belakangan ini jati juga ditanam di Nigeria dan beberapa negara Afrika tropik lainnya. Di Indonesia, keberadaan jenis jati terbatas pada daerah beriklim muson di Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta pulau Muna di Sulawesi Tenggara. Di daerah ini, secara alami jati tumbuh sampai ketinggian 600 m di atas permukaan laut.

Jati menghasilkan kayu yang sangat berharga dan dapat dipakai untuk memenuhi berbagai keperluan karena mempunyai kelas awet yang tinggi, dimensinya stabil, dekoratif, dan mudah dikerjakan. Oleh karena itu pulau Jawa, jati sangat disukai oleh masyarakat untuk bahan membuat rumah, mebel, alat-alat pertanian dan lain-lain. Keadaan fisik lingkungan hutan jati di Jawa juga sangat memungkinkan untuk melakukan pemungutan kayu berdasarkan prinsip-prinsip pengusahaan yang dapat memberi keuntungan, sebelum alat transportasi dan komunikasi modern dapat membantu menekan biaya operasional.

Dominasi jenis jati pada hutan alam di daerah-daerah tersebut dapat diterangkan dari sifat-sifat sivikultur yang berkaitan dengan kondisi iklim setempat. Di daerah beriklim muson terdapat perbedaan yang nyata antara musim hujan dan musim kemarau. Lamanya musim kemarau berkisar antara 4-6 bulan setiap tahun. Di daerah muson terdapat banyak jenis pohon menggugurkan daun selama beberapa minggu dalam musim kemarau. Timbunan seresah dari daun

⁷⁴ Ramdial, 1976, Hal-3.

yang gugur tersebut akan merupakan potensi bahan bakar yang besar pada musim kemarau sehingga kebakaran hutan terjadi secara rutin hampir setiap tahun.

Karena kebakaran hutan maka pohon-pohon akan mati, kecuali untuk jenis yang berkulit kayu tebal dan sudah cukup besar. Jati termasuk salah satu jenis yang tahan dan tidak mati waktu terjadi kebakaran hutan, kecuali yang masih terlalu muda, misalnya berumur kurang dari 5 tahun. Biji jati berkulit tebal sehingga malah diuntungkan oleh terjadinya kebakaran yang terjadi secara rutin itu, karena akan memudahkan proses berkecambah setelah musim hujan tiba. Oleh karena itu dengan adanya kebakaran yang berulang-ulang banyak jenis pohon yang mati sehingga secara berangsur-angsur berkurang jumlahnya. Di lain pihak pohon jati dapat bertahan dan regenerasi alaminya lebih terstimulasi sehingga menjadi semakin dominan.

Keberhasilan permudaan dengan sistem tumpangsari sejak akhir abad 19 yang lalu dapat memperluas kawasan hutan tanaman jati di Jawa. Pada akhir abad 19, luas hutan jati di Jawa seluruhnya diperkirakan sekitar 650.000 ha. Luas tersebut bertambah menjadi 785.000 ha pada tahun 1929.⁷⁵ Pada tahun 1999 luas hutan jati di Jawa Tengah seluruhnya sudah mencapai 552.510,48 ha terdiri dari hutan jati, pinus, Damar, Mahoni dan Sonokeling.⁷⁶ Luas dan persebaran hutan jati milik pemerintah pada saat ini dapat dilihat dalam tabel 1.

⁷⁵ Tim penyusun Sejarah kehutanan Indonesia I, 1987

Tabel 1

Luas hutan jati Jawa Tengah tahun 1999

No	KPH	Luas hutan jati/Ha
1	Balapulang	29.819,83
2.	Blora	15.105,00
3	Cepu	33.018,10
4	Gundih	21.084,30
5	Kebonharjo	15.270,20
6	Kedu selatan	4.488,12
7	Kendal	20.288,16
8	Mantingan	16.747,20
9	Pati	27.793,96
10	Pemalang	24.368,20
11	Purwodadi	19.659,53
12	Randublatung	32.464,10
13	Semarang	29.127,53
14	Telawa	18.715,70
	Jumlah	307.924,53

Suhu rata-rata tahunan yang optimum untuk pertumbuhan jati berkisar antara 22-27 derajat Celsius. Di daerah dengan ketinggian di atas 600 m dari permukaan laut, jati tidak dapat berkembang dengan baik karena dengan rata-rata suhu tahunan yang lebih rendah, daerah tersebut akan lebih didominasi oleh jenis-jenis yang tidak menggugurkan daun (non-decidious species), yang merupakan pesaing bagi jati, baik akar maupun tajuk. Di daerah dengan curah hujan yang

⁷⁶ Perum Perhutani 1987

tinggi dan tersebar merata sepanjang tahun, jati juga menderita karena hadirnya jenis-jenis pesaing tersebut.

Untuk berkecambah, biji jati memerlukan suhu optimum sekitar 30 derajat Celsius.⁷⁷ Itulah sebabnya maka dalam permudaan alam pertumbuhan jati kurang seragam karena suhu media tumbuh di bawah naungan pohon-pohon yang ada sangat bervariasi. Dengan sistem tumpangsari, biji jati ditanam pada bulan Oktober, yaitu sekitar dua minggu sebelum hujan pertama jatuh dan ditempatkan pada kedalaman 3-5 cm dari permukaan yang panas pada waktu belum terjadi hujan cukup untuk memecahkan kulit biji yang keras sehingga begitu hujan jatuh biji tersebut dapat berkecambah dengan baik. Setelah biji jati tumbuh, sistem tumpangsari juga menyediakan kondisi pertumbuhan yang baik untuk anakan jati karena pengerjaan tanah yang intensif menghilangkan kesempatan tumbuhnya tanaman lain sebagai pesaing. Oleh karena itu tumpangsari selama dua tahun sebenarnya sudah cukup, asalkan pertumbuhan biji jati yang ditanam tersebut dipertahankan selama jangka waktu dua tahun itu.

b. Sejarah singkat pengelolaan hutan jati di Jawa

1) Kebijakan Kehutanan Masa VOC

Semenjak pertengahan abad XVII sampai menjelang pemerintahan Daendels 1808, eksploitasi hutan jati di Jawa boleh dikatakan sebagai

⁷⁷ Gertner, 1956, *Country Report on Teak*, FAO, Rome

“eksploitasi tanpa rencana”.⁷⁸ Artinya eksploitasi hutan jati waktu itu belum dilakukan secara baik dengan memperhitungkan kerusakan hutan yang bakal terjadi. Hal itu terjadi karena VOC sebagai kongsi dagang semata-mata hanya memusatkan diri untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan. Maka dalam melakukan eksploitasi hutan jati tidak dipertimbangkan akan terjadinya kerusakan hutan, dan hutan dieksploitasi secara besar-besaran sebagai salah satu mata dagangan dunia yang penting waktu itu. Sejak jaman VOC inilah hutan jati di Jawa ditebang dalam skala yang lebih luas dan terutama dipergunakan untuk bahan pembuatan kapal dan keperluan lainnya. Pada waktu itu di Jawa sudah ada pusat-pusat industri kapal, yang tersebar di sepanjang pantai utara mulai dari Tegal, Jepara, Juwana, Rembang, Tuban, Gresik, dan Pasuruan. Perusahaan pembuatan kapal tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang Jawa saja, tetapi juga bangsa Cina dan akhirnya perusahaan-perusahaan milik bangsa Belanda.⁷⁹

Dalam upaya memperoleh barang-barang dagangan dari Jawa, termasuk kayu jati, VOC mewajibkan penduduk desa, melalui para bupati atau pemimpin-pemimpin pribumi lainnya untuk menyerahkan barang-barang hasil bumi membayar pajak barang. Barang-barang yang dituntut itu antara lain beras, lada, nila, katun, kopi, kayu jati dan lain-lain. Khusus mengenai kayu

⁷⁸ Lihat Nancy Peluso, *Rich Forest, Poor People, and Development Forest Access Control and Resistance in Java*, 1988, Cf, I, 1917, hal-386.

jati, oleh VOC dipergunakan untuk bahan pembuatan dan mereparasi kapal. Hampir setiap tahun, Kompeni mengirim tidak kurang dari 30 kapal dagang ke Hindia dengan berat 400-450 *last*, yang dipenuhi dengan berbagai barang dagangan.

Sebagai ilustrasi kiranya menarik untuk dikemukakan laporan Dirk van Hogendorp dari abad XVIII yang dikutip Raffles dalam bukunya *The History of Java*.

“...hutan di Jawa memiliki kayu jati yang cukup banyak untuk bahan membuat kapal-kapal yang bagus dalam waktu singkat, seperti kapal-kapal dagang yang sangat kita butuhkan. Di Jawa, rami juga tumbuh seperti di Bengal dan buruh tersedia sangat murah, sehingga memudahkan untuk membuat tali-tali dalam waktu singkat... Untuk membangun kapa-kapal di Jawa yang akan dikirim ke negeri induk, cukup mengirim ahli-ahli perkapalan ke Jawa. Sedangkan untuk tenaga biasa mudah diperoleh di Jawa dengan jumlah besar dan cukup dibayar murah, yaitu 5 *stuiver* sehari... Residen Rembang dan kadang-kadang juga Residen Jepara adalah contoh dari beberapa orang Eropa yang mengusahakan industri perkapalan. Demikian juga orang-orang Cina yang tahu memanfaatkan kesempatan, membangun sejumlah kapal-kapal besar di sepanjang pesisir yang beratnya antara 15-100 *last*. Mereka ini memperoleh kayu jati tanpa harus susah payah... Hal itu mudah dibayangkan bagaimana ketamakan dari para lintah darat dalam memanfaatkan hutan dan berusaha mengambil semuanya apa yang ada di hutan. Meskipun demikian, hutan di Jawa tumbuh sama cepatnya dengan penebangan, dan itu tidak akan habis-habisnya jika hutan dipelihara dan dirawat dengan baik....”⁸⁰

Selain digunakan untuk bahan membuat dan memperbaiki kapal, kayu jati yang diminta VOC juga digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan. Misalnya seperti yang dikatakan oleh van Soest dalam salah satu tulisannya:

“... mulai dari pesisir Karesidenan Tegal sampai pesisir ujung timur Jawa tertutup rapat oleh hutan jati yang sangat bagus dan tinggi nilainya.

⁷⁹ Raffles, (Pertama kali terbit 1817), *The History of Java*, Vol I, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, hal-184.

⁸⁰ Raffles, Op.Cit hal 184-185

Kompeni menuntut banyak sekali kayu jati, terutama untuk membuat berbagai bangunan miliknya, seperti gudang, benteng, kapal-kapal dagang, untuk membuat tanggul penahan gelombang laut (*zeeweringen*), dan lain-lain. Untuk itulah maka Kompeni mewajibkan semua bupati di pesisir utara Jawa menyerahkan sejumlah kayu yang telah ditetapkan besarnya, yaitu kayu balok/ glondongan, papan, sirap, dan sebagainya. Bahkan Bupati Lasem setiap tahun harus menyerahkan sejumlah tukang kayu dan tenaga pembuat kapal kepada Kompeni⁸¹

Tetapi yang dilakukan VOC sampai akhir abad XVIII terhadap hutan jati di Jawa hanya mengeksploitasi dan mengambil manfaat hutan tanpa memikirkan kondisi hutan di masa mendatang. Dalam melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran itu, hutan jati di Jawa dibagi-bagi menurut wilayah kabupaten dan setiap tahun para bupati wajib membayar pajak barang, sedangkan penduduk yang tinggal di sekitar hutan diwajibkan bekerja di hutan untuk menebang dan mengangkut kayu, dimana peralatan penebangan disediakan oleh Kompeni. Jadi dalam usaha memperlancar penebangan kayu di hutan, VOC menetapkan sejumlah desa yang khusus untuk bekerja menebang kayu di hutan. Desa-desa ini dibebaskan dari segala kewajiban membayar beban pajak. Pekerjaan menebang dan mengangkut kayu itu biasa disebut kerja Blandong dan penduduk yang berkecimpung dalam pekerjaan itu dinamakan orang Blandong.

Tuntutan kayu jati dan pajak barang lainnya yang ditetapkan VOC waktu itu cukup besar. Sebagai contoh misalnya pada tahun 1796, jumlah pajak barang dan penyerahan wajib yang harus dibayar oleh penduduk Jawa antara lain 5.524 *koyang*

⁸¹ Van Soest, *Geschiedenis van het Cultuur Stelsel*, I, hal-1-25 dalam Waro, 2001,

padi (satu *koyang* sekitar 27 *pikul* atau 1.729,32 Kg), 170 *koyang* kacang, 93 *pikul* nila, 9.300 balok kayu, minyak kelapa dan minyak tanah, lilin, lada, dan sebagainya. Beban penyerahan wajib sebesar itu dibagi-bagi di antara para bupati yang tinggal di sepanjang pesisir utara Jawa. Oleh karena itu dari penerimaan penyerahan wajib seperti kopi, lada, gula, dan barang-barang lainnya, pengeluaran VOC setiap tahun yang berjuta-juta *gulden* jumlahnya dapat ditutup dan bahkan mereka dapat menarik keuntungan besar. Tapi di sisi lain, tuntutan kayu jati yang jumlahnya semakin besar dan dalam melakukan penebangan VOC tidak ikut terlibat tapi hanya dibebankan kepada para bupati, maka akibatnya keadaan hutan cepat rusak. Lebih lanjut Van Soets mengatakan bahwa pajak kayu yang dituntut Kompeni itu makin lama makin menekan penduduk. Penebangan dan pengangkutan kayu terpaksa harus dilakukan makin ke daerah pedalaman karena hutan jati yang berada di wilayah pesisir utara makin menipis.⁸²

Dari keterangan di atas dapat diketahui bagaimana kondisi penguasaan dan eksploitasi hutan di Jawa sebelum abad XIX. Khususnya kayu jati, sebelum Belanda datang di Jawa, penguasaannya berada di bawah Sunan, dan penebangan kayu yang dilakukan terbatas untuk memenuhi kebutuhan keraton. Jadi kayu jati belum diusahakan untuk diperdagangkan atau untuk mengembangkan industri perkapalan dalam skala besar. Wilayah Randublatung sendiri masih dibawah kekuasaan Sunan Surakarta, hanya diwajibkan menyerahkan kayu jati yang tidak

Blandong, Kerja wajib eksploitasi hutan di Rembang Abad ke-19, Pustaka Cakra, Surakarta

banyak jumlahnya, sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan hutan belum nampak. Dibandingkan dengan luas hutan yang ada, kebutuhan kayu jati untuk keraton sangat sedikit. Demikian juga, meskipun dalam teorinya tanah dan termasuk hutan menjadi milik Raja (Sunan), namun dalam kenyataannya penduduk bebas mengambil dan memanfaatkan hutan. Pada waktu itu belum ada pegawai kerajaan yang khusus mengawasi hutan dari kerusakan akibat penebangan liar atau pencurian. Namun keadaan itu segera berubah setelah Kompeni datang, terutama setelah pantai utara Jawa yang penuh dengan hutan jati itu jatuh di bawah kekuasaan VOC, hutan mulai dieksploitasi secara besar-besaran. Penebangan komersial yang dilakukan VOC tidak lepas dari sifat VOC sendiri yang menekankan pada prinsip mencari untung yang sebesar-besarnya, sehingga masalah kerusakan hutan sebagai akibat dari eksploitasi yang mereka lakukan tidak pernah dipikirkan. Maka keadaan hutan di Jawa selama masa Kompeni VOC cepat menjadi rusak karena tidak dikelola secara baik.

2) Kebijakan kehutanan masa Daendels

Ketika VOC bangkrut dan bubar, daerah kekuasaannya diserahkan kepada pemerintah Belanda dan Jawa berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu pulalah hutan jati tidak lagi menjadi milik umum atau milik partikular tetapi dinyatakan sebagai milik negara (*staatsdomein*). Hal ini berlaku

⁸² Wardo, 2001, Op.Cit hal. .58-59

terutama di daerah pesisir pantai utara yang sebelumnya berada di bawah pengaruh VOC.

Titik balik pembaharuan pengelolaan hutan di Jawa terjadi pada saat Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa pada tahun 1808. Daendels, dengan segala ide pembaharuannya, segera melakukan perbaikan dalam mengelola hutan termasuk perhatiannya untuk memperbaiki nasib masyarakat sekitar hutan (baca; Blandong). Sejalan dengan gagasan pembaharuannya di bidang administrasi dan pemerintahan, Daendels segera menghapuskan pajak kayu dan penyerahan wajib lainnya yang dituntut dari para bupati pesisir oleh VOC. Sementara itu mengenai administrasi dan penguasaan hutan yang semula diserahkan kepada Residen, diambil alih oleh Inspektur Jenderal, yang dibantu oleh seorang sekretaris, bendahara, dan dua “ajung” (wakil). Inspektur Jenderal membawahi Administratur Kehutanan, yang terdiri dari seorang Presiden dengan empat anggota, seorang sekretaris, dua juru tulis, 12 pengawas hutan (*bosgangers*), dan komisariss yang bertugas khusus mengawasi tempat penimbunan kayu di pantai. Inspektur Kehutanan sendiri berkedudukan di Semarang. Setiap anggota administratur membawahi distrik hutan, termasuk juga membawahi *bosgangers* (pengawas hutan) dan orang Blandong. Di bawah *bosgangers* adalah para “demang Blandong”, yaitu pemimpin pribumi di tingkat distrik (*Demangschap*) yang tugasnya menjalankan perintah administratur kehutanan maupun perintah dari *bosgangers*. Para demanglah yang sebenarnya bertanggung jawab penuh untuk

memobilisasi tenaga Blandong di tingkat distrik, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para kepala desa dan *kebayan*.⁸³

Jadi sejak 1808 Daendels secara kongrit telah melakukan pembaharuan dalam mengelola hutan, yaitu dengan mendirikan Administrasi Kehutanan (Administratie der Bosschen), yaitu semacam Jawatan Kehutanan, dan merupakan lembaga yang baru sama sekali di Hindia Belanda. Maka sejak itulah masalah hutan, tanah, dan penduduk yang tinggal di sekitar hutan yang dahulu langsung di bawah perintah para residen-berada langsung di bawah pengawasan Direksi Kehutanan. Kehadiran lembaga itu menandai bahwa hutan menjadi monopoli negara dan sekaligus menghapuskan hak milik umum atas hutan, yang disertai berbagai macam peraturan yang membatasi penebangan kayu oleh masyarakat umum. Sebagai akibat adanya pembatasan itu, kegiatan perekonomian penduduk yang berhubungan dengan hutan menjadi merosot jumlahnya. Adanya peraturan yang mengatakan bahwa setiap penebangan kayu di hutan harus minta ijin kepada pemerintah, maka akibatnya terjadi penebangan dan perdagangan kayu secara gelap.

Sejak dibentuknya Jawatan Kehutanan berarti Daendels telah meletakkan dasar-dasar yang konstruktif dalam menangani masalah hutan di Jawa. Lahirnya lembaga baru itu sekaligus merupakan bukti adanya keterlibatan negara dalam menguasai dan mengelola hutan. Bentuk konkrit dari keterlibatan negara dalam

⁸³ Koleksi Baud No.39, ARA

menangani masalah hutan ialah dengan membentuk birokrasi kehutanan yang pegawainya diambil baik dari orang-orang Eropa maupun pribumi. Semenjak Daendels itu pula para pemimpin pribumi di tingkat lokal, misalnya demang Blandong, bertanggung jawab langsung kepada residen tanpa melalui para bupati. Demikian juga dalam mengerahkan tenaga Blandong, diatur melalui peraturan yang jelas agar hak dan kewajiban orang Blandong dapat terjamin, yakni agar nasib orang Blandong dapat diperbaiki dan kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi jumlahnya sehingga keuntungan Gubernemen juga dapat dijamin. Upaya perbaikan nasib orang Blandong itu meski tidak sepenuhnya dapat dijalankan, tertuang dalam Besluit 7 Mei 1809, yang isinya mengatur kerja Blandong dan pemberian upah yang berupa tanah sawah yang bebas dari beban pajak.⁸⁴ Hal lain yang juga penting dari pembaharuan manajemen kehutanan ialah mulai diperkenalkannya sistem tebang-tanam, yakni tanah bekas tebangan segera ditanami kembali dengan pohon yang baru.

3) Kebijakan kehutanan masa Raffles

Pemerintahan Daendels (1808-1811) tidak berlangsung lama, lalu digantikan oleh pemerintahan sementara Inggris (1811-1816), di bawah T.S. Raffles. Di bawah pemerintahan Inggris, pengelolaan hutan secara umum tidak banyak mengalami perubahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa Raffles telah merusak gagasan pembaharuan manajemen kehutanan yang telah dirintis Daendels.

⁸⁴ Koleksi Baud, op.cit

Misalnya, Jawatan Kehutanan yang didirikan Daendels, dirubah dan disederhanakan, serta fungsinya digantikan oleh *Superintendent* atau Pengawas Utama Hutan, yang tugasnya hanya terbatas mengawasi dan mengelola hutan di Karesidenan Rembang. Sedangkan pengelolaan hutan dan kerja Blandong daerah lainnya di luar Rembang kembali diserahkan kepada Residen. Eksploitasi hutan dengan menggunakan sistem Blandong masih dipertahankan oleh Raffles, yang merupakan perkecualian dari politik yang dicanangkannya mengenai buruh bebas waktu itu. Beberapa distrik di wilayah Kabupaten Rembang, Lasem, Tuban, dan beberapa distrik lagi di Blora termasuk Randublatung yang diperoleh melalui kontrak dengan Sunan, bersama-sama dijadikan sentra penebangan kayu dan ribuan penduduk yang tinggal di daerah itu diwajibkan untuk menjalankan kerja Blandong. Dalam menjalankan tugasnya, mereka dibayar uang tunai dengan harus membayar pajak secara penuh.⁸⁵ Dalam arsip *Boschwezen* disebutkan ;”Upah pekerjaan penebangan kayu di hutan tetap diperhitungkan dengan kewajiban membayar pajak. Para buruh bebas itu akan dibayar dengan uang tunai secara adil...”⁸⁶ Kebijakan ini jelas sangat berlainan dengan masa sebelumnya yang membebaskan orang Blandong membayar pajak, meskipun mereka tidak dibayar dengan uang tunai.

⁸⁵ Van Deventer, *Het Nederlandsch Gezag Over Java en Onder horighenden Sedert*, 1811, II, 1891 hal-clv.

⁸⁶ Lihat Boschwezen No.22 (Varia 589), ARNAS

Pada masa ini nasib orang Blandong sendiri tetap menyedihkan, karena makin ditekan oleh para bupati dan pemimpin-pemimpin pribumi lainnya. Pada waktu itu banyak orang partikulir Cina maupun Eropa kembali menyewa desa-desa di sekitar hutan (yang sebelumnya pernah dilarang pemerintahan Daendels), untuk dijadikan desa Blandong. Dengan demikian tenaga penduduk kembali dieksploitir oleh para pengusaha partikulir yang melakukan eksploitasi hutan. Ijin kontrak penebangan kayu oleh partikulir itu diatur dalam peraturan kehutanan tanggal 27 Juni 1814. Hanya saja kontrak itu tidak dilakukan secara individu atau langsung, kepada penduduk desa, tapi dilakukan melalui para kepala desa. Akibatnya kontrak semacam itu hanya menguntungkan para kontraktor, karena mereka mendapat tenaga yang murah dan mudah, dan sekaligus mendapat jaminan dari para kepala desa, tetapi sebaliknya makin menekan penduduk. Pemerintah sendiri akhirnya memberi sedikit kelonggaran kepada penduduk, yaitu melalui Besluit 21 Pebruari 1814. Penduduk diberi ijin menebang kayu di hutan, tetapi dengan persyaratan tertentu. Kayu yang boleh ditebang itu terletak sekurang-kurangnya 12 mil darai pantai dan hanya digunakan untuk membuat kapal atau perahu.

Meskipun pemerintah Inggris juga menetapkan bahwa “residen wajib mengawasi penebangan liar dan pengrusakan hutan”, namun karena jumlah tenaga pengawas kehutanan yang terbatas, maka kerusakan hutan tidak dapat dihindarkan. Lebih dari itu sebenarnya pemerintah Inggris sendiri dalam mengeksploitasi hutan hanya berpedoman pada prinsip mencari untung sebesar-besarnya dalam waktu

singkat, karena mereka tahu bahwa dalam waktu dekat Jawa akan segera dikembalikan kepada Pemerintah Belanda. Pemerintah Inggris juga tidak sepenuhnya terlibat dalam pengeksploitasian hutan, karena eksploitasi hutan kebanyakan dilakukan oleh kaum partikular.

4) Kebijakan Kehutanan periode 1839-1865

Semenjak Direksi Kehutanan dihapus pada 1827 maka manajemen kehutanan di Hindia Belanda kembali tidak menentu. Hutan yang semula dijadikan sumber utama pendapatan negara, sejak 1830 digeser peranannya oleh sumber penghasilan lainnya. Pada tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Ia segera mengintroduksi gagasannya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahan dalam waktu singkat. Keadaan ekonomi Belanda yang kacau telah mendorong untuk memperkenalkan Sistem Tanam Paksa yang dianggap paling tepat untuk mendapatkan sumber keuangan. Ketika pemerintah Hindia Belanda memusatkan perhatian pada pelaksanaan penanaman tanaman ekspor, penguasaan dan pengelolaan hutan diserahkan kepada Direksi Perkebunan dan Pendapatan Milik Negara (*Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten*). Direksi ini bersama-sama dengan Direksi Hasil-hasil Bumi dan Gudang Sipil (*Directie der Landsproducten en Civiele Magazijnen*) dan Direksi Sarana dan Milik Negara (*Directie der Middelen en Domein*) adalah merupakan bagian dari Direksi Umum

Keuangan. Jadi semenjak itu penguasaan dan pengawasan hutan serta kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu berada di bawah Direktorat Perkebunan. Dengan Besluit 29 Nopember 1836 (Staatsblad No.54) secara resmi Departemen Perkebunan diberi wewenang menangani masalah hutan, di samping harus menangani pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman ekspor.

Pelaksanaan Tanam Paksa yang dibarengi dengan meluasnya industri perkebunan tanaman ekspor selalu diikuti meningkatnya permintaan kayu yang digunakan terutama untuk membangun pabrik, gudang, rumah tempat tinggal pegawai (orang Eropa), maupun untuk mensuplai bahan bakar bagi proses produksi gula. Ada kesejajaran antara kerusakan hutan di suatu wilayah dengan tumbuhnya industri perkebunan. Semakin banyak pabrik didirikan maka semakin cepat pula kerusakan hutan disekitarnya. Di Demak, Grobogan dan juga Blora selama beberapa tahun saja telah berdiri banyak sekali gudang tembakau yang membutuhkan kayu tidak kurang dari 60.000 batang per tahun.⁸⁷ Kerusakan hutan juga diperparah dengan adanya manajemen pengelolaan hutan yang kurang baik, sehingga sering terjadi penebangan liar.

Penebangan kayu bakar untuk mensuplai kebutuhan kayu di pabrik semula dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal disekitar hutan melalui kerja wajib. Tetapi dengan adanya Resolusi Gubernur Jenderal 13 Agustus 1830, penebangan kayu oleh penduduk tersebut dihapuskan dan perusahaan harus

⁸⁷ Van Soest, Op.Cit, III, 1869

membayar tenaga penebang kayu itu. Mengenai pengaturan penebangan kayu oleh partikulier maupun oleh penduduk desa, diatur dalam Resolusi 29 Januari 1831 (*Staatsblad No. 8*) ditetapkan bahwa penebangan kayu oleh partikulier dilarang dan dalam Besluit 18 Mei 1838 (*Staatsblad No.19*) disebutkan bahwa penduduk diberi ijin menebang kayu dalam batas tertentu. Penebangan itu diperbolehkan sejauh kayu itu hanya digunakan untuk membuat perahu di sungai dan gerobak pengangkut barang (*Staatsblad No.5, 1842*). Sedangkan dalam Besluit 21 Agustus 1850 (*Staatsblad No.43*) ditegaskan lagi mengenai penebangan kayu untuk umum, tetapi hanya terbatas kayu yang kurang berharga saja. Kemudian dalam *Staatsblad 1851* ditegaskan lagi bahwa penduduk desa diberi ijin menebang kayu jati ukuran kecil dan hanya untuk keperluan sendiri, sedangkan kayu yang besar boleh diambil jika telah mati atau rusak di hutan. Selanjutnya melalui Ordonansi 2 April 1864 (*Staatsblad No.64*) yang dilengkapi dengan Ordonansi 28 Desember 1874 (*Staatsblad No. 291*), pemerintah mengeluarkan peraturan hukuman terhadap pelaku pencurian kayu. Meski demikian beberapa tempat penebangan kayu hutan secara sembunyi-sembunyi masih berlangsung terus terutama untuk membuka areal tegalan yang baru.⁸⁸

Sementara itu, untuk memenuhi kayu-kayu kecil, sirap, maupun kayu bengkok, Gubernemen membeli dari penduduk di luar Blandong, yang mengumpulkan kayu itu di hutan. Kayu itu dibeli sesuai dengan tarif sebagaimana

⁸⁸ Cordes, *De Djati-boschen op Java*, 1881, dalam Warto, Op.Cit, hal. 81-91

diatur dalam Resolusi 6 Juli 1820 No.10 dan Resolusi 31 Agustus 1835 No.19. Pengumpulan kayu oleh penduduk desa di luar Blandong itu terus digiatkan karena pemerintah sangat membutuhkannya. Misalnya diperlukan ribuan sirap untuk membangun gudang garam di Paradessi maupun untuk dikirim ke daerah-daerah lain di luar Jawa. Namun ternyata pengumpulan kayu sirap atau kayu lainnya di luar Blandong itu mengancam kerusakan hutan, karena banyak penduduk melakukan penebangan liar untuk membuat sirap.

Pada tahun 1841 penebangan cara persil yang dihentikan dijalankan lagi. Melalui Besluit 10 Maret 1841 No. 1 pemerintah melakukan perbaikan manajemen kehutanan, yaitu menjalankan kembali cara persil, termasuk memberlakukan kembali sistem upah harian bagi tenaga Blandong. Demikian juga jumlah pengawas kehutanan akan ditingkatkan, sedangkan untuk mengurangi tenaga hewan maka dalam pengangkutan kayu akan digunakan alat gerobak (*rolwagen*). Dalam beberapa segi cara persil lebih menguntungkan tetapi cara pembayaran buruh dengan upah harian tersebut banyak merugikan penduduk sekitar hutan.

Pada tahun 1864 pemerintah Hindia Belanda memutuskan menghapus sistem eksploitasi hutan yang dijalankan pemerintah dan akan diserahkan kepada partikulier. Melalui Ordonansi 10 September 1865 (*staatsblad No.96*) Gubernur Jenderal Sloet Van De Beele mengumumkan mengenai peraturan baru mengenai penguasaan hutan di Jawa dan Madura, dan rencana penghapusan sistem Blandong. Kemudian dalam *staatsblad* 1865 No.97 diatur mengenai penguasaan dan

eksploitasi hutan, yang membagi hutan negara menjadi tiga katagori, (1) hutan jati yang penguasaannya diatur undang-undang, (2) hutan jati yang belum diatur dalam undang-undang, (3) dan hutan rimba (*wildhout*). Maka sejak sistem Blandong dihapus dan pemerintah pada 1870 mengeluarkan Undang-undang Agraria yang memberi kesempatan bagi masuknya modal perkebunan Eropa, maka eksploitasi hutan sepenuhnya diserahkan kepada partikulir.

5) Kebijakan kehutanan periode 1901-1927

Berdasarkan konsep Bagian Hutan yang diusulkan Balai Planologi yaitu suatu unit pengelolaan hutan yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Unit pengelolaan itu diusulan oleh Bruinsma, seorang Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan, yang dinamakan sistem *Houtvesterij*. Suatu rencana pengelolaan hutan berdasarkan kelestarian di dalam setiap *Houtvesterij* harus disusun secara periodik, dan semua egiatan kehutanan harus dilaksanakan oleh pegawai pemerintah. Usulan Bruinsma ini diterima pada tahun 1890 dan *Houtversterij* yang pertama diselesaikan adalah Kradenan Utara tahun 1898, diikuti oleh Wirosari pada tahun 1901, Tuder tahun 1902 Balo tahun 1903, dan Margasari tahun 1904.⁸⁹

Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan di dalam suatu *Houtvesterij*, banyak pengalaman dan informasi yang dapat dikumpulkan dari lapangan, yang kemudian sangat bermanfaat untuk menyempurnakan sistem

⁸⁹ Soepardi, R, 1974, *Hutan dan Kehutanan Dalam Tiga Jaman, I*, Perum Perhutani Jakarta

daerah jati yang tidak produktif. Randublatung termasuk Inspektorat III dengan luas hutan jati saat itu 31.326 ha.

Karena kepentingan ekonomi pemerintah, pada tahun 1963 pengelolaan hutan di Jawa Tengah dan Jawa Timur diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut Perusahaan Negara (PN) Perhutani, kemudian pada tahun 1972 berubah menjadi Perum (Perum) Perhutani. Di bawah Perhutani, luas unit pengelolaan hutan tidak berubah, hanya di beberapa tempat ada penyesuaian batas. Pada waktu hutan di kedua propinsi tersebut dikelola oleh Dinas (Jawatan) Kehutanan, batas daerah hutan tentu saja mengikuti batas administrasi pemerintahan. Setelah dikelola oleh Perhutani, batas Daerah hutan, yang kemudian nama ini diubah menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), disesuaikan menurut pertimbangan efisien.

Pada saat era PN Perhutani, kebijakan pengelolaan hutan ada di tangan Direksi yang dibentuk untuk masing-masing propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Koordinasi pengelolaan dilakukan oleh Badan Pimpinan Umum (BPU) Perhutani yang berkedudukan di Jakarta. Setelah menjadi Perum Perhutani, kebijakan pengelolaan tersebut disatukan untuk seluruh hutan jati, yaitu di tangan Direksi yang berkedudukan di Jakarta, sedang pengelolaan tingkat propinsi menjadi unit pengelola daerah.

Saat reformasi bergulir dan era otonomi daerah, karena tuntutan masyarakat bahwa pengelolaan hutan perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar

hutan, kebijakan pengelolaan hutan jati beralih dari Perum menjadi PT (Persero) Perhutani (2001). Kemudian pada tahun 2002 pengelolaan hutan jati beralih lagi ke Perum Perhutani.

B. Masyarakat sekitar hutan dan kesejahteraan hidup

Sebagai suatu sistem, kehutanan berhadapan dengan seperangkat masalah yang berkaitan dengan manusia, obyek, ide, peristiwa-peristiwa, dan persepsi. Manusia selalu merupakan subyek yang berdiri di garis depan dalam semua kegiatan pengelolaan.⁹⁰ Peranan manusia dalam pengelolaan sumberdaya hutan lebih nyata lagi untuk masyarakat agraris karena kehidupan mereka lebih banyak tergantung pada ketersediaan lahan garapan. Oleh karena itu, rencana pembangunan hutan di daerah seperti itu harus memperhitungkan kepentingan masyarakat setempat tentang aspek-aspek pemanfaatan hutan. Beberapa aspek ekonomi masyarakat desa sekitar hutan yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan hutan adalah masalah tata guna lahan, kesempatan kerja, serta pendapatannya dan distribusinya.

Sepanjang sejarah pengelolaan hutan jati di Jawa, banyak pengalaman dan masalah yang harus dihadapi yang berakar dari perubahan keadaan sosial masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Oleh karena itu memahami dinamika perubahan keadaan sosial tersebut sangat penting artinya dalam rangka mencari landasan bagi pemecahan masalah yang dihadapi dalam

⁹⁰ Dueer, 1979, *Management sumber daya hutan*, Philadelphia, hal 33

pengelolaan hutan. Semua masalah sosial ekonomi yang ada selalu berasal dari masalah kependudukan, baik menyangkut perkembangan penduduk, pertumbuhan, ketaatan pada hukum (pencurian kayu), dan persepsi masyarakat sekitar hutan tentang hutan dan kesejahteraan. Oleh karena itu masalah yang dipandang penting adalah tentang persepsi masyarakat sekitar hutan tentang hutan dan pengelolaannya dan juga tentang kesejahteraan hidupnya. Karena masalah persepsi belum banyak menjadi landasan dan pertimbangan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan.

1. Persepsi masyarakat tentang hutan

Terbentuknya suatu persepsi tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam proses fisik, fisiologi dan psikologi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pengalaman masa lalu memberikan dasar pada pemahaman, penerimaan, pandangan atau tanggapan manusia terhadap alam sekitarnya dan tujuan hidup manusia. Dengan demikian akan terbangun suatu pemikiran, keinginan, kehendak dan cita-cita dalam alam pikiran manusia pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang kehidupan di alam kodrati ataupun kehidupan di alam adikodrati. Hal tersebut akan diwujudkan dan tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Persepsi tentang hutan dan pengelolaannya dan kesejahteraan hidup terbangun melalui pengalaman dan berbagai macam proses dalam usaha menjalin hubungan dengan lingkungan mereka. Terbangunnya persepsi tersebut mendorong

manusia dalam usaha mendekati atau mencapai suatu kondisi kehidupan sesuai dengan gambaran hidup sejahtera yang ada dalam konsepsi mereka.

Pada prinsipnya hidup sejahtera adalah suatu kondisi di mana keseimbangan lahir dan batin manusia dapat tercipta dalam kaitannya dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Terciptanya suatu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani tersebut sangat relatif, karena manusia selaku individu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas lagi. Dengan kata lain manusia selaku individu berada dalam suatu sistem yang ada di lingkungan sekitarnya.

Masyarakat sekitar hutan Randublatung, pada dasarnya merupakan masyarakat pedesaan Jawa pada umumnya dengan ciri budayanya religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik⁹¹ dan tipe masyarakatnya yang pertanian tradisional (tadah hujan).⁹²

a. Pengertian persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh

⁹¹ Sujanto, 1991, *Refleksi budaya Jawa dalam pemerintahan dan pembangunan*, Dahare Prize, Semarang, hal-103

⁹² Jefta Leibo, 1995, *Op.Cit*, hal-18-19

syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.⁹³

Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisir, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.⁹⁴ Di samping itu menurut Moskowitz dan Orgel persepsi itu merupakan proses yang integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.⁹⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrated, maka

⁹³ Branca, 1964, *Woodworth dan Marquis*, 1957 dalam Bimo Walgito, 1978, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi, Yogyakarta hal. 53

seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.

Dengan persepsi individu dapat menyadari, dan juga dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya, dan juga tentang keadaan diri individu yang bersangkutan.⁹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam persepsi stimulus dapat datang dari luar diri individu, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun stimulsnya sama, tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak sama, dan kerangka acuan tidak sama, kemungkinan hasil persepsi antara individu satu dengan yang lain akan berbeda. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi itu memang bersifat individual.⁹⁷ Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan jati KPH Randublatung ketika melakukan persepsi dimasukkan ke dalam jenis persepsi bukan sosial (*non-social*

⁹⁴ Davidoff, 1981 *Introduction to Psychology*, Edition II, McGraw Hill International Book Company, Tokyo

⁹⁵ Moskowitz and Orgel, 1969, dalam Bimo Walgito, Op.Cit, hal 54

perception), karena mereka melakukan persepsi pada benda yang berwujud hutan dan pengelolaannya dan tentang kesejahteraan hidupnya. Sedangkan apabila obyek persepsi berujud manusia atau orang disebut persepsi sosial (*social perception*).⁹⁸

b. Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi

Telah dipaparkan bahwa apa yang ada dalam diri individu akan mempengaruhi dalam melakukan persepsi (faktor internal). Di samping itu masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi, yaitu faktor stimulus itu sendiri dan faktor lingkungan dimana persepsi itu berlangsung, dan ini merupakan faktor eksternal. Antara faktor internal dan eksternal saling berinteraksi dalam melakukan persepsi.

Agar stimulus dapat dipersepsi, maka stimulus harus cukup kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus, yaitu kekuatan stimulus yang minimal tetapi sudah dapat menimbulkan kesadaran, sudah dapat dipersepsi oleh individu. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi. Stimulus yang kurang jelas, stimulus yang mempunyai arti ganda, dan ini akan berpengaruh dalam ketepatan persepsi. Bila stimulus itu berujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih

⁹⁶ Davidoff, 1981, Op.Cit.

⁹⁷ Davidoff, 1981, Op.Cit

terletak pada individu yang mengadakan persepsi, karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.

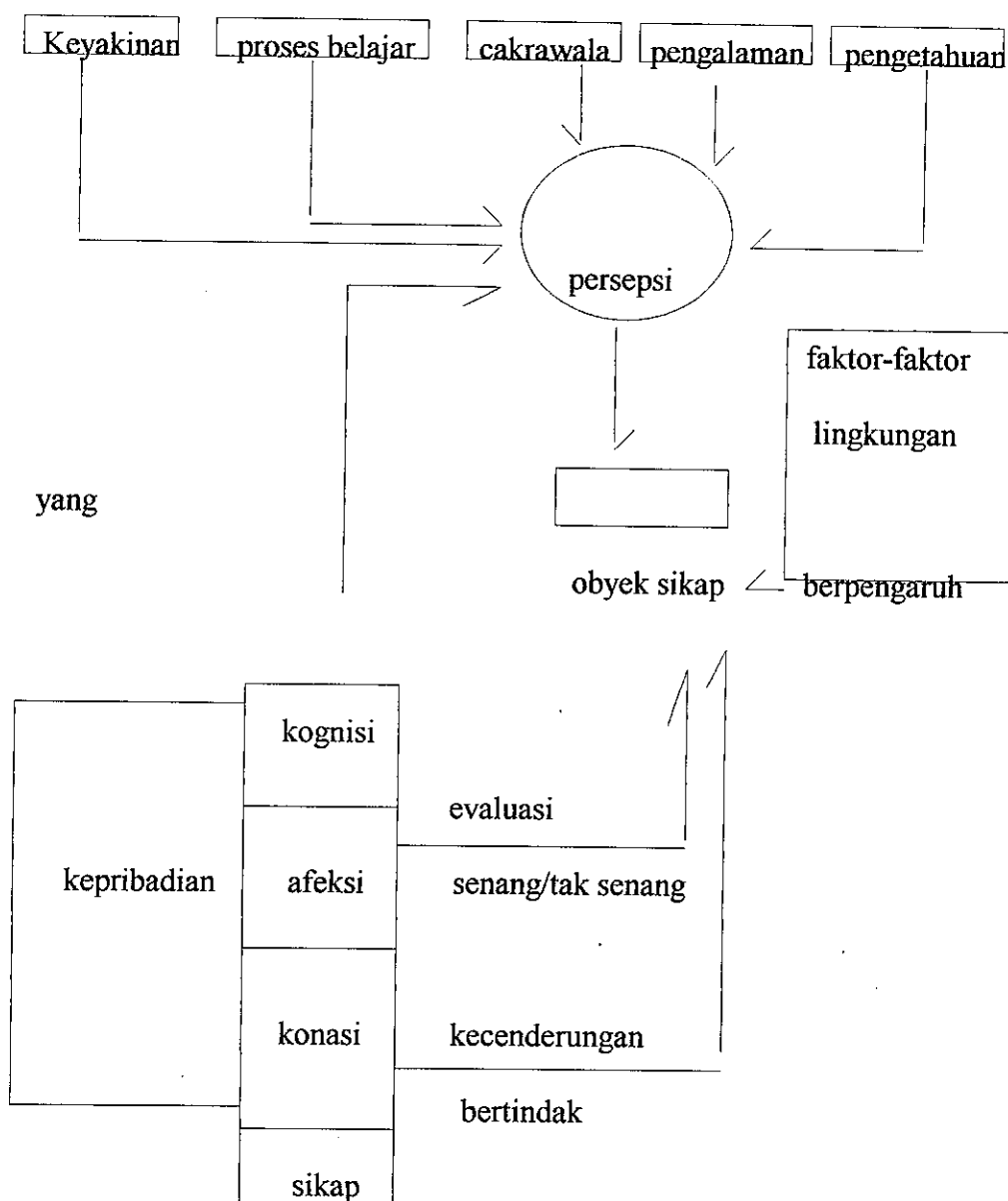
Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi datang dari dua sumber, yaitu yang berhubungan dengan segi kejasmanian, dan segi psikologi. Bila sistem fisiologinya terganggu, hal tersebut akan berpengaruh dalam persepsi seseorang. Sedangkan segi psikologis seperti telah dipaparkan di depan, yaitu antara lain mengenai pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuan, motivasi akan berpengaruh dalam melakukan persepsi.

Sedangkan lingkungan atau situasi khususnya yang melatar belakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih obyek persepsi adalah manusia. Obyek dan lingkungan yang melatar belakangi obyek merupakan kebulatan atau kesatuan yang sulit dipisahkan. Obyek yang sama dengan situasi yang berbeda, dapat menghasilkan persepsi yang berbeda. Akhirnya dari persepsi itu akan terbentuk sikap, sedangkan hubungan persepsi dan sikap dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.⁹⁹

⁹⁸ Hedider, 1958, *The Psychology of Interpersonal Relations*, John Wiley & Sons, Inc, New York dalam Bimo Walgito, 1990, Op. Cit. Hal.55-57

⁹⁹ Mar'at, 1981, *Pimpin dan Kepemimpinan*, Fak. Psikologi Unpad, Bandung, hal.23

TABEL 5



Bagan persepsi (dikutip dari Mar'at, 1982, Hal.23 dengan perubahan)

c. Hutan jati sebagai hak komunal dan hak negara

Sebagai salah satu sumber daya alam, hutan mempunyai makna ekonomis yang sangat penting bagi penduduk Randublatung. Maka dalam memanfaatkan hutan, mereka tidak mengenal adanya kepemilikan individu atas hutan dan tanahnya, dan karenanya segala macam yang dapat dimanfaatkan dari hutan menjadi milik bersama seluruh anggota komunitasnya. Konsepsi penduduk Randublatung terhadap hutan secara tipikal dapat diketahui dari pandangan “orang samin” terhadap hutan. Pengertian orang samin mengenai hutan secara singkat dapat dirumuskan demikian; “hutan adalah warisan nenek moyang dan anak cucu berhak atas pemakaiannya: *lemah podo duwe, banyu podo duwe, kayu podo duwe*, artinya tanah, air, dan kayu menjadi milik orang banyak”.¹⁰⁰

Konsepsi terhadap hutan seperti itu tentu bukan tipikal pandangan orang Samin, tapi hampir semua masyarakat tradisional yang belum mengenal batas-batas kepemilikan individu, terutama pada waktu penduduk masih mengembangkan pola peladangan atau pertanian ladang (perladangan yang selalu berpindah-pindah). Sistem perladangan itu atau juga disebut “sistem menebang membakar”, biasanya ditandai oleh dua hal, yaitu pembukaan hutan dan penggunaan api dalam mempersiapkan lahan yang akan ditanami. Pola pertanian seperti itulah yang seringkali dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam

¹⁰⁰ Paulus Widyanto, 1983, *Samin Surontiko dan Konteksnya*, Prisma, Jakarta

kenyataannya, pola perladangan sebenarnya mempunyai logikanya sendiri dalam memanfaatkan hutan. Secara ekonomis penduduk baru mengenal ekonomi subsistensi sehingga pembukaan lahan baru di hutan hanya sebatas untuk memproduksi pangan yang dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Seperti yang terlihat dalam pola perladangan suku Kantu di Kalimantan, setiap petani peladang yang melakukan pembukaan hutan untuk perladangan bertanggung jawab memelihara hutan sekunder yang tumbuh di atas lahan itu.¹⁰¹

Demikian juga lahan yang mereka tinggalkan itu dalam jangka waktu tertentu akan kembali mereka tanami dengan cara membakar kayu-kayu yang tumbuh di atasnya. Pembakaran kayu ini berkaitan erat dengan pola pertanian ladang yang membutuhkan abu di atas tanah yang hendak ditanami. Tetapi ketika penebang komersial mulai masuk ke daerah suku Kantu, terjadi persaingan antara petani peladang dengan penebang komersial, dan akibatnya terjadi eksploitasi hutan secara besar-besaran, yang mengakibatkan kerusakan hutan dan sekaligus menggeser keberadaan petani peladang. Kelompok terakhir ini akhirnya kehilangan sumber ekonomi karena adanya larangan terhadap praktek sistem pertanian tebang-bakar yang dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan. Dalam konteks masyarakat sekitar hutan Randublatung, pola perladangan dikembangkan bersama-sama dengan pola pertanian irigasi. Meskipun sawah irigasi sebagian besar masih tergantung pada air hutan (tadah hujan), namun luas areal pertanian

¹⁰¹ Warto, 2001, Op.Cit. hal. 52-54

terus bertambah, yang diikuti dengan pembukaan hutan primer. Jika seseorang, berhasil membuka hutan dan menjadikan tanah itu sebagai lahan pertanian, maka dia diakui sebagai pemilik tanah itu. Tanah seperti itu hanya bisa diwariskan dan tidak dapat dijual, karena pada suatu waktu tanah itu (misalnya karena si pemilik meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan atau pergi meninggalkan desanya) menjadi milik desa, sedangkan hutan sekunder yang tumbuh di atas lahan yang berhasil dibuka itu tetap menjadi milik bersama dan siapa saja boleh memanfaatkannya. Jadi konsepsi tradisional penduduk sekitar hutan Randublatung mengenai hutan bersifat komunal.

Titik balik penting dalam persoalan hutan terjadi sejak 1808, ketika Daendels menyatakan bahwa tanah dan hutan menjadi milik negara. Klaim pemerintah kolonial atas hutan seperti itu akhirnya berbenturan dengan konsepsi penduduk mengenai hutan. Jika semula penduduk desa bebas mengambil kayu di hutan untuk membuat rumah, alat-alat pertanian, gerobak, perahu, dan untuk bahan bakar, sejak hutan dinyatakan menjadi milik negara, mereka dilarang mengambil kayu di hutan. Dengan demikian larangan itu telah membatasi kesempatan ekonomi penduduk. Maka sebagai reaksinya timbullah berbagai protes sosial, antara lain misalnya "pencurian kayu". Timbulnya istilah "pencurian kayu" itu sendiri sebenarnya merupakan istilah asing bagi penduduk sekitar hutan, karena mengambil kayu di hutan adalah hak setiap orang. Maka istilah pencurian kayu sebagai jargon politik pemerintah kolonial tidak dapat dipahami oleh penduduk.

Sebaliknya, justru pemerintah kolonial dianggap telah merampas hak-hak penduduk atas hutan. Munculnya gerakan *Samin* pada awal abad XX merupakan salah satu contoh bentuk protes sosial itu.

Hak penduduk sekitar hutan Randublatung atas hutan makin dipersempit ketika pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*), 9 April 1870 (*Indische Staatsblad* No.55), yang menyatakan bahwa tanah kosong (*woeste gronden*) menjadi milik pemerintah kolonial. Hal ini memberi jalan bagi modal perkebunan Eropa dengan antara lain menyediakan "*tanah erfpacht*" atau tanah sewa. Undang-undang itu disusul dengan peraturan lain mengenai hutan di Jawa dan Madura 1874 dan Ordonansi lainnya yang makin mengetatkan eksploitasi hutan, dan sebaliknya makin menghimpit kehidupan petani yang tinggal di tepi hutan. Setelah kemerdekaan status hutan tidak lagi milik negara tetapi hutan dikuasai oleh negara (UUD 1945 pasal 33). Bagi penduduk sekitar hutan apakah hutan dimiliki atau dikuasai negara tidak berpengaruh apa-apa. Persepsi hutan bagi mereka adalah bahwa hutan adalah sumber kehidupan. Ketika reformasi bergulir dan undang-undang nomor 41 tahun 2000 tentang kehutanan dikeluarkan, tidak begitu banyak mempengaruhi perubahan persepsi mereka terhadap hutan. Sejarah panjang kebersamaan kehidupan mereka dengan lingkungan hutan tak mengubah begitu saja persepsi mereka terhadap hutan. Hutan bagi mereka adalah milik komunal atau milik bersama. Memang ada sebagian mereka karena pengaruh pengalaman, pendidikan

dan informasi baik lewat radio, televisi, maupun koran yang berpersepsi bahwa hutan adalah milik Perhutani (baca: milik negara). Tetapi kelompok ini tetap beranggapan bahwa mereka harus ikut merasakan hasil hutan itu. Bahkan mereka ini juga ikut mengambil (mereka tidak mau disebut mencuri) kayu di hutan sekedar untuk perbaikan pintu rumah, membuat meja, dan memperbaiki rumah yang rusak. Sebuah pertanyaan yang patut dimunculkan adalah apakah kerusakan hutan sebagai akibat langsung dari eksploitasi penduduk sekitar atas hutan, misalnya karena penambahan penduduk, perluasan lahan pertanian, dan meningkatnya konsumsi kayu. Atau sebaliknya, bahwa kerusakan hutan jati itu (sejak dulu hingga sekarang) terjadi sejak tanah dan hutan diklaim sebagai milik negara dan hutan dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhitungkan keberadaan penduduk sekitar hutan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa persepsi penduduk sekitar hutan mengatakan bahwa mereka menolak kalau dikatakan bahwa kerusakan hutan karena olah mereka yang mencuri kayu di hutan. Penduduk justru merasa sedih ketika hutan menjadi rusak, karena mereka tidak bisa mengambil daun jati, rencek, ulat, dan bahkan mereka menjadi korban karena terjadinya bencana alam seperti angin kencang, dan banjir akibat hutan jati telah rusak.

2. Konsepsi hidup sejahtera

Pada dasarnya manusia mempunyai penilaian dan pandangan tentang kesejahteraan hidup yang dihasilkan dari kemampuan menyeleksi, mengorganisir

dan meninterpretasikan pengamatan serta pengalaman mereka. Bagi masyarakat yang hidup disekitar hutan Randublatung menggambarkan kondisi kehidupan sejahtera adalah cukup makan sehari-hari dan cukup sandang sekedar bisa dipakai kandangan dan cukup perumahan sekedar untuk berkumpul dengan keluarga serta yang lebih penting adalah adanya keserasian antara mereka dengan lingkungannya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Seperti yang dikatakan C.Geerts kebanyakan orang Jawa bahwa masyarakat dan alam merupakan lingkup kehidupan orang Jawa sejak kecil.¹⁰² Irama-irama alamiah seperti siang, dan malam, hujan dan kering menentukan kehidupannya sehari-hari. Dari lingkungan sosial ia belajar bahwa alam bisa mengancam, tetapi juga memberikan berkat dan ketenangan, bahwa seluruh eksistensinya tergantung dari alam. Dengan demikian hidupnya memperoleh keteraturan. Melalui lingkungannya ia belajar untuk berhubungan dengan alam, irama alam menjadi iramanya sendiri, ia belajar apa yang harus dikerjakannya pada saat-saat yang sesuai. Begitu pula kekuatan-kekuatan alam disadarinya dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan seperti kehamilan, kelahiran, kematangan seksual, pernikahan, dalam menjadi tua dan dalam kematian.

¹⁰² Geertz, Clifford, 1981, *Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa* (terjemahan dari C Geertz 1969), Jakarta, Pustaka Jaya

Sedangkan Hildred Geertz¹⁰³ mengajukan dua kaidah untuk menjelaskan keserasian hubungan antar anggota masyarakat yang menentukan pola pergaulan. Kaidah pertama mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua, menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya.

a. Usaha pencapaian kesejahteraan hidup: *Suatu bentuk perilaku manusia*

Perkembangan masyarakat membawa perubahan pada persepsi masyarakat tentang kesejahteraan hidup. Sejahtera bagi masyarakat Jawa termasuk di dalamnya masyarakat sekitar hutan Randublatung tidak hanya menyangkut pencapaian keseimbangan lahir dan batin dalam usaha pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani, tetapi juga pencapaian keseimbangan antara nilai-nilai tradisional yang masih melekat dalam jiwa masyarakat dan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

Berkembangnya sistem-sistem baru seiring dengan perkembangan masyarakat mendorong adanya usaha-usaha dan strategi untuk masuk dan terlibat di dalamnya. Perkembangan masyarakat membawa perubahan

¹⁰³ Geertz, Hildred, 1961, *The Javanese Family A Study of Kinship and Socialization*,

pada sistem pengetahuan yang kemudian diwujudkan dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Dengan demikian perkembangan sistem-sistem baru tersebut juga mendorong semakin berkembangnya kebutuhan kehidupan masyarakat, terutama kebutuhan yang bersifat sekunder. Perilaku kehidupan ekonomi masyarakat yang pada awalnya bertahan pada kondisi subsistem¹⁰⁴ berkembang ke arah usaha-usaha pemaksimalan hasil.

Sistem yang berkembang menuntut adanya usaha pemaksimalan hasil agar kebutuhan hidup yang semakin kompleks dapat terpenuhi. Untuk itu manusia berusaha untuk dapat mengambil bagian dalam sistem produksi yang ada. Akan tetapi faktor kesiapan manusia dalam memasuki sistem yang relatif baru menurut konsepsi mereka mengakibatkan rendahnya daya saing dengan anggota masyarakat lain yang lebih siap dalam memasuki tatanan kehidupan tersebut. Dengan demikian masyarakat yang belum siap memasuki tataran tersebut hanya menjadi bagian periphery dari suatu sistem atau bahkan tidak dapat masuk dalam sistem tersebut.

Seorang pedagang mebel yang tidak begitu besar mengatakan :

“Saya berjualan sekedar mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena saya satu-satu tulang punggung kelangsungan hidup empat anak saya. Saya belum mampu bersaing dengan pedagang mebel lain, terlebih bila dibandingkan dengan pedagang

dalam Franz Magnis Suseno, 1999, Op.Cit. hal.82-83

¹⁰⁴ Dalam teori substantivis ilmu ekonomi tidak terlalu memperhatikan usaha-usaha pemaksimalan, akan tetapi dengan cara-cara manusia mengusahakan produksi dan distribusi sarana material yang mendukung kehidupannya.

mebel dari Jepara. Keinginan maju memang ada, agar kebutuhan hidup bisa tercapai”

Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa masalah kesiapan dalam memasuki tatanan ekonomi relatif modern masih membutuhkan perhatian tersendiri. Memang ada keinginan untuk dapat meningkatkan pencapaian kebutuhan seperti perumahan yang layak ataupun pendidikan, namun seringkali terbentur pada minimnya pengetahuan tentang cara dan strategi yang harus dilakukan dalam sistem yang berkembang saat ini.

Seorang ibu tua yang sehari-harinya mencari daun jati di hutan menuturkan:

“ Untuk membantu suami, saya harus bekerja mencari daun jati, satu gendong laku Rp. 6.000,-. Hasil sawah tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.”

Usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup ternyata cukup keras, walaupun seorang ibu yang sudah tua, ia harus rela pergi ke hutan untuk mencari daun jati dan menjualnya di kota Kecamatan. Ia mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga.

Usaha untuk dapat masuk dan terlibat dalam sistem yang ada saat ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat dengan cara menempuh pendidikan formal. Pendidikan formal lebih ditekankan pada persiapan manusia untuk dapat masuk dalam tatanan masyarakat yang lebih luas dan sistem masyarakat yang ada, terutama keinginan mereka bisa menjadi mandor hutan, polisi hutan atau karyawan Perhutani yang mereka pandang berkehidupan lebih dari cukup dibanding mereka.

Mereka ini berkeinginan menghapus “dosa warisan” berupa kemiskinan dari orang tua mereka yang hanya sebagai pencari kayu di hutan, mencari reneck, buruh tani, dan kadang dituduh sebagai pencuri kayu.

Usaha pencapaian kesejahteraan hidup yang tercermin dalam perilaku mereka mengacu pada pemenuhan kriteria sejahtera sesuai dengan konsepsi masyarakat. Adaptasi terhadap perkembangan lingkungan merupakan perilaku adaptif yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam masyarakat yang berada di pusat-pusat perkembangan. Perkembangan masyarakat yang mengarah pada model pemenuhan kebutuhan hidup dengan meningkatkan hasil budidaya manusia secara maksimal telah memberikan alternatif lain kepada masyarakat.

Pada umumnya masyarakat yang tinggal di “pedalaman” masih mempertahankan kondisi subsistem kehidupan ekonomi keluarganya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di kota Kecamatan atau mereka yang tinggal di tepi jalur-jalur jalan raya, sudah banyak yang mengarah pada pemaksimalan usaha di bidang ekonomi dalam mencapai kebutuhan hidup keluarga.

Kebutuhan akan rasa bebas, aman dan tentram dalam hubungannya dengan dampak rusaknya hutan jati akibat pencurian maupun gejolak-gejolak sosial yang ada di sekitar mereka ditunjukkan dengan perilaku diam atau “budaya diam”. Mereka enggan untuk menceritakan gejala-gejala tersebut kepada orang lain atau kalau bersedia untuk bercerita akan dilakukan dengan kasak-kusuk atau berbisik-

bisik. Kecurigaan terhadap kehadiran “orang luar” relatif tinggi, apabila belum mengenal betul akan tidak mudah untuk mendapatkan informasi dari mereka. Seringnya tuduhan bahwa mereka yang tinggal di sekitar hutan sebagai penyebab rusaknya hutan akibat pencurian, menjadi mereka serba salah. Maka aksi diam dan curiga kepada “orang luar” sebagai bentuk “protesnya”.

b. Persepsi hidup sejahtera: *suatu bentuk adaptasi manusia dengan lingkungannya*

Masyarakat sekitar hutan jati Randublatung merasakan hal sama tentang situasi masa transisi utamanya setelah bergulirnya era reformasi, yakni tentang tuntutan peningkatan kesejahteraan hidupnya yang lebih baik. Untuk itu persepsi tentang hidup sejahtera mengacu pada nilai-nilai kehidupan masyarakat yang relatif lebih baik dan modern dari suatu hasil pemahaman dan tanggapan terhadap kenyataan sejarah, lingkungan alam dan budaya ataupun gejala sosial yang terjadi sebelumnya. Persepsi tersebut sebenarnya merupakan konsepsi adaptatif manusia terhadap lingkungannya.

Kehidupan pedesaan Jawa umumnya mewarnai kehidupan masyarakat sekitar hutan Randublatung yang penuh toleransi, gotong royong, religius, penghormatan pada orang tua, kebersamaan, dan ketaatan pada aturan baik adat maupun hukum positif. Pola kehidupan ini lebih menekankan pada keharmonisan hubungan yang diatur dalam aturan adat

setempat, sehingga suatu kondisi yang harmoni merupakan suatu kebutuhan esensial dari suatu kehidupan masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat dicapai melalui pemenuhan kewajiban sesuai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti misalnya penyediaan ternak, cadangan padi, perhiasan, dan alat transportasi. Kepemilikan ataupun penyediaan barang-barang tersebut juga dapat menaikkan gengsi sosial seseorang di mata masyarakat sekitarnya.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik sebagai akibat dari faktor intern maupun ekstern, maka ada kecenderungan masyarakat akan mempunyai kebutuhan esensial yang semakin berkembang, terutama pengaruh tayangan televisi. Dalam usaha pencapaian kebutuhan hidupnya itu, masyarakat tidak hanya mengandalkan pada kriteria kehidupan sejahtera yang ada dalam masyarakat perkotaan yang lebih maju (dimensi kultural tertentu) namun juga mengacu pada kriteria kehidupan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat. Mereka memiliki pandangan hidup yang sangat luhur, apalah artinya hidup kaya kalau cara mencarinya menyengsarakan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan hutan jati dari dulu sampai sekarang belum memberikan kontribusi yang memadai. Bahkan masyarakat merasa terasing dan tersingkir dari melimpahnya kekayaan hutan jati bak emas hijau itu. Persoalannya tidak

hanya sebatas pada sisi masyarakat sekitar hutan yang dalam posisi lemah, namun terletak bagaimana penerimaan, tanggapan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan hutan jati selama ini dari kacamata kultural masyarakat setempat. Intinya masyarakat setempat ingin diakui sebagai subyek dalam pengelolaan hutan, bukan sebagai obyek apalagi tempat tudingan dan kambing hitam ketika hutan jati rusak karena pencurian atau penjarahan. Dengan demikian pemahaman budaya atau sistem pengetahuan masyarakat setempat sangat diperlukan sebelum menerapkan kebijakan pengelolaan hutan jati.

BAB III

DESKRIPSI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN JATI RANDUBLATUNG

A. Kondisi lingkungan fisik

1. Keadaan geografi

a. Letak

Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Randublatung secara administratif terletak di Kecamatan Banjarejo, Jepon, Kradenan (Menden), Randublatung dan Jati merupakan wilayah Kabupaten Blora. Disamping itu juga termasuk Kecamatan Gabus yang terletak di wilayah Kabupaten Grobogan. Sedangkan batas-batasnya meliputi;

Sebelah utara ; wilayah hutan KPH Pati

Sebelah Timur ; wilayah hutan KPH Cepu

Sebelah Selatan ; wilayah hutan KPH Ngawi/Unit II Jawa Timur

Sebelah Barat ; wilayah hutan KPH Gundih

KPH Randublatung terletak antara ketinggian 10-250 meter atas permukaan laut. Luas hutan KPH Randublatung dibagi menjadi 2 sub Kesatuan Pemangkuan Hutan yaitu SKPH Randublatung Utara dan SKPH Randublatung Selatan, keduanya dibatasi oleh jalur kereta api jurusan Semarang - Cepu, jalan antara desa Gabus sampai Kapuran.

b. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di KPH Randublatung terdiri dari kompleks litosal, mediteran aluvial, kompleks regosol kelabu dan grumusol kelabu/kekuningan, mediteran merah dan mediteran kekuningan. Tanah-tanah ini berasal dari endapan kapur, tanah liat/ lempung dan napal. Tanah dengan bahan induk berkapur dan berlempung yang hampir selalu infermiabile (kedap air) dengan pemuaihan dan pengerutan yang tinggi, merupakan sifat fisik yang jelek dan tidak baik untuk jalan mobil. Macam-macam tanah yang terdapat pada kawasan hutan KPH Randublatung tersebut dapat dilihat pada tabel 2¹⁰⁵

c. Topografi

Topografi lapangan kawasan hutan KPH Randublatung adalah datar, miring, berombak, curam dan bergelombang pada daerah aliran sungai Lusi dan Bengawan Solo, tidak ada pengaruh negatif terhadap hidrologi dengan pengertian bahwa pengadaan dan pemeliharaan sarana-sarana angkutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

¹⁰⁵ Laporan Kelestarian Hutan Randublatung, 2002

Tabel 2
Macam-macam Tanah KPH Randublatung

No	No.Code	Macam tanah	Bahan	Fisiografi
1	Aluvial	Asosiasi Aluvial kelabu dan alluvial coklat kelabu	Endapan liat dan pasir	Dataran
2	Litosal	Kompleks litosal mideteran dan ransia	Campuran batu	Bukit lipatan
3	Regosol	Kompleks regosol/kelabu dan grumosol kelabu tua	Batu kapur dan napal	Bukit lipatan
4	Grumosol	Grumosol kelabu	Endapat liat	Dataran
5	Mediteran	Asosiasi mediteran merah kekuningan dan mediteran coklat kekuningan	Batu liat (lunak)	Bukit lipatan

d. Jalur Transportasi

Sarana jalan truk yang melalui KPH Randublatung dan sekitarnya cukup menjamin lancarnya pengangkutan kayu dari TPK-TPK ke konsumen. Jalan darat dari Randublatung ke Solo dapat ditempuh dengan jalan Pudi melalui rute Randublatung - Blora - Purwodadi - Solo atau Randublatung-Cepu- Ngawi-Sragen- Solo atau dapat juga ditempuh melalui rute Randublatung-Banjarejo-Sragen-Solo. Demikian juga untuk angkutan kayu ke Semarang dapat ditempuh rute yang sama dari Purwodadi-Semarang. Sedangkan rute ke Yogyakarta bisa melalui Solo maupun lewat Semarang. Sedangkan angkutan yang menggunakan jasa Kereta Api sangat mudah dari TPK dengan tujuan Jakarta, Semarang, Surabaya maupun Solo dan kota-kota lain. KPH Randublatung mempunyai 4 TPK ;

TPK Doplang	: dihubungkan dengan KA dan Mobil Truk
TPK Randublatung	; dihubungkan dengan KA dan mobil Truk
TPK Beran	; dihubungkan dengan angkutan Mobil Truk
TPK Kalisari	; dihubungkan dengan Mobil Truk

Jumlah panjang Lori adalah 177,37 Km dengan panjang jalan efektif 24,6 Km dan tidak efektif 152,77 Km. Jalan mobil panjang seluruhnya 245, 78 Km terdiri dari 191,935 Km diperkeras, 31,215 Km tidak diperkeras dan 22,63 Km tapak Roda.

Data yang ada menyebutkan masih ada jalan mobil 31,215 Km belum diperkeras, sehingga pengangkutan pada beberapa daerah masih tergantung kepada bulan kering. Sedangkan untuk jalan Lori yang efektif digunakan sepanjang 24,6 Km, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Lori untuk sarana angkutan dikurangi mengingat biaya pemeliharaan yang tinggi. Walaupun demikian jalan Lori yang tidak efektif masih perlu dipelihara, mengingat sebagian dari jalan Lori tersebut desa dan merupakan tanah perusahaan di luar kawasan hutan yang perlu dipertahankan. Penggunaan jalan di samping untuk angkutan hasil hutan juga sangat penting untuk pengamanan wilayah hutan dan pemeriksaan pekerjaan secara rutin.

e. Iklim

Type iklim sangat menentukan pola produksi dan kegiatan perusahaan hutan pada umumnya, bila dan bagaimana harus melakukan penanaman, penebangan, pengangkutan dan sebagainya. Untuk menentukan type iklim KPH Randublatung terlebih dahulu harus diketahui faktor-faktor yang menentukan iklim antara lain suhu, curah hujan, tinggi tempat dan lain-lain. Menurut Schmidt dan Ferguson bahwa curah hujan dibagi 3 bagian;

- 1) Bulan basah; bila curah hujan dalam satu bulan lebih besar dari 100 mm.
- 2) Bulan lembab; bila curah hujan berkisar antara 60-100 mm
- 3) Bulan kering ; bila curah hujan dalam satu bulan kurang dari 60 mm

2. Lokasi dan luas hutan jati Randublatung

Luas kawasan hutan KPH Randublatung 32.464,1 Ha (31.895,40 Ha merupakan hutan dan 560,70 Ha merupakan alur) terbagi menjadi 2 sub KPH (SKPH) dari 6 Bagian Hutan (BH) dengan 12 Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH). Dari luas tersebut di atas pada tiap BKPH terdiri dari 3 sampai dengan 4 Resort Polisi Hutan (RPH) yang jumlah keseluruhan dari satu KPH Randublatung adalah 44 RPH.

a. SKPH Randublatung Utara

1) Bagian Hutan Doplang

a) BKPH Trembes = 2.780,8 Ha

b) BKPH Temuireng = 3.020,7 Ha

2) Bagian Hutan Bekutuk

a) BKPH Tanggel = 2.200,4 Ha

b) BKPH Temanjang = 2.618,1 Ha

3) Bagian Hutan Ngliron

a) BKPH Ngliron = 3.117,3

b) BKPH Kedung Jambu = 3.118,5 Ha

b. SKPH Randublatung Selatan

1) Bagian Hutan Randublatung

a) BKPH Boto = 2.861,7 Ha

b) BKPH Beran = 2.248,4 Ha

2) Bagian Hutan Banyuurip

a) BKPH Banyuurip = 2.704,2 Ha

b) BKPH Selogender = 2.340,1 Ha

3) Bagian Hutan Banglean

a) BKPH Kemadoh = 2.116,0 Ha

b) BKPH Pucung = 2.769,2 Ha

Kawasan hutan penghasil kayu jati meliputi areal seluas 30.695,79 Ha yang merupakan 94 % dari seluruh luas kawasan hutan dan semuanya hampir merupakan perusahaan tebang habis. Sedangkan kawasan hutan bukan penghasil kayu jati terdapat 913,38 Ha atau 3 % dan kawasan hutan yang merupakan alur seluas 854,93 Ha atau 3 % dari luas kawasan hutan seluruhnya. Kawasan hutan lindung tidak terdapat di KPH Randublatung. Dari luas tersebut yang merupakan kelas hutan produktif 28.657,13 Ha atau 88 %.

Sampai empat dasa warsa terakhir jumlah tegakan terus mengalami penurunan dalam hal tegakan yang produktif;

- Untuk jangka 1963-1972 keadaan tegakan yang produktif berkisar 95,4 % dari jumlah tegakan yang ada.
- Untuk jangka 1973-1982 keadaan tegakan yang produktif berkisar 95,45 % dari jumlah tegakan yang ada.
- Untuk jangka 1983-1992 keadaan tegakan yang produktif berkisar 94,007 % dari jumlah tegakan yang ada.

- Untuk jangka 1993-2002 keadaan tegakan produktif berkisar 91,58 % dari jumlah tegakan yang ada.

Sebaliknya dalam hal jumlah tanaman kayu kelas muda semakin bertambah;

- Jangka 1963-1972 = 16.850,8 Ha (58,96%) dari 30.675,2 Ha
- Jangka 1973-1982 = 19.368,4 Ha (60,14%) dari 31.832,1 Ha
- Jangka 1993-1993 = 19.205,5 Ha (65,00%) dari 29.600,7 Ha
- Jangka 1993-2002 = 19.862,74 Ha (69,31%) dari 28.657,13 Ha

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tiap jangka perusahaan telah terjadi penurunan dari tegakan produktif ke tegakan tidak produktif. Dengan melihat kecenderungan menurunnya luas hutan produktif dan meningkatnya kelas umur muda maka usaha-usaha pengendalian lebih diintensifkan baik pengamanan maupun pengaturan pengelolaanya secara keseluruhan. Tegakan kelas umur merupakan bagian terbesar dari seluruh kawasan hutan dengan kelas umur muda penyebarannya relatif merata dapat memberikan harapan baik pada pengelolaan yang akan datang dengan berdasarkan prinsip "*Sustained Yield*" (kelestarian hutan).

B. Lingkungan Sosial Ekonomi hutan jati

1. Perkembangan penduduk dan kehidupan ekonomi

Di atas telah diuraikan bahwa luas hutan KPH Randublatung menurut pembagian wilayah administratif pada tiap kabupaten adalah:

- a. Kabupaten Blora = 32.131,2 Ha (98,97 %)
- b. Kabupaten Grobogan = 332,9 Ha (1,03 %)

Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPH Randublatung bagian besar luasnya terdapat di wilayah Kabupaten Blora. Dengan demikian keadaan sosial ekonomi dan perkembangan pendudukan Kabupaten Blora sangat mempengaruhi pengelolaan hutan di KPH Randublatung.

Kabupaten Blora dengan luas 182.059 Ha terbagai dalam empat wilayah pembantu Bupati diantaranya adalah Randublatung. Wilayah Randublatung terdiri 5 Kecamatan yaitu Jati, Randublatung, Kradenan, Jepon dan Banjarejo. Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 1999 berjumlah 822.228 jiwa dengan kepadatan 452 %. Jumlah penduduk di 5 Kecamatan yang merupakan kawasan KPH Randublatung tersebut disajikan pada Tabel 3 :

Tabel 3

Luas wilayah, Jumlah penduduk dan kepadatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Penduduk (orang)	Kepadatan (%)
1	Jati	18.362	47.683	260
2	Randublatung	21.113	70.929	505
3	Kradenan	10.951	38.158	348
4	Jepon	15.753	57.030	529
5	Banjarejo	10.352	55.557	537

Sumber: data statistik Kabupaten Blora tahun 1999

Kawasan hutan di Kabupaten Blora termasuk di dalamnya wilayah KPH Randublatung, KPH Cepu, KPH Blora, KPH Mantingan dan KPH Ngawi seluas 79.560 Ha (44 %) dan areal pertanian termasuk tegalan seluas 82.633 (45 %) dari seluruh luas Kabupaten Blora 182.059 Ha. Penggunaan lahan oleh penduduk meliputi sawah, tegalan, pekarangan, perkebunan dan lain-lain. Sehingga mata pencaharian penduduk di sekitar hutan KPH Randublatung adalah bidang pertanian. Usaha pertanian belum mencapai optimum walaupun telah dilakukan usaha intensifikasi secara terus menerus mengingat dari luas tersebut yang telah mendapatkan pengairan irigasi seluas 7.120 Ha sisanya sebagian besar merupakan sawah tadah hujan. Berdasarkan data statistik Kabupaten Blora hasil produksi berupa padi mencapai 326.221 ton, kemudian untuk sawah tadah hujan dan tegalan

disamping penghasil padi juga jagung, ketela pohon , ketela rambat, kacang dan kedelai sebagai hasil tambahan. Faktor kelestarian hutan berupa pengamanan hutan sangat dipengaruhi oleh tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya termasuk para pekerja musiman, di mana hutan merupakan tempat jaminan kelangsungan hidup mereka.

Dalam usaha mengamankan hutan dan sekaligus memberikan lapangan kerja kepada penduduk sekitar hutan ditempuh dengan cara berusaha melibatkan mereka di dalam pengelolaan hutan berupa kegiatan tanaman, pemeliharaan, produksi dan angkutan hasil hutan. Bagi para penduduk sekitar hutan yang jaraknya dari tempat tinggal ke lokasi tanaman/ tebangan cukup jauh telah disediakan babagan/ basecamp sehingga sangat membantu baik dalam pengamanan hutan maupun kesejahteraan rakyat sekitar hutan.

Selain itu KPH Randublatung telah melaksanakan program pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH), yaitu suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan, meningkatkan kualitas maupun potensi masyarakat sehingga dapat menjadi mitra sejajar dalam pembangunan kehutanan dan meningkatkan lingkungan biofisik desa hutan sehingga terdapat keseimbangan harmoni antara desa hutan dengan hutannya.

Program ini dalam pelaksanaannya meliputi kegiatan di dalam kawasan hutan melalui Perhutanan social dan Insus tumpangsari dan di luar kawasan hutan dengan memberikan bantuan kepada pihak ke III (pengusaha ekonomi lemah dan petani desa hutan) berupa bibit buah-buahan, sarana air bersih ternak dan lain-lain.

Di samping pertanian dan kehutanan yang merupakan lapangan kerja penduduk sekitar hutan, juga pemeliharaan ternak merupakan kegiatan kerja penduduk dalam rangka menambah pendapatan mereka. Jumlah ternak penduduk dapat dilihat dalam tabel 4 .

Tabel 4

Keadaan ternak di wilayah KPH Randublatung

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	Jati	11.268	418	32	5.500	225
2	Randublatung	14.568	552	91	3.500	0
3	Kradenan	7.015	389	70	8.182	199
4	Jepon	18.499	609	35	4.876	0
5	Banjarejo	11.911	169	35	4.876	0

Sumber: data statistik Kabupaten Blora 1999

Dengan memperhatikan banyaknya ternak, terutama sapi, kerbau dan kambing, pengaruh penggembalaan di hutan khususnya pada tanaman muda dikawatirkan akan mengganggu upaya kelestarian hutan, jika tidak dilakukan tindakan preventif yang lebih intensif. Penjualan hasil hutan berupa kayu dengan cara lelang kecil dan di bawah tangan ditujukan sebagai sarana untuk kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Selama 10 tahun terakhir penjualan kayu jati dan rimba berupa lelang kecil, di bawah tangan per tahun mencapai jumlah rata-rata untuk lelang kecil= 9.745 m³, 5.662 m³ dan DBT = 8.819 m³; 8.955 m³.

2. Produktifitas hutan jati

Hutan merupakan sumberdaya ekonomi yang bersifat multi-guna. Pada mulanya hutan merupakan cadangan umum bagi masyarakat sekitarnya, tetapi kemudian dikuasai oleh negara untuk memaksimalkan manfaat ekonomi hutan bagi industri dan seluruh rakyat. Sejak itu sering terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat setempat karena perbedaan pandangan atau persepsi tentang bagaimana memanfaatkan hutan. Dengan strategi kehutanan sosial telah dapat disepakati bahwa pemanfaatan hutan seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Namun kebijakan untuk mencapai tujuan strategi kehutanan sosial tersebut pada umunya belum integral. Sistem pemasaran, misalnya, masih belum memberi kesempatan kepada rakyat kecil untuk dapat membeli hasil hutan dengan cara mudah dan harga yang terjangkau sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat.

Dalam paragraf ini akan dicoba untuk ditunjukkan berapa hasil yang dapat diperoleh KPH Randublatung dari hutan tanaman jati. Disini akan dibedakan antara hasil yang dapat diterima oleh rakyat setempat dengan hasil yang masuk ke dalam catatan lembaga pemerintah.

a) Penerimaan dan pengeluaran perusahaan KPH Randublatung

Sebagai sumberdaya alam, hutan jati di Jawa telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh penerimaan luar negeri bagi pemerintah. Untuk mengevaluasi tujuan ekonomi hutan jati di Jawa, sejak dulu digunakan cara yang sederhana, yaitu hanya menghitung perbedaan antara pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran perusahaan untuk tahun yang sama. Perbedaan tersebut dinamakan "saldo" dan dianggap mencerminkan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Keuntungan cara tersebut hanya terletak pada metode perhitungannya yang sangat sederhana, tetapi kurang memberikan informasi yang lengkap bila dibanding dengan metode lain seperti *economic rate of return* (EER) dan *Net present worth* (NPW). Dalam menghitung besarnya saldo, tidak dapat diketahui hal-hal yang berkaitan dengan modal yang ditanam oleh perusahaan pada waktu itu dan tidak ada evaluasi tentang hasil yang diperoleh dari investasi yang dilakukan.

Sebetulnya penggunaan teknik perhitungan cash flow dengan memasukkan tingkat bunga bukan merupakan hal baru di kehutanan. Rumus Faustmann yang diperkenalkan pada tahun 1849 untuk menentukan panjang daur kayu pertukangan merupakan asal mula perhitungan ekonomi dengan memasukkan tingkat bunga dalam setiap analisis proyek. Proyek-proyek kehutanan yang selalu bersifat kompleks, telah mempersulit perhitungan analisis finansial sehingga mendorong penggunaan cara yang

sederhana saja, dengan hanya menghitung saldo seperti telah diterangkan di atas.

Untuk menghitung saldo, biaya perusahaan dipisahkan menjadi dua kelompok besar, yaitu rutin dan biaya investasi. Biaya rutin dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu;

- 1) Biaya umum; gaji pegawai, kesejahteraan pegawai, kesejahteraan umum, biaya perjalanan dan biaya kantor.
- 2) Biaya tanaman dan pemeliharaan tegakan; pembuatan tanaman, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan hutan, penelitian dan pengembangan.
- 3) Infrastruktur: bangunan-bangunan jaringan jalan, perlengkapan kantor, fasilitas dan pemeliharaan kendaraan bermotor.
- 4) Biaya eksploitasi; persiapan, tebang dan pengangkutan hasil.
- 5) Biaya pemasaran: pemeliharaan tempat penimbunan, pemasaran dan promosi.

Penerimaan perusahaan sangat bergantung pada besarnya tebang tahunan kayu jati. Maraknya penjarahan hutan jati menyebabkan penerimaan perusahaan semakin menurun. Pada tabel 5 diperlihatkan bahwa di KPH Randublatung puncak volume kerugian akibat pencurian terjadi pada tahun 1998, sebagai akibatnya pada tabel 6 diperlihatkan

anjloknya saldo secara keseluruhan yang diperoleh oleh perum Perhutani Jawa Tengah.

Tabel 5

VOLUME DAN NILAI KERUGIAN PENCURIAN POHON
HUTAN JATI DI KABUPATEN BLORA
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

Uraian	1994		1995		1996		1997		1998	
	Pohon Batang	Kerugian	Pohon Batang	Kerugian	Pohon Batang	Kerugian	Pohon Batang	Kerugian	Pohon Batang	Kerugian
Blora	12.303	153.346	11.724	152.819	15.437	161.486	14.323	98.208	52.160	381.933
Cepu	11.846	197.598	6.425	129.889	6.975	149.272	6.171	100.221	90.245	1.555.019
Randublatung	8.202	198.076	7.470	188.819	6.458	154.671	6.613	133.611	88.171	3.156.164
Jumlah										5.093.116

Sumber : Perum Perhutani Jateng tahun 1999

Tabel 6
REALISASI PENGHASILAN DAN PENGELUARAN
PERUM PERHUTANI UNIT I JATENG
TAHUN 1994-1999
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO	URAIAN	1994	1995	1996	1997	1998
I	HASIL USAHA					
	1. Usaha dlm negeri	39.088	62.026	72.236	105.500	108.054
	a. Lelang besar	12.764	12.841	14.548	22.537	12.305
	b. Penjualan dng perjanjian	99.840	48.015	47.344	38.551	71.522
	c. Penjualan lsng	39.839	93.200	90.426	121.699	190.764
	d. Penggunaan sendiri	447	383	426	899	157
	Jumlah	191.978	216.465	224.980	289.186	382.802
	2. Usaha eksport	54.430	87.017	87.458	93.920	234.464
	3. Usaha lain-lain	3.108	5.224	5.793	16.874	15.727
	Jml 1+2+3	249.516	308.706	318.231	399.980	632.993
II.	BIAYA USAHA					
	1. Biaya usaha rutin					
	a. Biaya umum	38.855	44.425	51.921	58.093	83.101
	b. Pemeliharaan	8.514	30.329	39.917	174.437	1.719
	c. Eksploitasi	48.215	81.888	92.844	0	228.674
	d. Pemasaran	6.448	6.661	6.921	9.152	12.021
	2. Biaya usaha lain	1.005	1.020	10.485	1.169	2.280
	3. Biaya Pembangunan	11.261	17.256	22.930	18.688	18.514
	JUMLAH BIAYA	114.298	181.579	225.018	261.539	346.309
III.	SALDO (I-II)	135.218	127.127	93.213	138.441	286.684

Sumber data: Perum Perhutani Unit I Jateng 1999

4. Pendapatan masyarakat

Kehutanan tidak hanya memberi keuntungan pada perusahaan hutan dan pemerintah saja, tetapi juga pada masyarakat sekitar hutan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk negara sedang berkembang, khususnya daerah yang berpenduduk padat seperti Jawa, penerimaan masyarakat dari kehutanan merupakan salah satu sumber yang penting sehingga perlu diperhitungkan dalam merumuskan tujuan serta sistem pembangunan hutan.

Masyarakat di sekitar hutan memperoleh manfaat dari hutan dalam bentuk pangan dari tumpangsari dan upah sebagai pekerja di kegiatan-kegiatan teknik kehutanan, mulai dari pekerjaan tanaman, pemeliharaan dan tebangan. Peranan penerimaan masyarakat dari pakan ternak, ulat, rencek, daun, dan bahan makanan (diluar hasil tumpangsari) seringkali juga cukup penting sehingga layak untuk diperhatikan. Hasil pangan dari tumpangsari umumnya sudah dicatat oleh kehutanan, sehingga dapat diketahui jumlahnya. Jenis tanaman pangan yang diusahakan dalam tumpangsari adalah padi, jagung, ketela pohon, kacang-kacangan dan sayur-sayuran.

Di KPH Randublatung, disamping memperoleh hasil tanaman pangan, beberapa elemen pekerjaan tumpangsari ada yang harus dilakukan oleh pesanggem dengan menerima upah dan kadang-kadang pesanggem juga diberi alat-alat kerja seperti ganco dan parang. Selain bekerja di bidang tanaman dan tebangan,

masyarakat sekitar hutan Randublatung juga sebagai tenaga upahan di bidang pemeliharaan tegakan dan penjarangan. Tetapi jumlah tenaga kerja yang diseram di sektor kehutanan ini masih terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di pedesaan sekitar hutan jati.

C. Dampak penambahan penduduk terhadap hutan jati

Pertambahan jumlah penduduk mendorong perluasan tempat pemukiman sampai ke daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan hutan. Penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan mempunyai hubungan erat dengan hutan, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pakan ternak, kayu bakar dan kayu pertukangan, umbi-umbian dan sebagainya. Setelah *Domeinverklaaring* diumumkan, yang membatasi areal hutan dari areal yang boleh dikerjakan untuk pertanian, hak penduduk setempat untuk mengambil manfaat dari hutan menjadi berkurang. Batas kawasan hutan diberi tanda-tanda yang jelas secara permanen, polisi hutan dibentuk untuk menjaga keamanan, dan peraturan tentang sanksi bagi pelanggar keamanan hutan juga diumumkan. Secara tegas rakyat dilarang membawa kapak atau parang bila mereka masuk hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Penggembalaan ternak hanya diperkenankan di bawah tegakan tua, dan sebagainya.

Di lain pihak, pengelolaan hutan jati memerlukan tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan teknik kehutanan. Akan tetapi sepanjang abad 19 penduduk di sekitar hutan sebenarnya hanya tertarik untuk bekerja sebagai blandong karena upahnya dianggap memadai dan segera dapat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari keluarganya. Bekerja sebagai pesanggem pada umumnya kurang disukai karena hasilnya baru didapat setelah beberapa bulan kemudian, padahal kebutuhan akan makan tidak dapat ditunda lagi. Bukan hanya itu, ketika ditawarkan tentang proyek menanam jati bagi masyarakat di lahan yang telah disediakan atau lahan miliknya, mereka enggan melakukannya. “Tandur jati podo karo nandur pathoke dewe” (Menanam jati sama dengan membuat nisannya sendiri). Artinya memang kebutuhan yang mendesak adalah makan sehari-hari. Apalagi menanam padi yang hasilnya akan diterima bertahun-tahun lagi, sedangkan peanggem yang hanya membutuhkan waktu tiga sampai lima bulan saja mereka tidak sabar lagi. Bekerja di kehutanan memang sebenarnya kurang menarik bagi penjual tenaga kerja karena produktifitasnya rendah. Seperti telah diterangkan bahwa sistem tumpangsari pertama kali diterima karena sistem tersebut memerlukan biaya yang relatif murah untuk memperoleh hutan tanaman yang baik. Jadi menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat melalui tumpangsari semula bukan merupakan tujuan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Peluso, 1988, *Rich Forest, Poor People and Development Forest Acces Control and Resistance in java*, Phd-Thesis, Cornell University, New York, hal-436

Situasi seperti yang diterangkan di atas berubah karena pengaruh penambahan penduduk. Mula-mula perubahan tersebut nampak sangat perlahan-lahan, tetapi kemudian semakin cepat. Perubahan tersebut mempengaruhi setiap kegiatan teknik kehutanan. Pengaruhnya ada yang bersifat positif, tetapi tidak sedikit yang bersifat negatif.

1. Bidang tanaman

Keberhasilan tumpangsari sebagai sistem permudaan hutan selama 50 tahun awal pelaksanaan sejak dicetuskan oleh BUURMAN, sebagian disebabkan karena pada umumnya lahan yang ditanami mempunyai kesuburan tanah yang cukup tinggi. Di atas tanah yang subur, tanaman jati akan tumbuh dengan baik dan hasil tanaman pangan juga memuaskan. Di lain pihak, pada waktu itu lahan pertanian di sekitar hutan pada umumnya merupakan lahan kering dan sawah tadah hujan yang banyak ditumbuhi gulma. Namun demikian penduduk desa hutan masih lebih suka mengerjakan lahan mereka sendiri dibanding dengan mengambil lahan tumpangsari karena pertimbangan nilai sosial. Dengan demikian memperoleh tenaga pesanggem pada waktu itu masih merupakan hal yang tidak mudah. Untuk menarik petani di sekitar hutan, Dinas Kehutanan menawarkan berbagai macam insentif dan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh kayu pertukangan.

Sebelum pesanggem mulai bekerja di bidang tanaman, dibuat perjanjian kerjasama antara pejabat kehutanan dengan kepala desa yang mewakili rakyatnya.

Dalam kesempatan penanda-tanganan perjanjian kerjasama tersebut, Dinas Kehutanan membayar uang kontrak serta memberi beberapa alat pertanian dan anak sapi kepada setiap pesanggem. Apabila kelak pesanggem berhasil membuat tanaman yang baik maka anak sapi tersebut akan menjadi miliknya. Tetapi sebaliknya bila tanaman yang dibuat pesanggem hasilnya jelek, maka sapi yang sudah dipelihara hampir dua tahun tersebut harus dikembalikan kepada Dinas Kehutanan. Oleh karena itu sistem tumpangsari tersebut dinamakan sistem tumpangsari "kontrak sapi". Karena merosotnya ekonomi negara menjelang krisis keuangan dunia pada awal dasawarsa tigapuluhan, sistem tumpangsari kontrak sapi tersebut berakhir.

Kegiatan pengelolaan hutan jati agak terganggu selama perang dunia II, pendudukan Jepang dan waktu perang kemerdekaan. Tetapi begitu kedaulatan Indonesia diakui Belanda pada akhir tahun 1949, sistem tumpangsari berlaku normal kembali. Namun pada awal dasawarsa limapuluhan beberapa peraturan tumpangsari mengalami perubahan, diantaranya luas andil untuk tiap pesanggem mulai dibatasi. Pada waktu sistem tumpangsari kontrak sapi masih berlaku, pesanggem bebas menentukan luas andil yang akan dikerjakan, sesuai dengan kemampuan kerja keluarganya. Pada awal dasawarsa limapuluhan, karena jumlah peminat pesanggem bertambah, tiap pesanggem hanya boleh mengambil andil seluas 0,5 ha. Bahkan batasan ini berubah terus untuk tahun-tahun berikutnya yaitu rata-rata menjadi 0,2 ha mulai akhir dasawarsa tujuh puluhan. Sekarang bahkan

untuk menjadi pesanggem harus berebut dan tidak semua orang bisa menjadi pesanggem. Mereka yang dekat dan mempunyai hubungan dengan pejabat perum Perhutani lebih mudah menjadi pesanggem ketimbang masyarakat biasa yang lugu dan polos.

Pada awalnya hasil pangan dari tumpangsari dianggap sebagai tambahan pendapatan bagi pesanggem karena lahan pertanian yang dimilikinya tidak cukup. Tetapi sekarang banyak pesanggem yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali sehingga lahan tumpangsari merupakan satu-satunya sumber penghasilan pangan mereka. Berkurangnya luas andil dalam tumpangsari, jumlah hasil pangan yang diperoleh petani semakin tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Keadaan ini menimbulkan beberapa masalah baru, antara lain mulai terjadi kegagalan tanaman yang dibuat dengan sistem tumpangsari tersebut, dan kegagalan tanaman jati serta masalah rusaknya hutan jati.

2. Masalah pencurian kayu

Bertambahnya jumlah angkatan kerja, yang menimbulkan pengangguran tak kentara, juga berpengaruh terhadap masalah pencurian kayu. Semula, sebagai bagian dari hak ulayat, rakyat mempunyai hak untuk mengambil kayu dari hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 1870 yakni sejak diumumkannya *Domeinverklaaring*, pengambilan kayu dari hutan yang tidak diatur oleh

pemerintah dinamakan pencurian kayu. Jadi sebenarnya masalah pencurian kayu dari hutan sudah terjadi sejak dulu. Akan tetapi intensitasnya masih rendah, dan meningkat tajam sebanding dengan bertambahnya pengangguran dan ketidakadilan dalam pengelolaan hutan jati khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar hutan jati. Bahkan sejak dasawarsa enam puluhan peningkatan intensitas pencurian kayu nampak semakin tajam dan mencapai puncaknya pada awal era reformasi (tahun 1998) sampai sekarang. Penjarahan hutan jati itu sebenarnya sebagai puncak akumulasi kekecewaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang selama ini diterapkan. Bahkan ada persepsi dalam masyarakat bahwa mengambil kayu di hutan itu bukan suatu kehinaan dibanding kalau mereka ketangkap penduduk gara-gara mencuri ayam tetangga. Mereka beranggapan kalau toh nantinya tertangkap petugas saat mengambil kayu jati, mereka tidak akan khawatir, karena proses hukum yang berlaku adalah tahu sama tahu. Dan mengambil kayu jati di hutan adalah keterpaksaan karena keadaan ekonomi.

Selama dasawarsa limapuluhan, pencurian kayu masih bersifat musiman. Secara umum ada dua musim pencurian kayu yaitu pada masa paceklik dan masa terjadi perhelatan di kalangan masyarakat. Masa paceklik terjadi setelah petani selesai menanam padi di sawah, karena semua modal digunakan untuk investasi di bidang pertanian pangan itu. Masa paceklik pada umumnya berkisar antara bulan Januari sampai Maret. Musim tanam padi bertepatan bulan Desember, yaitu sekitar

40 hari setelah mulai musim penghujan, sedang panen padi mulai akhir Maret sampai April.

Musim pencurian kayu yang kedua, terjadi pada bulan Juli sampai September. Pada bulan-bulan itu banyak orang menyelenggarakan “pesta” perkawinan, khitanan dan sebagainya. Demikian juga antara bulan Juli dan Agustus, awal masuk pendaftaran sekolah dan masuk sekolah baru, semua itu mendorong terjadinya pencurian kayu.

Mulai tahun enampuluhan, intensitas pencurian kayu jati terus bertambah. Sifat pencuriannya sendiri mulai berubah dari pencurian musiman menjadi pencurian sepanjang tahun yang berfluktuasi. Perubahan penting untuk dicatat karena berpengaruh terhadap upaya pencegahannya. Dengan pencurian sepanjang tahun yang berfluktuasi berarti bahwa di sini ada dua macam pelaku pencurian, yaitu pencurian musiman dan pencurian tetap. Motif yang mendorong terjadinya pencurian musiman masih sama dengan waktu sebelumnya, sedangkan motif bagi pencuri tetap adalah pengangguran. Jadi pengaruh pengangguran terhadap kehutanan baru terasa pada dasawarsa enampuluhan, apalagi saat itu sekitar tahun 1963-1965 di Jawa terjadi kekurangan pangan yang menimbulkan penyakit karena kelaparan (*honger oedem*, HO) di berbagai daerah. Namun demikian pencurian yang sedemikian itu belum menggoyahkan dan membahayakan kelangsungan perusahaan. Bahkan di KPH Randublatung, keuntungan diambil dari pertumbuhan hutan jati yang sekitar 5-10 %, dengan tidak mengurangi modal investasi yang ada.

Baru, ketika era reformasi tiba (1997) hingga sekarang, pencurian kay jati mencapai puncaknya dan semakin menggoyahkan sendi-sendi kehidupan dan kelangsungan perusahaan. Bahkan diperkirakan lima tahun lagi hutan jati akan habis, kalau masalah pencurian tidak segera di atasi. Modus operandi pencurian pun sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Bukan lagi secara perorangan tetapi sudah merupakan pencurian massal, kadang-kadang sampai 80 orang, yang dikomando oleh seorang pimpinan yang dinamakan benggol, dan penadahnya dinamakan kokolot, orang dibelakangnya bermodal besar dari luar daerah dan dengan menggunakan alat-alat modern, terorganisir rapi yang mirip merupakan jaringan. Mereka memobilisasi penduduk desa yang sebagian besar bermukim di luar daerah sekitar hutan, untuk disuruh menjarah kayu jati dengan imbalan jasa antara Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Bahkan tidak segan-segan mereka juga melibatkan aparat keamanan dan juga orang dalam Perhutani sendiri. Kayu yang dijarah pun tidak lagi yang tua tetapi yang berumur muda pun ikut dijarah. Waktu mencurinya yang sebelumnya malam hari, dan di daerah yang agak dalam, namun sekarang siang pun jadi dan dipinggir jalan tidak menjadi soal.

Proses evolusi intensifikasi sistem pengelolaan hutan jati seperti diterangkan di atas adalah selaras dengan perkembangan jumlah penduduk. Perhutani sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan jati telah melakukan antisipasi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul karenanya. Akan tetapi pada umumnya anstisipasi tersebut hanya merupakan reaksi terhadap

Masalah yang sudah terjadi, belum memikirkan untuk merubah landasan sistem pengelolaan yang dipakai. Padahal sistem pengelolaan yang berlaku tersebut diciptakan lebih dari satu abad yang lalu, pada waktu kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat berbeda dengan sekarang. Akibatnya dengan program-program yang bersifat “tambal sulam” masalah proses kemerosotan kualitas tegakan belum dapat diatasi dengan memuaskan dan dengan demikian intensitas pencurian kayu juga belum dapat dikurangi.

D. Perlindungan hutan

Berdasarkan Ordonansi Kehutanan untuk Jawa dan Madura tahun 1927 (lembaran negara tahun 1927 No. 221) telah ditetapkan mengenai batas pekerjaan dan tujuan melindungi hutan ialah; mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, baik hak atas hutan maupun hak atas hasil-hasil yang diperoleh dari hutan, selama masih berada dalam pengurusan jawatan kehutanan.¹⁰⁸ Melindungi hutan dilaksanakan baik secara preventif maupun represif, yaitu; mencegah, menjaga, menangkap dan menuntut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap hutan dan hasil hutan, maupun dengan mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh alam.

Kerusakan hutan disebabkan antara lain oleh pencurian, kebakaran hutan, penggembalaan, hama dan penyakit, bencana alam dan lain-lain. Dalam usaha

¹⁰⁸ Ordonansi Kehutanan Jawa Madura 1927

preventif maupun represif untuk menanggulangi kerusakan hutan seperti di atas telah dikeluarkan biaya yang cukup besar dari tahun 1983-1992 misalnya dana yang diserap dalam pos ini mencapai Rp. 723.654.506,- dan biaya itu terus membengkak terlebih saat musim penjarahan hutan mulai tahun 1997 hingga sekarang yang bukan saja ditangani oleh Polsus Kehutanan tetapi juga dari Polri (Brimob).¹⁰⁹ Beberapa penyebab kerusakan hutan KPH Randublatung antara lain:

1. Pencurian

Secara global di Jawa Tengah pencurian hutan hinggatahun 1998 dapat dicatat Rp. 18.746.035.000,- sedangkan untuk KPH Randublatung mencapai Rp. 3.156.164.000,-. Didalam masalah pencurian kayu jati tersebut beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap penanganannya antara lain;

a. Luas wilayah dan fotografi

Letak KPH Randublatung bagian barat dibatasi KPH Gundih dan bagian selatan KPH Ngawi.¹¹⁰ Daerah perbatasan ini sangat sulit untuk secara terus menerus mendapat pengawasan. Dengan melihat keadaan lapangan yang bergelombang dan adanya aliran sungai

¹⁰⁹ laporan Bulanan KPH Randublatung

Bengawan Solo terutama di perbatasan antara Bagian Hutan (BH) Banglean, Bagian Hutan (BH) Banyuwirip, Bagian Hutan (BH) Randublatung bagian selatan sepanjang sungai Bengawan Solo keadaannya cukup rawan, disebabkan sulitnya jangkauan keamanan.¹¹¹

b. Sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk di sekitar hutan sangat menentukan keberhasilan dalam usaha melestarikan hutan. Pengaruh langsung disebabkan oleh: rendahnya tingkat sosial ekonomi rakyat di sekitar hutan, akan berakibat tumpuhan hidup mereka sebagian besar tergantung dari hutan.¹¹² Banyak tenaga kerja yang tidak tertampung karena penyediaan lapangan kerja terbatas, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka tertumpu pada hutan di sekitarnya. Intensitas pencurian meningkat dalam waktu-waktu tertentu seperti menjelang lebaran, paceklik, musim tahun ajaran baru sekolah, dan memang saat awal reformasi pencurian secara besar-besaran di luar kebiasaan itu.¹¹³

¹¹⁰ Data Monografi Kecamatan Randublatung

¹¹¹ Hasil Analisa dan Evaluasi Sat Brimobda Jateng tahun 1998

¹¹² Awang, Afri, San, 2003, Politik Kehutanan Masyarakat, Kreasi Wacana, Yogyakarta hal-92, juga lihat Bakhtiar, Irfan (Penyunting, 2001, Hutan Jawa Menjemput Ajal, dalam Prosiding Semiloka Temu Inisiatif DPRD Se-Jawa Madura di Wonosobo, Arupa, Yogyakarta.

¹¹³ Hasil wawancara dengan pejabat Perum Perhutani, Aparat Polri, Masyarakat sekitar hutan

2. Kebakaran hutan

Kerusakan hutan akibat kebakaran setiap tahun selalu ada terutama pada musim kemarau. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan; melaksanakan patroli khusus secara rutin, terutama pada tanaman muda. Melaksanakan pembuatan aliran khususnya pada batas-batas tanaman muda dan tempat pengumpulan kayu, guna menghindari timbulnya kebakaran dari tempat lain. Pembikinan tanaman sekat bakar sebagai pagar untuk membatasi tanaman jati muda dari kebakaran misalnya tanaman baris Kaliandra atau tanaman Rimba pada keliling batas tanaman.

3. Penggembalaan

Penggembalaan hewan pada tanaman muda dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan yang tidak kecil artinya, baik secara langsung atau tidak langsung mempunyai akibat negatif terhadap kelestarian hutan, antara lain:

- a. Merusak dan memutuskan akar-akar tanaman muda
- b. Mematikan tumbuh-tumbuhan bawah yang sangat berfungsi untuk menyuburkan tanah menjadi becek atau rusak dan akan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar, alang-alang dan lain-lain.

- c. Merusak atau merobohkan tanaman-tanaman yang baru ditanam/ bibit-bibit pohon ataupun tanaman-tanaman muda.
- d. Mengakibatkan tanah menjadi padat, sehingga tanaman muda akan terganggu pertumbuhannya dan kemungkinan akan mati ataupun gagal.
- e. Menimbulkan terjadinya erosi pada tanah-tanah miring karena tanah menjadi terbuka akibat tumbuhan bawahnya mati.

Usaha-usaha penanggulangan penggembalaan liar yang dilakukan telah didukung dengan peraturan yang memadai, KPH Randublatung telah melakukan upaya-upaya:¹¹⁴

- a. Penanaman tanaman pagar/ tanaman tepi sepanjang batas kawasan dengan jenis; klampis, dan Secang secara berlapis.
- b. Mengadakan kerjasama dengan Pamong Desa dalam memberikan pengarahan kepada penduduk pemilik ternak agar menggembala pada tanaman tua, tetapi tidak pada tanaman muda dan ikut menyediakan/ membantu pengadaan tanaman rumput gajah sebagai makanan ternak dan menganjurkan pemeliharaan ternak dengan sistem dikandangkan.
- c. Penjagaan secara rutin oleh petugas Mandor

¹¹⁴ Lihat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 33/Kpts-II/99 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan batas Hutan. Lihat juga Peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai Kehutanan dan Perum Perhutani.

Mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹⁵ Menegakkan peraturan ini seperti menegakkan benang basah, sangat sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi, terutama karena luasnya hutan, Mandor yang terbatas, dan melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah.

4. Hama dan penyakit

Kerusakan hutan yang disebabkan oleh hama dan penyakit belum ada data-data yang tercatat, namun demikian dapat dikemukakan jenisnya adalah serangan inger-inger dan benalu. Karena lokasi tegakan dari serangan benalu dan inger-inger relatif kecil, maka usaha penanggulangan harus dilaksanakan pada saat kegiatan penjarangan dilaksanakan dan diusahakan pemberantasan dengan obat-obatan.

5. Bencana alam

Kerusakan hutan juga disebabkan oleh bencana alam seperti adanya angin kencang sehingga menimbulkan pohon tumbang dan roboh serta adanya pohon yang disambar petir dan akibat tanah longsor dan banjir.

¹¹⁵ Lihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Bagian Kelima tentang Perlindungan hutan dan

6. Lain-lain

Kerusakan ini dimaksudkan kerusakan hutan di luar hal-hal tersebut di atas;

- a. Kerusakan akibat penyerobotan tanah
- b. Kerusakan hutan akibat perencikan dan pembabatan tanaman.

Konservasi alam.

BAB IV

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN JATI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

A. Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat

Dalam menggambarkan masalah-masalah pokok tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan jati Randublatung , perlu diidentifikasi faktor-faktor yang mencirikan karakter wilayah, sehingga dengan demikian pembangunan wilayah dapat disusun dengan tepat karena sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain melalui pengenalan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat khususnya mereka yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Perumusan tujuan pembangunan wilayah yang tidak tepat dapat dihindarkan, karena pembangunan wilayah diperlukan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.

1. Jumlah penduduk dan kesempatan kerja

Kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa menjadi masalah sentral dalam studi sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk untuk waktu yang akan datang dapat diperkirakan dengan melihat data lapangan yaitu; jumlah pendudukan dan laju pertumbuhannya, moralitas untuk tiap kelompok umur, penduduk desa dan kesempatan kerja.

Data tentang laju pertumbuhan, jumlah rata-rata anggota keluarga dan rasio antara jumlah penduduk pedesaan dengan jumlah penduduk total, serta kesempatan kerja non pertanian di KPH Randublatung, dikumpulkan dari data sensus penduduk tahun 1998 dan data statistik dari Kabupaten Blora. Data jumlah penduduk menurut kelompok umur, luas sawah dan luas tegal, dihitung secara cermat menurut lokasi desa-desa yang ada di KPH Randublatung.

Rata-rata jumlah anggota keluarga dihitung dari jumlah penduduk total dibagi dengan jumlah keluarga. Rata-rata penduduk anggota keluarga ini akan menurun sepanjang waktu karena jumlah anak tiap keluarga akan menurun sebagai hasil program keluarga berencana. Rata-rata jumlah anggota keluarga mempunyai korelasi yang kuat dengan rata-rata jumlah tenaga kerja tiap keluarga, yang juga berkorelasi dengan kepemilikan lahan pertanian normal dan jumlah kesempatan kerja non pertanian di pedesaan. Hal tersebut diperlukan untuk menaksir jumlah pengangguran di pedesaan sepanjang jangka waktu tertentu. Data tentang laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan dapat dilihat dalam tabel 7.¹⁰⁸

Sistem pencatatan data administrasi di Kabupaten Blora menyajikan tentang klasifikasi lapangan pekerjaan. Oleh karena itu

¹⁰⁸ Data Biro statistik Kabupaten Blora tahun 1998

informasi tentang kesempatan kerja non pertanian di daerah pedesaan sebenarnya juga tersedia. Akan tetapi istilah lapangan pekerjaan dalam sistem administrasi tersebut tidak jelas, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat petani di Jawa. Hal ini disebabkan karena hampir semua penduduk pedesaan di Jawa sebenarnya terlibat langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pertanian. Akibatnya dalam administrasi tersebut selalu dijumpai adanya pencatatan dua kali atau bahkan tiga kali untuk sebagian keluarga petani (lihat tabel 8). Untuk mengoreksi data ini diperlukan waktu yang lama dan sebenarnya tidak amat penting untuk kepentingan penelitian. Model pengumpulan data kependudukan hanya memerlukan data secara garis besar saja tentang masalah kesempatan kerja ini, untuk melihat kemungkinan perkembangannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu koreksi lapangan pekerjaan tersebut hanya dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia.

Dalam tabel 8 tersebut, jumlah keluarga yang dicatat bekerja di sektor pertanian seluruhnya ada 74,64 %. Angka tersebut lebih besar dari jumlah keluarga seluruhnya. Ini berarti untuk beberapa keluarga yang telah dicatat bekerja di pertanian juga ada yang dicatat bekerja di perkebunan atau peternakan. Pencatatan dua atau tiga kali seperti itu mungkin juga terjadi di sektor non-pertanian.

Informasi tentang kesempatan kerja non-pertanian di pedesaan diperlukan dalam hal ini untuk menaksir jumlah pengangguran di pedesaan, yang merupakan variabel penting dalam merumuskan tujuan pembangunan wilayah. Namun demikian angka pengangguran tersebut tidak perlu ditaksir dengan kecermatan tinggi. Dalam hal ini kesempatan kerja non-pertanian ditaksir dari jumlah penduduk yang tercatat sebagai pedagang, tukang dan mereka yang bekerja di bidang angkutan dan jasa. Akan tetapi data yang tersedia tidak membedakan pekerjaan non-pertanian yang tinggal di kota dan di desa. Oleh karena itu jumlah penduduk pedesaan yang bekerja di sektor non-pertanian dapat diperoleh dari jumlah penduduk pedesaan seluruhnya dikurangi dengan jumlah pertanian.

Jumlah petani yang dicatat dalam sistem administrasi pemerintah daerah dapat dipisahkan menjadi tiga kelompok, yaitu petani besar, yang memiliki lahan pertanian lebih dari 0,5 ha, petani menengah (memiliki lahan pertanian antara 0,25 sampai 0,5 ha), dan petani kecil (memiliki lahan pertanian lebih kecil dari 0,25 ha). Jumlah petani untuk masing-masing kelompok tersebut dicatat dalam hasil sensus pertanian tahun 1998. Akan tetapi dalam sensus tersebut untuk kelompok petani kecil juga termasuk petani tak berlahan (*land-less*). Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memisahkan petani kecil dan petani tak berlahan tersebut. Jumlah dan prosentase tiap kelompok

petani, termasuk yang tak berlahan, dapat dibaca dalam tabel 12 di bawah. Untuk kepentingan pembangunan wilayah dan kehutanan, variabel yang mempunyai peranan sangat penting untuk diketahui adalah jumlah pengangguran di pedesaan. Di desa hutan, jumlah pengangguran secara absolut sangat tinggi dan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya.

2. Kebutuhan dasar masyarakat

Masalah sosial di Jawa tidak hanya berhadapan dengan pengangguran saja, tetapi juga adanya peningkatan kebutuhandasar masyarakat. Jumlah kebutuhan dasar masyarakat untuk waktu mendatang dapat ditaksir berdasarkan perkembangan jumlah penduduk. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan akan beras/ gabah dan kayu pertukangan.

Perlu taksiran produktifitas setiap penggunaan lahan guna menaksir produksi kebutuhan dasar masyarakat. Produksi pangan maupun kayu sepanjang waktu akan meningkat sejalan dengan peningkatan produktifitas tiap bentuk tata guna lahan sebagai hasil program pembangunan. Di lain pihak konsumsi per kapita beras dan kayu bakar akan mengalami penurunan, karena meningkatnya pendapatan per kapita.

B. Perubahan Strategi Pengelolaan Hutan

Validitas sistem pengelolaan hutan tanaman jati dapat dipelajari, karena sistem tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman menerapkan sistem pengelolaan hutan konvensional, perbandingan antara dua sistem pengelolaan tersebut dapat menyajikan informasi untuk evaluasi tentang kebaikan dan keburukan masing-masing. Evaluasi ini akan dapat memberikan pemahaman yang lebih meyakinkan tentang sistem pengelolaan hutan sosial.

1. Pengelolaan hutan konvensional.

Sistem pengelolaan hutan konvensional, hutan tanaman jati di Jawa menghasilkan produktifitas yang rendah, baik diukur dengan produktifitas kayu bakar maupun kayu pertukangan, dan menyediakan kesempatan kerja yang terbatas karena penggunaan daur yang panjang.

2. Kehutanan sosial

Pengelolaan hutan sosial diajukan untuk meningkatkan produktifitas hutan dengan menambah input produksi, baik modal maupun tenaga kerja. Menurut hasil penelitian, dengan memperhatikan masalah pokok yang dihadapi oleh sistem

pembangunan wilayah, untuk pembangunan KPH Randublatung diperlukan pengelolaan hutan yang baru yaitu kehutanan sosial. Dengan cara itu diharapkan pengelolaan hutan dapat menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak kepada masyarakat setempat, dan sekaligus dapat menjadi awal pembangunan pedesaan. Produktifitas hutan yang lebih tinggi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan hutan, sehingga berpengaruh positif untuk menambah investasi pembangunan kehutanan dan masyarakat.

Dalam meningkatkan peranan hutan tanaman dalam ikut memecahkan masalah pembangunan wilayah diperlukan sistem pengelolaan hutan yang mempunyai kaitan erat dengan lokasi serta sifat-sifat kawasan hutan sebagai suatu unit pengelolaan teknik kehutanan.

Management Regim I (MR I) merupakan modifikasi sistem pengelolaan konvensional yang intensitasnya ditingkan untuk memperbanyak ulangan terjadinya feedback-loops positif” asimilasi bersih-Riap biomassa-Massa daun produksi Fotosintesis” dengan melakukan penjarangan keras. Tujuan peningkatan intensitas pengelolaan pada MR I adalah untuk meningkatkan produktifitas kayu pertukangan dengan memaksimalkan produksi fotosintesis. Rejim pengelolaan

yang lain berusaha untuk mengkombinasikan penanaman pangan dan kayu, terutama untuk meningkatkan produksi kayu bakar, pangan, pakan ternak dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. MR II dan MR III lebih dititik beratkan untuk meningkatkan produksi kayu bakar. Dalam MR IV, produksi kayu pertukangan tidak dianggap begitu penting, dan titik beratnya adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat setempat, khususnya petani tak berlahan, akan produksi pangan dan kesempatan kerja.

Dalam kehutanan sosial, setiap strategi pengelolaan mempunyai kaitan yang erat satu dengan lainnya, tidak ada strategi yang berdiri sendiri. Pelaksanaan rejim pengelolaan di lapangan akan ditentukan oleh kondisi fisik tiap petak dan intensitas pengaruh sosial terhadap petak tersebut serta pembangunan wilayah secara umum. Dengan menggunakan informasi yang tersedia dalam rencana perusahaan yang berlaku, dari sudut pandang kondisi fisik kawasan hutan KPH Randublatung, letak dan luas areal yang cocok untuk menerapkan rejim pengelolaan dapat ditetapkan.

Dibandingkan dengan hasil sekarang secara teoritis produksi kayu pertukangan, kayu bakar dan pangan, serta kesempatan kerja yang ditawarkan oleh rejim kehutanan sosial

memang jauh lebih tinggi. Defesit kayu pertukangan sudah dapat diatasi setelah 20 tahun pelaksanaan rejim kehutanan sosial secara penuh. Jangka waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah kekurangan kayu bakar ternyata lebih panjang yaitu setelah 50 tahunan. Oleh karena itu segera setelah surplus kayu diarahkan untuk lebih banyak menghasilkan kayu bakar. Mungkin revisi tersebut dapat dilakukan lebih awal karena hasil kayu bakar ini dapat memberi sumbangan yang sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan karena itu dapat mengurangi intensitas pencurian kayu yang sangat buruk pengaruhnya terhadap kualitas tegakan.

Sebegitu jauh, kegiatan yang bersifat langsung dengan penerapan strategi rejim pengelolaan kehutanan sosial ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pengangguran di desa sekitar hutan. Namun demikian, apabila produksi pangan, kayu bakar dan kayu pertukangan di KPH Randublatung telah melampaui kebutuhan masyarakat, pembangunan pedesaan dapat dirangsang untuk meningkatkan pembangunan lapangan kerja non-pertanian untuk menciptakan lapangan kerja baru sebanyak mungkin. Untuk waktu yang akan datang, menciptakan lapangan kerja sektor non-pertanian akan lebih

penting dibanding dengan kesempatan kerja kehutanan, karena produktifitas tenaga di sektor non-pertanian tersebut lebih tinggi. Demikian pula selaras dengan peningkatan pendidikan dan teknologi, kesempatan kerja di kehutanan akan menjadi kurang menarik bagi tenaga kerja yang terdidik dibanding dengan kesempatan di sektor non-pertanian.

C. Implikasi Kebijakan Baru

Sistem pengelolaan hutan sosial yang merupakan kebijakan baru adalah merupakan pengalaman yang sangat panjang dalam melaksanakan sistem pengelolaan untuk merumuskan kembali sistem pengelolaan hutan jati. Penggunaan penjarangan keras dalam MR I diilhami oleh terjadinya pencurian kayu pada tegakan yang ternyata sampai batas intensitas tertentu dapat meningkatkan riap diameter individu pohon dan luas bidang dasar tegakan. Penjarangan keras akan menyebabkan penutupan tajuk menjadi lebih terbuka sehingga memungkinkan budidaya tambahan untuk tanaman pangan, kayu bakar dan jenis non-jati yang dapat menghasilkan kayu pertukangan rakyat. Hal ini pun telah dilaksanakan secara tidak resmi oleh masyarakat di beberapa daerah.

Sistem pengelolaan hutan sosial yang diusulkan dalam beberapa aspek berbeda dengan sistem konvensional. Oleh karena itu untuk melaksanakan sistem yang baru ini memerlukan perencanaan yang matang

untuk memperkecil timbulnya masalah baru. Perencanaannya itu sendiri juga memerlukan studi yang mendalam, baik yang menyangkut masyarakat maupun organisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan serta administrasinya. Sistem pengelolaan kehutanan sosial dirumuskan berdasarkan dua aspek yaitu aspek teknik kehutanan dan aspek sosial ekonomi masyarakat, sedang sistem pengelolaan konvensional lebih banyak dirumuskan berdasarkan aspek teknik kehutanan saja. Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan kehutanan sosial tentu ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat, tetapi juga ada faktor pendukungnya.

1. Faktor penghambat

- a. Biaya permudaan

Hampir seluruhnya permudaan hutan jati di Jawa pada saat ini dilaksanakan dengan sistem tumpangsari. Besarnya biaya permudaan tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda untuk semua KPH di lingkungan Perhutani. KPH Randublatung misalnya, rata-rata biaya pembuatan tanaman, pada tahun 1987, adalah Rp 46.702/ ha, termasuk gaji mandor harian. Bila gaji mandor harian dikeluarkan, biaya permudaan menjadi Rp.36.390/ha, yang terdiri dari Rp.6000 untuk uang kontrak, Rp 3.250 untuk pengumpulan biji, Rp 5.430 untuk

membeli peralatan kerja dan Rp 21.440 untuk persiapan lapangan.

Di beberapa tempat di Jawa, biaya pembuatan tanaman yang rendah dalam lingkungan masyarakat agraris yang kekurangan lahan pertanian itu telah menyebabkan terjadinya kegagalan tanaman karena pesanggem dengan sengaja membunuh sedikit demi sedikit anakan jati yang sudah hidup, agar mereka dapat menanam tanaman pangan dalam jangka waktu yang lebih panjang dari dua tahun.¹⁰⁹ Jadi masalah kegagalan pembuatan tanaman jati tersebut lebih bersifat sosial, bukan masalah teknis.

Implikasi peningkatan biaya pembuatan tanaman semestinya tidak hanya ditinjau dari kepentingan pesanggem saja, tetapi juga dari kepentingan perusahaan hutan. Biaya pembuatan tanaman yang lebih tinggi akan berpengaruh positif terhadap kualitas tanaman, yang merupakan awal pembentukan tegakan yang bermutu tinggi. Namun di lain pihak, peningkatan biaya tanaman tentu saja akan mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Pertanyaannya adalah apakah meningkatnya mutu tegakan tersebut dapat menutup pengurangan keuntungan yang akan diperoleh akibat

bertambahnya biaya pembuatan tanaman. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melakukan penelitian perhitungan menggunakan rumus Clutter untuk menaksir nilai harapan lahan suatu tegakan.

b. Panjang daur

Dalam pengelolaan hutan secara konvensional, panjang daur hutan tanaman jati di Jawa ditetapkan untuk satu Bagian Hutan sebagai kesatuan. Oleh karena itu variasi produktifitas atau harga tunggak tiap petak di dalam suatu Bagian Hutan sebagai unit perencanaan tidak diperhitungkan. Akibatnya, daur yang ditetapkan pada umumnya terlalu panjang dan bersifat kaku, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan permintaan hasil hutan yang setiap saat selalu mengalami perubahan.

Apa yang dinamakan “daur ganda” yang diusulkan oleh Simon¹¹⁰ sebenarnya merupakan kompromi antara kepentingan perusahaan hutan untuk memperoleh keuntungan yang terbaik dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh kayu pertukangan yang bervariasi kualitasnya. Dengan variasi kualitas tersebut, konsumen dapat membeli kayu dengan harga

¹⁰⁹ Sunarto, 1973 Evaluasi Kegagalan Pembuatan Tanaman di KPH Padangan, Skripsi, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.

¹¹⁰ Simon, 1986, Penerapan Daur Ganda untuk Pengaturan Hasil Hutan Jati, Yogyakarta

yang sesuai dengan daya belinya. Di samping itu, daur ganda juga dapat memanfaatkan efisiensi pemanfaatan sinar matahari untuk memaksimumkan riap biomassa hutan tanaman. Penggunaan daur ganda juga memberikan keluwesan pembuatan rencana tebangtan tahunan sehingga dapat disesuaikan dengan fluktuasi permintaan masyarakat akan kayu bakar, kayu pertukangan dan kesempatan kerja.

c. Sistem pemasaran

Sistem pemasaran yang dipakai Perhutani diarahkan untuk dapat menjual hasil hutan dengan harga tertinggi, agar dapat diperoleh pendapatan yang tinggi pula. Jadi pendapatan tertinggi diperoleh dengan "memaksimalkan keuntungan". Cara penjualan hasil hutan ada tiga macam yaitu dengan lelang, kontrak dan penjualan langsung (dibawah tangan, DBT). Penjualan lelang ada dua macam, yaitu lelang besar dan lelang kecil. Lelang besar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan pemilik industri besar. Oleh karena itu lelang besar ini juga dilaksanakan di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Lelang kecil dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

perdagangan dan pemilik industri kecil dan dilaksanakan di kota-kota kecil pada lokasi kantor KPH yang bersangkutan.

Sebelum era Perhutani juga ada sistem lelang rakyat, yang dilaksanakan di desa atau kota Kecamatan di dekat hutan, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi industri rakyat. Akan tetapi karena alasan keamanan, sejak awal dekade tujuh puluhan sistem penjualan lelang rakyat ditiadakan, dan sejak itu rakyat di sekitar hutan tidak lagi mempunyai saluran untuk membeli kayu secara resmi dari Perhutani. Bersamaan dengan itu, penggergajian rakyat yang terletak di dekat hutan juga dihapuskan. Dampak peniadaan lelang dan penggergajian rakyat tersebut terhadap keamanan hutan maupun terhadap aspek-aspek lain dalam pengelolaan hutan belum pernah diteliti secara mendalam, tetapi yang jelas kebutuhan rakyat akan kayu pertukangan selanjutnya diisi oleh kayu curian yang diperoleh dari pasar gelap.

Dua macam sistem penjualan yang lain, yaitu melalui kontrak dan DBT, dikontrol langsung oleh Kepala KPH atau pejabat struktural Perhutani yang lebih tinggi tingkatannya. Penjualan dengan kontrak lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kayu bagi badan-badan swasta maupun pemerintah. Penjualan DBT dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan individu rakyat, tetapi prosedurnya tidak mungkin terjangkau oleh rakyat kecil. Pada umumnya saluran ini banyak dimanfaatkan pedagang atau penduduk kota yang kaya saja. Dalam kenyataan, sebagian besar hasil hutan jati di Jawa dan juga di KPH Randublatung dijual dengan sistem lelang besar, sisanya dijual pada pedagang lokal, sedangkan masyarakat setempat tidak memperoleh kesempatan untuk ikut membeli kayu secara langsung.

Seperti telah diterangkan di muka, sistem penjualan hasil hutan yang tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk membeli kayu perkakas secara legal, berakibat pada peningkatan intensitas pencurian kayu. Kenyataannya hampir semua rumah di daerah pedesaan Randublatung dibangun dari kayu jati, dan perabot rumah mereka juga dari kayu jati seperti meja panjang, kursi atau bangku panjang, tempat tidur dan lain-lain.

Dalam sistem pengelolaan hutan jati yang baru, sesuai dengan prinsip kehutanan sosial, sistem pemasaran hasil hutan harus lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai konsumen masyarakat dapat dibagi menjadi tiga lapis menurut kemampuan daya belinya. Masyarakat yang daya belinya rendah dapat diasumsikan akan

menggunakan kayu pertukangan non-jati serta kayu jati hasil penjarangan atau pemungutan pendahuluan yang pertama. Masyarakat dengan daya beli menengah akan menggunakan kayu pertukangan dan hasil pendahuluan kedua, sedangkan masyarakat yang mempunyai daya beli tinggi mampu membeli kayu jati yang berkualitas tinggi dari tebangan.

Masyarakat yang berpendapatan rendah merupakan konsumen kayu pertukangan yang terbesar. Tetapi karena tidak adanya suplai kayu untuk golongan masyarakat ini, maka sebagian dari mereka menggunakan barang substitusi yang kualitasnya lebih rendah, seperti bambu atau kayu tahun (non-jati). Dalam rencana pembangunan wilayah, terjaminnya kayu pertukangan untuk masyarakat pedesaan tidak saja diperlukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka, tetapi juga penting untuk menghentikan terjadinya proses pencurian kayu yang selama ini telah terjadi. Terbentuknya hutan tanaman dalam keadaan penuh sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan wilayah dan untuk stabilitas lingkungan karena dengan demikian hutan tanaman dapat menjaga air dan erosi, menyediakan habitat yang lebih baik untuk flora dan fauna, yang semuanya sangat bermanfaat untuk

memperkaya sumber genetik sebagai penunjang pembangunan di masa yang akan datang.

2. Faktor Pendukung

Kemungkinan pelaksanaan sistem pengelolaan hutan yang baru harus diuji dari sudut pandang institusi kehutanan maupun masyarakat. Uraian tentang faktor-faktor penghambat di muka dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang akan muncul dari aspek institusi kehutanan. Uraian berikutnya lebih ditujukan untuk mengetahui kemungkinan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman jati, yaitu dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan organisasi kehutanan (Perhutani).

a. Ketrampilan petani

Masyarakat pedesaan di pulau Jawa telah membuktikan bahwa mereka mampu membudidayakan pohon-pohon dengan berhasil dalam bentuk pekarangan, kebun campuran, talun, dan hutan rakyat. Sistem bercocok tanam pohon yang efisien ini dapat ditiru untuk mengelola kawasan hutan, yang secara fisik maupun ekonomi sesuai dan menguntungkan serta

dapat memberikan sumbangan pada pembangunan wilayah.¹¹¹

Sampai saat ini peranan penting masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan jati di Randublatung dan juga di Jawa sudah tidak diragukan lagi. Selama berabad-abad masyarakat di sekitar hutan jati selalu terlibat dalam semua kegiatan di kehutanan dan oleh karena itu mereka menguasai pengetahuan praktis tentang jati dan sistem pengelolaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat kehutanan sebenarnya tinggal mengkoordinir untuk melibatkan masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan hutan tanaman. Oleh karena itu dari sudut pandang ketrampilan masyarakat, pembentukan kerja sama dengan pihak kehutanan untuk memperbaiki pengelolaan hutan tanaman jati dapat dikatakan layak.

b. Surplus tenaga kerja

Peranan yang akan diberikan masyarakat di sekitar hutan dalam kerja sama dengan Perhutani untuk

¹¹¹ Darsono, 1983, Peranan Tanaman Berkayu di Tegal dan pekarangan di Daerah Kritis Terhadap Pendapatan Petani, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta

mengelola hutan tanaman jati dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan, khususnya melalui peningkatan *input* tenaga kerja. Oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan hutan yang baru untuk meningkatkan produktifitas lahan hutan sebenarnya hanya memerlukan tambahan tenaga kerja yang dapat diberikan oleh penduduk sekitar hutan, dibawah bimbingan dan pengawasan Perhutani. Dengan meningkatnya input tenaga kerja dalam pelaksanaan pengelolaan hutan yang baru dapat menggeser kurva *isoproduct* ke atas. Produktifitas lahan hutan dapat dimaksimumkan dengan menambah *input* modal dalam bentuk pemupukan dan pembuatan saluran irigasi, yang dapat disubsidi oleh Perhutani atau lembaga pemerintah lainnya. Pembinaan sistem pengelolaan daerah *upland* seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat setempat saja, karena keberhasilannya juga akan menguntungkan penduduk daerah rendah.

Kemungkinan untuk mengikut-sertakan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan juga harus dipelajari dari perspektif wilayah. Angka

statistik menunjukkan bahwa 60 % jumlah penduduk di Jawa bekerja sebagai petani. Di wilayah KPH Randublatung hampir 90 % lebih masyarakat bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani yang besar di Jawa dalam kenyataan tidak didukung oleh lahan pertanian yang cukup. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian pada tahun 1987 adalah 0,068 ha per kapita atau 0,318 ha per keluarga. Rendahnya rasio lahan pertanian/orang menimbulkan surplus tenaga kerja atau pengangguran tak kentara di pedesaan. Karena jumlah absolut petani cukup tinggi, maka jumlah pengangguran tak kentara juga cukup tinggi. Adanya pengangguran tak kentara mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita di pedesaan. Dengan jumlah penduduk yang masih terus meningkat, maka pendapatan per kapita masyarakat pedesaan akan terus menurun. Jumlah petani kecil dan petani tak berlahan sangat tinggi, maka penurunan jumlah penduduk tersebut belum banyak mengurangi adanya pengangguran tak kentara; demikian pula kekurangan kayu bakar dan kayu pertukangan masih tetap berlangsung. Dengan demikian masalah pokok

pembangunan pedesaan masih belum banyak berubah dari keadaan sekarang.

c. **Kekurangan kayu bakar dan kayu pertukangan**

Besarnya masalah sosial ekonomi di KPH Randublatung tidak banyak berbeda dengan wilayah Kabupaten Blora. Shima dan Nibering pernah melakukan penelitian menekankan pentingnya meningkatkan produksi kayu bakar untuk memperbaiki tingkat ekonomi masyarakat pedesaan khususnya masyarakat di sekitar hutan dan sekaligus menjaga lingkungan agar tidak mengalami kemunduran.¹¹² Nibering berkesimpulan bahwa kebutuhan kayu bakar di Jawa yang sangat besar, yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi resmi yang dihasilkan oleh kehutanan, merupakan faktor utama yang menyebabkan kerusakan hutan oleh masyarakat. Di lain pihak, kekurangan kayu bakar yang besar tersebut berarti sudah tersedia konsumen sehingga salah satu masalah penting dalam pengusahaan kayu bakar memberi peluang menguntungkan karena daurnya pendek, yaitu antara tiga sampai lima tahun, dan dapat dipilih jenis yang dapat dibudidayakan dengan sistem pangkas sehingga biaya permudaan menjadi lebih

murah dan sampai batas tertentu riap volume lebih besar. Disamping itu pemilikan lebih dari satu jenis tidak akan menambah kesulitan apa pun dalam perencanaan maupun pelaksanaan pekerja , sedang pencampuran jenis ini sangat menguntungkan bagi pembinaan lingkungan karena dapat memperkaya keragaman hayati, baik flora maupun fauna.¹¹³ Sampai tahun 2050 diperkirakan produksi kayu pertukangan dari hutan jati di KPH Randublatung belum dapat memenuhi permintaan masyarakat, kalau sistem konvensional masih dipertahankan. Jadi dari segi permintaan, produksi kayu pertukangan belum jenuh. Hal ini memberi motivasi untuk berupaya memperbaiki kualitas hutan tanaman yang ada agar produktifitasnya meningkat. Selama ini kekurangan suplai kayu pertukangan dipenuhi dengan impor kayu dari Kalimantan. Tetapi karena kualitas kayunya lebih rendah, pemecahan masalah seperti itu hendaknya dianggap sebagai jalan pintas yang bersifat sementara. Dengan demikian meningkatkan produksi kayu pertukangan di daerah sendiri dengan kualitas yang lebih baik harus lebih diutamakan.

¹¹² Nibering, Waluyo, 1986, Firewood Trading and Consumption Kali Konto Project Area, East Java, Malang.

¹¹³ Nibering, Waluyo, 1986, Op.cit. hal 98

d. Beberapa masalah lain

Dengan menerapkan sistem pengelolaan hutan jati yang baru, produksi pangan, kayu bakar dan kayu pertukangan, serta kesempatan kerja di KPH Randublatung akan meningkat. Walaupun demikian, sistem pengelolaan hutan yang baru tetap belum mampu memecahkan semua masalah sosial di daerah pedesaan secara tuntas. Sistem pengelolaan hutan yang baru dapat memecahkan masalah kekurangan kayu pertukangan. Sedangkan surplus tenaga kerja di desa hutan belum seluruhnya dapat diserap oleh pelaksanaan sistem pengelolaan hutan yang baru.

Secara umum, masalah kelebihan tenaga kerja dapat dipecahkan dengan menciptakan lapangan kerja baru di luar sektor pertanian. Akan tetapi menciptakan lapangan di luar sektor pertanian itu untuk daerah pedesaan bukan merupakan hal yang mudah karena akan menghadapi masalah kelangkaan modal, infrastruktur dan tenaga trampil. Ketrampilan penduduk pedesaan pada umumnya terbatas pada kegiatan bercocok tanam. Pembangunan kehutanan sebenarnya lebih sesuai dengan kondisi pedesaan karena dapat merangsang sebenarnya lebih sesuai dengan kondisi pedesaan karena dapat merangsang pembangunan sektor non-pertanian termasuk

industri rumah tangga, jaringan komunikasi dan perdagangan. Dalam menghadapi masalah kekurangan infrastruktur di pedesaan, dengan lahan pertanian yang terbatas, kehutanan dapat memberikan jalan pemecahan, sehingga mendorong kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hampir pekerjaan di kehutanan dapat dilakukan oleh masyarakat desa hutan. Kehutanan juga dapat menyediakan bahan baku untuk berbagai macam industri rumah tangga, seperti pembuatan arang, mebel, gula kelapa, pembakaran gamping dan lain-lain. Sehingga apabila pembangunan sektor non-pertanian dapat ditingkatkan untuk menyerap tenaga kerja, maka masalah pengangguran di KPH Randublatung akan dapat dipecahkan dan dengan demikian masalah kerusakan hutan karena pencurian akan bisa sedikit teratasi.

3. Konsekuensi

Penerapan sistem pengelolaan hutan yang baru menuntut beberapa konsekuensi perubahan. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, konsekuensi perubahan tersebut justru dapat menjelma menjadi masalah baru. Untuk melakukan persiapan yang baik itu perlu dipelajari karakter dan intensitas masing-masing.

a. Perencanaan

Dalam kenyataan, hutan tanaman di Jawa tidak hanya dikelola oleh Perhutani saja, tetapi juga oleh masyarakat sekitar hutan. Namun karena keduanya mempunyai tujuan pengelolaan yang berbeda, maka terjadinya konflik antara kehutanan dengan masyarakat sulit dihindarkan. Adanya konflik tersebut menyebabkan perkembangan tegakan tidak efisien, sehingga kualitas dan produktifitasnya mengalami kemunduran. Penurunan kualitas tegakan akan mengurangi potensi ekonomi wilayah tersebut, karena produksi kayu maupun kesempatan kerja akan berkurang, erosi meningkat dan kualitas lingkungan merosot. Oleh karena itu adalah perlu untuk merancang sistem menguntungkan antara kehutanan dengan masyarakat, untuk meniadakan hal-hal yang merugikan pembangunan wilayah.

Dengan adanya masalah defisit kayu bakar dan kayu pertukangan, perencanaan sistem pengelolaan hutan tanaman yang diinginkan harus berarti meningkatkan produksi kayu untuk kepentingan pembangunan wilayah.

Rejim pengelolaan hutan tanaman harus dirancang sebagai awal pengelolaan tegakan yang baik. Sistem pembuatan tanaman merupakan landasan untuk merancang

sistem penjarangan. Operasi permanen hasil menyangkut rejim penjarangan dan tebang akhir. Tujuan utama pengelolaan hutan harus diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan produksi pangan bagi petani kecil dan petani tak berlahan di desa hutan. Strategi ini diperlukan untuk mengendalikan keamanan hutan dalam rangka mengatasi masalah pencurian kayu, kegagalan pembuatan tanaman dan penggembalaan ternak.

Dalam memilih alur pemecahan tersebut, diperlukan intensifikasi pengelolaan hutan, khususnya dalam bentuk peningkatan input tenaga kerja. Pada umumnya penggunaan tenaga kerja di kehutanan dianggap mahal sehingga input produksi ini dalam pengelolaan hutan konvensional dibatasi. Namun kerjasama dengan masyarakat akan memungkinkan penggunaan tenaga kerja yang murah karena di satu pihak terdapat kelebihan tenaga kerja di desa hutan dan di pihak lain masyarakat menghadapi kekurangan lahan garapan. Jadi masalah kekurangan tenaga kerja di kehutanan dengan kekurangan lahan garapan di desa hutan dapat dipadukan untuk membentuk kerjasama yang saling menguntungkan tersebut. Sub-sistem kehutanan menyediakan lahan garapan, sedang sub-sistem masyarakat menyediakan tenaga kerja, sehingga

kedua input produksi itu dapat dikombinasikan untuk meningkatkan intensitas pengelolaan lahan hutan. Strategi seperti ini memenuhi untuk merancang pengelolaan kehutanan sosial. Dalam situasi lingkungan sekarang, meningkatkan intensitas pengelolaan hutan merupakan jalan yang tepat untuk menuju pemecahan masalah yang dihadapi hutan tanaman jati di Jawa.¹²²

Untuk melaksanakan kehutanan sosial, masih banyak hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan di lapangan yang harus dirubah. Pelaksanaan kehutanan sosial menuntut perubahan tujuan utama (prime goals) pengelolaan hutan jati di Jawa. Tujuan utama tersebut menentukan identitas suatu perusahaan hutan.¹²³ Sampai sekarang identitas yang dimiliki Perhutani adalah sebagai penghasil kayu pertukangan jati. Dengan strategi kehutanan sosial, identitas tersebut akan berubah menjadi "pendukung pembangunan pedesaan".

b. Organisasi

¹²² Sumitro, Achmad, 1986, Nota Dinas: Pengembangan KPH Surakarta sebagai unit mandiri.

¹²³ Duerr, William A, Dennis E, 1979, Forest Resource Management, Decision Making Principle and Cases, W.B, Saunders Company, Philadelphia, ix-612.

Organisasi dan pelaksanaan sistem untuk pengelolaan hutan sosial juga harus diadakan penyesuaian terhadap sistem yang lama. Adanya kerjasama antara kehutanan dengan masyarakat memerlukan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang lebih intensif dan luwes. Untuk itu saluran komunikasi antara pejabat kehutanan dengan rakyat harus ditingkatkan. Dalam kasus KPH Randublatung komunikasi itu nampaknya terputus. Dalam hal melakukan pembinaan saja, pihak Perhutani harus memakai tangan orang lain, seperti tokoh masyarakat, ulama dan lain-lain. Sehingga komunikasi antara Perhutani dengan masyarakat setempat semakin jauh. Pengawasan pekerjaan oleh pejabat kehutanan harus diintensifkan, oleh karena itu luas unit pengelolaan hutan perlu dikurangi. Beberapa kali di lingkungan KPH Randublatung ada program "managemen qolbu", sebagai bentuk pengawasan kinerja bagi karyawan Perhutani. Tetapi hasilnya belum memuaskan, karena kegiatan itu hanya bersifat sporadis dan terkesan terpaksa. Pengawasan dalam bentuk managemen organisasi perlu terus dilakukan disamping managemen qolbu di atas.

Dalam sistem pengelolaan hutan sosial, satu KPH dapat terdiri dari empat sampai enam Bagian Kesatuan

Pemangkuan Hutan (BKPH). Jadi luas areal suatu KPH kira-kira sama dengan luas *houtvesterij*, yaitu sekitar 8.000 ha. Administratur suatu KPH (Sdm/KKPH) dapat dibantu oleh seorang Ajun Administratur, Empat sampai enam KBKPH, seorang Kepala Tata Usaha, dan seorang Asisten Perencanaan. Itulah yang dimaksud sebagai bentuk pengawasan struktural.

Organisasi Seksi maupun Biro Perencanaan juga perlu disesuaikan, Keluwesan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus didukung oleh sistem yang memadahi. Perubahan tujuan utama pengelolaan hutan tanaman jati di Jawa menuntut perubahan informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan dan strategi perusahaan. Informasi yang diperlukan untuk menyusun rencana perusahaan tidak hanya menyangkut informasi tegakan dan lahan hutan saja, tetapi juga harus memasukkan informasi tentang sosial ekonomi masyarakat, produksi pertanian, kebutuhan pangan, lapangan pekerjaan, peternakan, pembangunan industri, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting, yang seringkali hanya dapat ditentukan menurut kepentingan setempat seperti memperhatikan tentang persepsi masyarakat setempat mengenai arti sebuah hutan dan

kesejahteraan. Untuk memenuhi persyaratan itu, kepala seksi perencanaan harus dibantu oleh empat Asisten pemrogram komputer dan pengolah data. Jangka waktu perencanaan 10 tahun masih dapat dipertahankan, tetapi harus disusun mekanisme yang dapat merubah rencana kegiatan selama jangka waktu itu untuk disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi.

c. Sistem pemasaran

Sistem pemasaran dan pengelolaan hasil hutan juga perlu disesuaikan. Sistem pemasaran harus diarahkan untuk lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Kualitas dan harga hasil hutan yang akan dipasarkan kepada masyarakat harus disesuaikan dengan selera dan kemampuan daya beli masyarakat tersebut. Pengusahaan kayu bakar ditujukan untuk memecahkan masalah defisit kayu bakar dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, khususnya bagi petani kecil dan petani tak berlahan. Dengan demikian penjualan kayu bakar dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam pengelolaan kehutanan sosial, di bawah bimbingan dan petunjuk Perhutani. Dengan sistem pemasaran

yang baru ini, proses mantri kehutanan (KRPH) perlu diubah dari menjaga hutan menjadi melayani masyarakat yang memerlukan kayu bakar maupun kayu pertukangan, mendidik masyarakat tentang hutan dan kehutanan, dan mengkoordinir petani yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kehutanan. Sehingga kesan bahwa mantri hutan adalah “musuh” masyarakat akan hilang dengan sendirinya. Penjagaan super ketat oleh Polisi dan Tentara akan hilang sendirinya, karena hal itu memang tidak populer dan bahkan contra produktif.

Untuk menciptakan saluran baru dalam menyediakan kayu bakar dan kayu pertukangan bagi masyarakat setempat, sistem pemasaran lama harus diubah dengan menjual hasil hutan secara langsung kepada masyarakat dalam satuan volume kecil. Untuk itu, dapat dibuat toko-toko penjualan kayu bakar maupun kayu pertukangan di beberapa pusat penjualan kayu, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KRPH. Jadi setiap KRPH akan mempunyai warung kayu di lingkungan rumah dinas. Untuk kepentingan ini, sistem administrasi perlu ditingkatkan untuk mengatur sistem pemasaran baru ini, baik untuk mengetahui perubahan permintaan konsumen maupun untuk pengawasan keuangan

perusahaan. Karena sistem ini benar-benar baru, maka diperlukan penelitian yang seksama untuk mempersiapkannya.

Sistem pemasaran yang baru tersebut harus didukung oleh sistem pengelolaan kayu yang lebih baik untuk memproduksi kayu pertukangan yang siap pakai bagi berbagai macam keperluan masyarakat. Dengan sistem pemasaran seperti itu pencurian kayu dan pelanggaran hukum lainnya akan dapat dikurangi. Sistem pengelolaan kayu perlu dikembangkan untuk memenuhi berbagai macam tujuan, bukan hanya menggergaji blok ke dalam kayu persegi atau papan. Oleh karena itu perkembangan konsumen akan kepentingannya perlu dicermati.

Pelaksanaan pengelolaan hutan sosial juga memerlukan kembali pengaturan sistem pemanfaatan lahan hutan. Masalah ini merupakan hal yang sangat rumit di Jawa secara umum. Pemahaman masyarakat tentang penggunaan lahan masyarakat milik umum juga mengalami perkembangan, mereka siap untuk belajar kemudian menerima sistem baru ini. Sistem pemanfaatan lahan hutan perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rjim pengelolaan hutan yang intensif di kawasan hutan pinggiran (*interface area*). Dengan sistem konvensional, pesanggem diperkenankan menanam tanaman

pangan di areal tumpangsari selama dua tahun saja. Dalam sistem baru penanaman tanaman di *interface area* dapat berlangsung selama dua puluh tahun atau lebih.

d. Perjanjian kerjasama

Untuk mengendalikan petani dalam kerjasama dengan Perhutani, suatu perjanjian yang efektif perlu dibuat, yang diawasi oleh Kepala Desa setempat atau pejabat Pemerintah Daerah yang lebih tinggi. Pengendalian petani dengan membuat kerjasama seperti itu pernah dilakukan dengan sukses selama pelaksanaan tumpangsari sejak awal sampai dekade limapuluhan. Sekarang organisasi masyarakat Desa yang ada seperti Lembaga Sosial Desa (LSD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Karang Taruna dapat dilibatkan dalam kerjasama tersebut.

Perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat itu perlu diperbaharui secara periodik, misalnya tiap dua tahun sekali. Dalam kesempatan itu, setiap petani yang terlibat akan dinilai untuk menentukan apakah dia dapat meneruskan keterlibatannya dalam kerjasama. Penilaian ini diperlukan untuk menjaga agar kerjasama dapat memenuhi tujuan secara efektif, yaitu menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian kualitas hasil pekerjaan selalu dapat dijaga,

baik pembangunan hutannya maupun usaha bercocok tanam untuk kepentingan petani. Penilaian tersebut didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh petani dalam melaksanakan pekerjaannya, termasuk kegiatan untuk kepentingan kehutanan.

Adanya perubahan-perubahan dalam beberapa aspek pengelolaan hutan tersebut juga memerlukan perubahan dalam personalia kepegawaian dan profesinya. Organisasi KPH maupun Seksi Perencanaan harus dilengkapi dengan tenaga ahli selain sarjana kehutanan, seperti ahli ekonomi, hukum, pertanian, sosiologi dan keteknikan. Dalam jangka pendek perlu dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil kehutanan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penambahan pengetahuan tentang latar belakang pengelolaan hutan dengan sistem baru. Dalam jangka panjang, perubahan profesi kehutanan harus dapat diantisipasi oleh kurikulum sekolah kehutanan. Tujuan sekolah kehutanan harus mendukung pelaksanaan konsep yang mengatakan bahwa rimbawan harus mampu untuk menjadi agen pembangunan pedesaan (*agent of rural development*), suatu slogan indah yang dicanangkan oleh rimbawan seluruh dunia. Ini berarti bahwa rimbawan harus memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah di luar kehutanan

seperti ekonomi pedesaan, sosiologi pedesaan, dan pembangunan wilayah.

e. Pengaturan tebangan

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa pengelolaan hutan meliputi pengelolaan kayu pertukangan, kayu bakar, tanaman pangan dan pakan ternak, serta penciptaan lapangan kerja baru. Perlu dikemukakan disini bahwa pengelolaan tebangan kayu pertukangan memerlukan perhatian tersendiri, terutama dalam hubungannya dengan sifat-sifat khusus pengelolaan hutan yaitu waktu panjang untuk produksi hutan, pohon berperan sebagai unit produksi dan sekaligus juga produksinya sendiri sehingga ada keluwesan yang sangat besar dalam menentukan waktu pemanenan. Kayunya sendiri mempunyai sifat ganda, sedang lahan hutan pada umumnya mempunyai aksebelitas yang sulit sehingga memerlukan biaya operasional yang mahal.

Secara konvensional, pengaturan hasil kayu pertukangan diperlukan untuk menjamin kebutuhan konsumen. Dalam strategi kehutanan sosial, konsumen kayu pertukangan tidak hanya terdiri atas pedagang besar, pemilik industri dan penduduk kota saja, tetapi juga harus meliputi penduduk pedesaan setempat (wilayah KPH). Pengaturan hasil kayu

pertukangan dalam strategi kehutanan sosial juga harus memperhatikan masalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu idealnya pengaturan hasil kayu pertukangan harus membuat proyeksi tebangan tahunan untuk memperoleh kayu pertukangan dari penjarangan, pemungutan pendapatan dan tebang akhir. Tebangan tahunan kayu pertukangan kemudian dapat diatur berdasarkan data yang dikumpulkan dari inventore, yang mencakup inventore hutan maupun inventore sosial ekonomi masyarakat.

Dalam pengelolaan hutan sosial, pengaturan hasil tebangan harus mencakup rencana penjarangan, pemungutan hasil pendahuluan dan tebang akhir. Faktor sosial ekonomi juga harus diperhitungkan untuk menentukan tebangan tahunan kayu pertukangan. Untuk itu perlu sigi kemasyarakatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial ekonomi wilayah setempat termasuk persepsi masyarakat tentang hutan dan kesejahteraan. Berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya tujuan pengelolaan hutan dapat dirumuskan dan kemudian hasil tebangan tahunan selama periode dapat dipilih.

Tabel 7

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BLORA
MENURUT KECAMATAN 1997/1999

NO.	KECAMATAN	1990	1997	1998	1999
1.	Jati	46.711	46.873	47.159	47.560
2.	Randublatung	67.858	71.615	71.190	70.921
3.	Kradenan	37.614	37.602	37.546	38.085
4.	Kedungtuban	53.810	53.857	53.854	53.922
5.	Cepu	73.040	73.132	73.176	73.574
6.	Sambong	26.337	26.331	26.331	26.413
7.	Jiken	35.458	35.569	35.667	35.587
8.	Jepon	56.160	56.273	56.472	56.867
9.	Bogorejo	23.081	23.167	23.184	23.206
10.	Blora	85.582	86.740	86.437	86.407
11.	Tunjungan	41.754	42.001	42.316	42.482
12.	Banjarejo	55.810	55.879	55.834	56.240
13.	Ngawen	55.507	55.724	55.845	57.939
14.	Japah	31.653	32.189	32.666	32.688
15.	Kunduran	60.599	61.007	61.487	62.256
16.	Todanan	55.572	55.719	55.853	56.087
Jumlah		806.546	813.678	815.017	820.234

Sumber: BPS Kabupaten Blora

Tabel 8

DATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
KABUPATEN BLORA

NO.	SEKTOR	1998		1990	
		Banyaknya	Prosentase	Banyaknya	Prosentase
1.	Pertanian	325.207	73,39	332.070	74,64
2.	Pertambangan	1.564	0,35	879	0,20
3.	Industri	11.375	2,57	7.989	1,80
4.	Listrik, Gas,	290	0,07	0	0,00
5.	Konstruksi	7.478	1,69	8.035	1,81
6.	Perdagangan	44.982	10,15	57.004	12,81
7.	Transportasi	7.175	1,62	9.896	2,22
	Telekomunikasi				
8.	Keuangan	2.825	0,64	0	0,00
9.	Jasa	42.209	9,53	29.025	6,52
10.	Lain-lain	0	0,00	0	0,00

Sumber: BPS Kabupaten Blora 1999

UPT-PUSTAK-UNDIP

BAB PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pada analisis dan hasil penafsiran terhadap berbagai temuan lapangan yang dikonstruksikan dengan teori-teori yang relevan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan persepsi masyarakat terhadap hutan dan pengelolaannya tidak hanya mencakup politik saja, tetapi juga sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lain yang kompleks sifatnya. Politik kehutanan masyarakat harus dipahami sebagai upaya mencari tahu mengenai keniscayaan perubahan pendekatan sistem pengelolaan sumber daya hutan di negara-negara dunia berkembang pada umumnya dan khususnya di Indonesia yang memiliki penduduk banyak dan sumber daya alamnya sebagian besar dikuasai oleh negara. Sistem pengelolaan hutan yang *state based* seperti yang selama ini dilakukan melalui instrumen KPH dan BUMN telah terbukti tidak mampu mengemban amanah menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

Kapitalisme telah masuk dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan yang *state based* tersebut. Kapitalisme sangat jelas memposisikan masyarakat sebagai bagian yang tidak penting dalam proses produksi. Pemegang modal dan pemegang ijin pengelolaan hutan adalah kelompok masyarakat yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah dan berhak atas sumber daya alam hutan yang menjadi pangkuannya, tak terkecuali Perhutani sebagai

kepanjangan tangan pemerintah dalam menguasai hutan jati. Sementara itu proses marginalisasi terjadi atas masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan yang telah dikuasai kepemilikannya oleh pemegang modal. Padahal di atas kawasan hutan tersebut ada klaim hak oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal. Setuju atau tidak dengan teori ini, dalam realitasnya terbukti bahwa proses itulah yang terjadi selama ini, khususnya yang terkait dengan sumber daya alam hutan dan masyarakat sekitar hutan. Representasi teori di atas dapat dirunut mulai dari masuknya VOC di Jawa hingga kemudian pengelolaan hutan di Jawa diserahkan kepada Jawatan Kehutanan dan Perhutani. Stigmatisasi Perhutani sampai saat ini masih menjadi satu-satunya penguasa hutan jati di Jawa tidak terlepas dari stigma teori kapitalisme itu. Inilah satu-satunya pembuktian valid bahwa kapitalisme hutan sudah terjadi di Indonesia sejak jaman kolonialisme Belanda.

Model pendekatan kapitalisme yang *state based* itu tidak menunjukkan perbaikan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sementara itu ada pembuktian lainnya di banyak daerah di Indonesia bahwa masyarakat dengan kekuatan kultural dan kebersamaan di desa mampu mengembangkan dan membangun lahan-lahan kritis menjadi lahan-lahan produktif. Upaya masyarakat tersebut antara lain berupa hutan rakyat. Paradoks yang terjadi selama ini adalah dengan pendekatan *state based* hutan mengalami degradasi sangat serius, tetapi dengan pendekatan kelembagaan keluarga dan komunal, rakyat atau masyarakat mampu membangun dan mengembangkan sumber daya hutan

tersebut. Konsep hutan sebagai sumber daya alam yang terbaharui justru dibuktikan oleh masyarakat bukan oleh penguasa dan pengusaha hutan. Dari pembuktian tersebut, maka politik pembangunan kehutanan harus diubah dari *state based* menjadi *community based*. Politik seperti ini dikemas dalam perspektif teori politik kehutanan masyarakat.

Sangatlah normal ketika telah menjadi sebuah keharusan untuk membicarakan hubungan antara paham politik negara atas sumber daya alam hutan dan paham politik kerakyatan atas sumber daya alam. Hubungan negara dan rakyat tidak mungkin dipisahkan begitu saja, tetapi keduanya harus diramu sedemikian rupa sehingga diharapkan jika masyarakat melakukan gugatan atas hak kelola mereka sesungguhnya bukan tidak berdasar tetapi justru mendapat dukungan konstitusi negara. Dengan kata lain dapat diketengahkan bahwa politik kehutanan masyarakat sesungguhnya berupaya membahas alasan-alasan mengapa gerakan pengelolaan hutan oleh masyarakat suatu keharusan, bukan suatu yang sifatnya tambal sulam atau meruakan bagian kebijakan yang setengah hati dari pemerintah. Program-program seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan keluarga, sistem hutan kerakyatan, semuanya merupakan representasi dari kemauan politik kehutanan masyarakat.

Guna menjawab pertanyaan dari studi ini, simpulan selanjutnya lebih bersifat mikro, sesuai dengan konteks di mana studi ini dilakukan, namun demikian tidak tertutup kemungkinan juga berlaku di daerah lainnya.

Pertama, ketidakberdayaan masyarakat sekitar hutan jati dalam keikutsertaan mengakses pengelolaan sumber daya hutan jati disamping karena kendala eksternal, juga disebabkan oleh problematika internal masyarakat itu sendiri. Problematika itu meliputi persepsi masyarakat mengenai hutan dan kesejahteraan, jiwa kewirausahaan rendah, kualitas kehidupan yang rendah, keterbatasan modal dan lain sebagainya.

Kedua, kebijaksanaan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan demi meningkatkan kesejahteraannya yang merupakan rangkaian proses pelaksanaan amanat Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 1999 tentang perusahaan umum kehutanan (Perum Perhutani, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2001 tentang Perum Perhutani diubah menjadi Perseroaan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara nasional kebijaksanaan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sekitar hutan diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Konsepsional rumusan kebijaksanaan atau program yang hendak dilaksanakan sudah baik, meskipun dalam proses perumusannya dilapangan mengandung kelemahan-kelemahan karena hanya dilakukan oleh sekelompok elit atau aparat birokrasi (Perhutani) atau Pemerintah Daerah, pakar, pengamat, tanpa membuka ruang bagi kelompok sasaran kebijaksanaan memberi kontribusi pemikiran mengenai realitas permasalahan yang dihadapi sebenarnya. Pengambilan keputusan dengan model elit-massa tersebut, menempatkan kelompok sasaran

selalu dimarginalkan dan sebagai obyek dari kebijaksanaan pemerintah dan tidak memiliki posisi tawar yang cukup ketika berhadapan dengan birokrasi (Perhutani). Dampak dari hal yang demikian itu adalah bahwa (1) masyarakat sekitar hutan jati berperan sebagai *anak yang baik dan taat*, sementara birokrasi berposisi sebagai *sinterklas*. (2) masyarakat sekitar hutan tidak memiliki program sehingga enggan terlibat lebih dalam dengan alasan kurang atau tidak adanya keterkaitan antara program yang ditawarkan dengan kebutuhan yang mereka perlukan.

Ketiga, implementasi kebijaksanaan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan masih banyak mengalami kendala khususnya pelaksanaan di lapangan masih dilaksanakan secara parsial dan belum ada keterpaduan antar birokrasi itu sendiri baik Perhutani, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya. Hal demikian masih diperparah dengan kualitas sumber daya aparat yang rendah, perilaku dis-fungsional dan negatif aparat, intervensi kepentingan politik ke dalam birokrasi pelaksana, dan kurangnya keterlibatan lembaga pendukung dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Keempat, proses evaluasi program sekedar formalitas dan untuk kepentingan laporan. Evaluasi yang dilakukan bukan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa kebijaksanaan yang dilaksanakan tidak optimal dan bagaimana mengatasinya, tetapi justru mencari siapa salah. Evaluasi demikian melahirkan kondisi yang saling menyerang dan saling menyalahkan. Masyarakat sekitar hutan beranggapan birokrasi pelaksana (Perhutani) yang

salah karena tidak serius memberdayakan masyarakat sekitar hutan, sebaliknya birokrasi (Perhutani) menyalahkan masyarakat yang dianggap sulit diajak kerjasama, masing-masing mempunyai persepsi yang berbeda, sehingga proses dialog bersifat kaku.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Perhutani dan juga Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijaksanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan guna meningkatkan kesejahteraannya harus melibatkan berbagai pihak baik Lembaga swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi, dan instansi terkait serta harus memperhatikan persepsi masyarakat itu sendiri baik mengenai pengelolaan hutan maupun tentang kesejahteraan.
2. Perlu program yang integreted dan terpadu khususnya dengan pemerintah daerah dan pemerintahan desa serta instansi terkait khususnya Kepolisian. Karena nampak jelas tidak adanya keterpaduan dan apalagi koordinasi yang baik antar instansi itu. Sehingga yang nampak bahwa pengelolaan hutan hanyalah tanggung jawab Perhutani semata. Pemda dan aparat Kepolisian nampaknya berjalan sendiri-sendiri. Kalau hal ini dibiarkan maka pengelolaan hutan tidak optimal dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan hutan terus mengalami kerusakan akibat pencurian.

3. Tindakan hukum secara tegas dan mendidik harus diberlakukan terhadap siapa saja tidak terkecuali aparatur birokrasi khususnya Perhutani yang melakukan perbuatan tercela. Jangan ada kesan bahwa masyarakat saja yang menjadi sasaran kesalahan tatkala terjadi kerusakan hutan.
4. Kualiatas Sumber Daya Manusia Birokrasi (Perhutani) perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan. Mereka perlu diberi pemahaman tentang studi sosiologi, hukum, ekonomi dan disamping keahlian kehutanan yang menjadi bidangnya.
5. Masyarakat sekitar hutan juga terus dibina baik berupa pemberian modal maupun pembinaan berupa kemandirian, wirausaha, dan ketrampilan, sehingga pembangunan hutan bersama masyarakat bisa berjalan sesuai yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga sebagai kekuatan ekonomi nasional.